

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

PERANAN TOKOH AGAMA DALAM PERJUANGAN
KEMERDEKAAN 1945--1950 : DI ACEH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

PERANAN TOKOH AGAMA DALAM PERJUANGAN
KEMERDEKAAN 1945--1950 : DI ACEH

H A D I A H
D A R I
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1997

**PERANAN TOKOH AGAMA DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN,
1945--1950 : DI ACEH**

Penulis : Rusdi Sufi, Muhammad Nasir, Zulfan

Penyunting : Zulfikar Ghazali

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan

Jakarta 1997

Edisi 1997

Dicetak oleh : CV. PUTRA SEJATI RAYA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Sedyawati', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Edi Sedyawati
NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku tentang *Peranan Tokoh Agama Dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945--1950 : Di Aceh* ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/penulisan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994/1994.

Buku ini menguraikan tentang partisipasi dan peran serta para Ulama dan keterlibatan mereka dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Peranan para Ulama tersebut telah memotifasi rakyat Aceh dalam berbagai aspek perjuangan baik semasa revolusi kemerdekaan maupun di masa penjajahan untuk mengobarkan semangat perjuangan rakyat. Demikian juga sampai pada masa mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah informasi dan khasanah kesejarahan mengenai peran serta para Ulama dalam periode perjuangan kemerdekaan dan dalam perjalanan bangsa Indonesia pada umumnya. Disamping itu diharapkan pula dapat

menjadi bahan bagi peningkatan kesadaran sejarah masyarakat pada umumnya.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan ulang buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Oktober 1997

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.A. Ohorella', with a large, stylized flourish above the name.

G.A. Ohorella

NIP. 130370094

KATA PENGANTAR

Penelitian ini yang berjudul “*Peranan Tokoh Agama Dalam Perjuangan Kemerdekaan, 1945--1950: Di Aceh*” telah berhasil dilakukan dengan baik berkat kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.

Dalam karya-karya sejarah nasional Indonesia, perhatian terhadap peranan tokoh-tokoh agama masih relatif kurang mendapat perhatian. Pada hal aktivitas dan peranan tokoh-tokoh agama itu telah ada sejak berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini. Kontribusi dan peranan para alim ulama itu telah memberikan corak dan warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan di Aceh khususnya. Mereka juga telah banyak berjasa dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajah bersama pemimpin dan elite politik lainnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya aktivitas dan perjuangan para alim ulama di masa lampau itu untuk terus dikaji dan diteliti, agar dapat diketahui dan diteladani oleh para generasi berikutnya.

Penelitian ini lebih banyak mempergunakan studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji dan meneliti buku-buku, naskah-naskah lama, dan berbagai tulisan lainnya baik yang berasal dari dalam negeri maupun hasil-hasil laporan atau catatan para penulis asing yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Semua data dan informasi

yang didapatkan dikaji dan dianalisa sedemikian rupa dengan menggunakan metode sejarah kritis.

Kepada semua pihak; khususnya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional yang telah memberikan bantuan dana, sehingga karya (penelitian) ini dapat terwujud, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, Desember 1996.
Peneliti,

(Drs. Rusdi Sufi)
Ketua

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Pertanggungjawaban Ilmiah	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
Bab II Alim Ulama, Masyarakat dan Pemerintah	
2.1 Hubungan Alim Ulama Dengan Masyarakat Pedesaan	7
2.2 Hubungan Alim Ulama Dengan Penguasa Pemerintahan	19
Bab III Dari Perang Aceh Sampai Pergerakan Nasional	
3.1 Partisipasi Alim Ulama Dalam Perang Aceh	33
3.1.1 Teungku Chik Di Tiro	42
3.1.2 Teungku Chik Pante Kulu	48

3.1.3	Teungku Chik Kutakarang	51
3.1.4	Teungku Fakinah (Ulama Pahlawan Wanita)	53
3.1.5	Teungku Tapa	55
3.2	Partisipasi Alim Ulama Dalam Pergerakan Nasional	58
Bab IV Dalam Kancah Revolusi Kemerdekaan		
4.1	Sekitar Proklamasi : Respon Ulama dan Uleebalang	67
4.2	Alim Ulama Dalam Revolusi Sosial	84
Bab V Penutup		
5.1	Kesimpulan	105
5.2	Saran-saran	106
Daftar Pustaka		109
Lampiran-lampiran		113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Umumnya dalam khasanah Sejarah Nasional Indonesia, tokoh agama atau elite agama yang lazim disebut ulama, lebih banyak dikenal sebagai pemimpin masyarakat non formal. Hal ini menunjukkan bahwa peranan para elite agama atau ulama dalam masyarakat cukup besar dan cukup disegani. Kita tidak dapat memungkiri bahwa para ulama yang di Aceh disebut dengan istilah *teungku*, *teungku chiek* dan, *abu* merupakan tokoh-tokoh panutan yang sangat menonjol di daerah pedesaan. Apa yang dikatakan atau difatwakan oleh mereka, lebih didengar dan dipatuhi oleh masyarakat dari pada apa yang dikatakan oleh pemimpin formal. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa pemimpin-pemimpin formal tidak bisa dengan serta merta melepaskan diri dari dukungan para ulama. Sudah semenjak masa kerajaan, masa penjajahan dan hingga kemerdekaan para ulama selalu mendampingi para pemimpin formal (umara) dalam melaksanakan pemerintahan,, mulai dari unit pemerintahan tertinggi (kesultanan) hingga unit pemerintahan terkecil yang disebut *gampong* (kampung/desa).

Pengertian ulama adalah orang Islam yang berilmu (secara luas dan dalam), beriman dan bertaqwa, beramal saleh, berakhlak mulia,

mendidik-membina dan menarik umat dari yang ragu kepada yakin, dari takabur kepada tawadhum, dari permusuhan kepada persaudaraan, dari ria kepada ikhlas dan dari cinta dunia materi kepada keseimbangan dunia dan akhirat yang selalu *ber"amar makruf"* dan *ber"nahi mungkar"*, sehingga para ulama menjadi "*informal kader*" dalam masyarakat. Berbeda dengan pemimpin formal atau umara, para ulama mendapatkan fungsi atau kedudukan, bukan atas dasar pengangkatan oleh suatu lembaga/pemerintah, tetapi diperoleh dari pengakuan masyarakat pendukungnya. Ulama mempunyai kedudukan sebagai ahli waris para nabi, sehingga mereka dituntut untuk berpegang teguh pada etika keulamaan dan keilmuan. Sejarah telah menunjukkan bahwa pada hakikatnya kebesaran dan martabat yang diperoleh para ulama adalah sesuai dengan komitmen mereka pada etika itu.

Sehubungan dengan besarnya pengaruh para ulama atau tokoh agama ini antara lain dapat dilihat dari serentetan sejarah di Aceh. Cukup banyak literatur yang membicarakan mengenai peranan para ulama dalam masyarakat Aceh tempo dulu. Diantaranya laporan-laporan dari pihak kolonial Belanda yang menceritakan tentang kiprah para ulama Aceh ini. Misalnya karya C. Snouck Hurgronje, yang kemudian dijadikan buku berjudul *De Atjehers* dua jilid. Dari karya ini saja kita dapat melihat bahwa para alim ulama di Aceh cukup berperan dalam melawan Kolonial Belanda dan salah satu penyebab mengapa perang tersebut dapat berlangsung cukup lama, hampir tidak pernah berhenti hingga Belanda angkat kaki dari bumi Aceh untuk selamanya ialah karena peranan para ulama tersebut. Dengan simbol-simbol keagamaan seperti hikayat perang sabil, para ulama Aceh dapat membangkitkan semangat rakyat untuk tetap melawan Belanda yang dianggap sebagai kafir.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika para penguasa kolonial menganggap para ulama ini sebagai tokoh-tokoh agama berbahaya yang selalu memotivasi rakyat untuk tetap melawan serta memusuhi Kolonial Belanda. Dalam perang dengan Belanda tidak pernah diketemukan para ulama yang menyerah meskipun kesultanan Aceh telah mengalami keruntuhan. Kebanyakan diantara mereka syahid atau tertangkap.

Demikian pula pada masa pendudukan Jepang, para tokoh agama ini berani melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat Aceh, seperti kasus di Bayu dan Pandrah (Aceh Utara). Untuk memperkuat solidaritas diantara sesama para tokoh agama ini menjelang kedatangan Jepang di Aceh (1939), di samping juga untuk menggalang persatuan di antara mereka dalam satu wadah, didirikanlah sebuah organisasi yang dinamakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Wadah ini, merupakan suatu organisasi yang bernuansa ke-Acehan dan khas Aceh. Pada saat berita proklamasi kemerdekaan telah diterima di daerah Aceh, para tokoh agama/ulama ini tanpa tedeng aling-aling mereka mendukung negara Indonesia merdeka dan selanjutnya mereka ikut berperan aktif untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan dari rong-rongan kembali pemerintah Kolonial Belanda.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini khususnya bertujuan untuk mengungkapkan peranan para tokoh agama (alim ulama) Aceh dalam periode mempertahankan kemerdekaan 1945--1950. Oleh karena penelitian semacam ini relatif masih jarang dilakukan, sehingga bagaimana peranan dan partisipasi para ulama Aceh dalam periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan jarang diketahui. Dengan demikian kiprah mereka pun dalam karya-karya sejarah nasional Republik Indonesia tidak terlukiskan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan peranan para tokoh agama tersebut akan lebih terungkap dan pada saatnya ikut memperkaya penulisan sejarah/historiografi Indonesia, sehingga berguna bukan saja bagi para sejarawan sendiri, melainkan juga bagi para peneliti berikutnya yang berhasrat untuk menulis tentang masalah ini,

Dari sudut ilmu pengetahuan khususnya ilmu sejarah, penelitian ini bertujuan memperluas pengetahuan tentang masyarakat Aceh dan ikut serta meletakkan dasar bagi penelitian dari sudut ilmu sosial tentang, masalah yang menyangkut kenyataan spritual dengan realita sosial. Di samping itu penelitian ini juga bermaksud untuk mempertinggi ketrampilan dalam penelitian sejarah.

1.3 Ruang Lingkup

Ada dua ruang lingkup utama dalam penelitian ini, yaitu; ruang lingkup spatial dan ruang lingkup temporal. Adapun ruang lingkup spatial, penelitian ini dibatasi hanya wilayah administratif Aceh, atau yang sekarang dinamaken Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Sementara ruang lingkup temporalnya lebih banyak memberi tekanan pada periode masa Revolusi Kemerdekaan (1945--1950). Namun demikian periode-periode sebelumnya juga mendapat perhatian dalam penelitian ini. Tema-tema yang dicoba untuk dibahas dan diungkapkan di sini antara lain mengenai tanggapan/pemikiran para alim ulama di Aceh terhadap perjuangan kemerdekaan dan dalam mempertahankan kemerdekaan.

Selain itu juga menyangkut bagaimana para tokoh agama/ulama Aceh mentransformasikan pemikirannya, serta bagaimana tindakan mereka dalam memotivasi masyarakat untuk ikut berjuang melawan penjajah.

1.4 Pertanggungjawaban Ilmiah

Untuk mempertanggungjawabkan apa yang ditulis ini karya ilmiah maka penelitian menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan metode ini yaitu:

- a. Pengumpulan sumber.
Di sini peneliti mengumpulkan sejumlah sumber yang dapat memberikan informasi tentang topik yang diteliti.
- b. Kritik Sumber.
Sejumlah sumber yang telah terkumpul, baik sumber primer maupun sumber skunder, peneliti mempersoalkannya untuk mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber tersebut. Kritik terhadap sumber ini dilakukan secara interen dan eksteren (kritik interen dan kritik eksteren).
- c. Melakukan interpretasi.
Di sini peneliti melakukan penafsiran-penafsiran terhadap fakta-

fakta yang didapatkan dari sejumlah sumber yang telah dilakukan kritik tersebut.

d. Melakukan penulisan / historiografi.

Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan dengan perangkaian sejumlah fakta yang relevan, sehingga terwujudlah suatu sejarah sebagai cerita yang menyangkut dengan Peranan Tokoh Agama Dalam Perjuangan Kemerdekaan, 1945--1950 di Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Keseluruhan penelitian tentang Peranan Tokoh Agama (Alim Ulama) Dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945--1950 Di Daerah Aceh, terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, pertanggungjawaban ilmiah dan sistematika-penulisan.

Pada bab yang kedua penulis mengupas tentang masalah alim ulama, masyarakat dan pemerintah. Pada bagian ini kajiannya meliputi hubungan alim ulama dengan masyarakat pedesaan dan hubungan alim ulama dengan penguasa pemerintahan/umara.

Aktivitas alim ulama dalam perang Belanda di Aceh sampai pergerakan nasional, penulis masukkan dalam bab yang ke tiga. Dalam bab ini kajiannya meliputi partisipasi alim ulama dalam perang Aceh dan partisipasi alim ulama dalam pergerakan nasional.

Dalam bab yang keempat dikemukakan peranan alim ulama dalam kancah revolusi kemerdekaan. Pembahasannya meliputi respon ulama dan uleebalang sekitar proklamasi serta aktivitas alim ulama dalam revolusi sosial.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini hanya diambil berapa kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian tersebut. Selain itu dikemukakan pula beberapa saran yang bermamfaat baik untuk para alim ulama di masa sekarang maupun pihak-pihak lain yang terkait.

BAB II

ALIM ULAMA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN

2.1 Hubungan Alim Ulama Dengan Masyarakat Pedesaan

Alim ulama dalam masyarakat Aceh sering disebut dengan *teungku*. Gelar *teungku* yang dijuluki kepada seseorang sebenarnya biasa-biasa saja. Sebutan itu sering digelar kepada seseorang, yang telah dan sedang menempuh pendidikan di dayah (pesantren). Sebutan itu tidak memandang berapa lama seseorang belajar di suatu lembaga pendidikan dayah. Namun kalau ditinjau secara ilmiah, ulama yang dimaksud adalah mereka selain memiliki pengetahuan agama yang dalam dan luas juga memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Seorang ulama harus beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia, serta selalu mengajak umat manusia untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan-Nya.¹ Umumnya mereka adalah pimpinan-pimpinan dayah/pesantren di Aceh, walaupun ada pula yang tidak memimpin dayah. Keulamaan seseorang pimpinan dayah itu sering juga digelar dengan sebutan, *Abon*, *Abu*, dan *Teungku Chiek*.

Kepopuleran seseorang ulama bukan saja karena kesalehannya dan berilmu tinggi, akan tetapi karena sanggup memimpin masyarakat. Sosok ulama adalah simbol pemersatu umat. Sebagai pemersatu umat, pada diri ulama itu terpancar sifat kharismatik. Kharisma yang dimiliki oleh seseorang ulama itu menjadi satu kekuatan untuk

menggerakkan dan memotivasi rakyat dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Masyarakat pedesaan atau orang-orang yang tinggal di pedesaan dalam masyarakat Aceh disebut dengan *ureung gampong*, yaitu orang yang mendiami di suatu wilayah yang jauh dengan perkotaan. Kehidupannya cukup bersahaja dan belum terpengaruh dengan berbagai perubahan. Kehidupan mereka terbingkai oleh lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial dan adat istiadat, serta nilai-nilai agama. Dalam bertindak dan bertingkah laku sehari-hari, mereka selalu memperlihatkan corak dan nilai-nilai yang bersumber pada ajaran Islam dalam hampir segenap aspek kehidupan. Penerapan berbagai tingkah laku yang bercorak keislaman ini disebabkan oleh adanya pranata sosial yang umumnya berlaku pada masyarakat Aceh melalui lembaga pendidikan dayah, sehingga menghasilkan ulama-ulama militan sebagai pemimpin pranata sosial dalam masyarakat.

Para ulama dalam mentransferkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat menempuh berbagai cara dan media, antara lain melalui lembaga pendidikan dayah dan berbagai media dakwah lainnya. Hikayat merupakan salah satu media dalam memfualisasikan ajaran-ajaran atau nilai-nilai agama kepada masyarakat. Hikayat yang penuh dengan nilai seni sastra dijadikan sebagai alat yang sangat ampuh oleh ulama dalam mengajarkan syariat Islam. Hikayat ini mengandung petuah-petuah, nasehat-nasehat, dan kisah-kisah kehidupan para nabi/auliya yang dapat menjadi contoh dan tauladan dalam kehidupan umat manusia. Hikayat ini juga mengandung unsur pendidikan dan moral keagamaan.²

Pemilihan hikayat sebagai media oleh para ulama dalam mentransformasikan nilai-nilai agama kepada masyarakat sangatlah tepat. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang pada umumnya masih belum mampu menulis dan membaca tulisan Arab dan Laten. Hikayat ini pada umumnya ditulis oleh para ulama dan dibacakannya dihadapan masyarakat baik pada ruang tertutup maupun ruang terbuka. Masyarakat dengan tekun mendengarkan untaian kalimat per kalimat dengan gaya bahasa yang

khlas, sehingga mampu membangkitkan emosional masyarakat sebagai pendengarnya.

Pembacaan hikayat tidak terlalu terikat dengan waktu, tempat dan teks. Para ulama biasanya membacakan hikayat tanpa melihat teks dan dapat dialunkan dimana saja dan kapan saja. Memang tidak semua ulama mampu mengarang dan menulis hikayat. Akan tetapi pada umumnya mereka mampu menyadur dan membacakannya kepada masyarakat terutama di lingkungan desa dimana para ulama itu berdomisili.

Ulama-ulama yang mahir dalam mengarang hikayat antara lain Teungku Chik Kuta Karang, Teungku Chik Pante Kulu dan Teungku Chik Di Tiro. Alim ulama ini telah berandil besar dalam memvisualisasikan hikayat sebagai media komunikasi keagamaan dengan masyarakat. Mereka telah mampu menggerakkan semangat masyarakat untuk melawan penjajahan Belanda dalam periode perang Belanda di Aceh lewat media hikayat.

Pada masa penjajahan Belanda, hikayat menjadi media untuk membangkitkan semangat juang. Banyak para pemuda setelah mendengar pembacaan hikayat dengan gagah berani mengambil pedang atau rencong pergi ke medan perang untuk melawan kafir Belanda tanpa ragu dan gundah sedikitpun. Para ulama itu membacakan hikayat untuk mendukung perjuangan tersebut di setiap mukim atau kampung.

Hikayat sebagai media hubungan antara alim ulama dengan masyarakat juga dibacakan di menasah-menasah pada waktu malam hari, ketika pemuda hendak tidur. Hikayat-hikayat yang dibacakan di tempat ini pada umumnya mengandung petuah-petuah ataupun pedoman-pedoman dalam mengarungi kehidupan dunia menuju ke alam akhirat yang lebih baik. Petuah-petuah itu didengar dengan baik oleh para pemuda. Hikayat-hikayat yang dibacakan di menasah itu juga mengandung unsur-unsur hiburan (pelipur lara) bagi pemuda, yang berisi nyanyian-nyanyian tidur. Peranan hikayat ini menjadi hiburan para pemuda di zaman dahulu. Akan tetapi pada masa sekarang peranan tersebut telah mulai tergeser oleh berbagai media informasi dan hiburan lainnya yang kini telah menembus pelosok desa

sekalipun. Para pemuda sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dengan media hiburan lainnya seperti televisi, tape recorder dan radio.

Dewasa ini pembacaan hikayat hampir tidak pernah terdengar lagi di desa-desa, bahkan di desa terpencil sekalipun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya media informasi dan alat-alat hiburan lainnya. Selain itu tingkat kesibukan masyarakat dengan berbagai aktivitas dan pekerjaan juga turut memberikan pengaruh untuk tergesernya peranan dan fungsi hikayat dalam kehidupan masyarakat. Walaupun demikian pada waktu-waktu tertentu, hikayat juga masih eksis dalam masyarakat sebagai wahana penyampaian informasi pembangunan.

Ulama dalam masyarakat juga berperan sebagai pemimpin umat dan simbol pemersatu. Sebagai pemimpin informal alim ulama menjadi panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga mendapatkan petunjuk dan petunjuk darinya. Tidak jarang pula masyarakat dalam bermunajat (memohon) sesuatu kepada Allah SWT melalui bimbingan dan perantara para alim ulama.

Posisi ulama di mata masyarakat pedesaan ialah sosok pemimpin yang sangat kharismatik. Kharisma yang dimiliki para ulama telah menjadi alat yang sangat ampuh untuk menghimpun masyarakat dan mengajak umatnya untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar. Hal ini didukung pula oleh kondisi masyarakat pedesaan di Aceh yang sangat patuh dan taat pada pernyataan atau perkataan ulama. Kepatuhan pada alim ulama tersebut bukanlah kepatuhan semu, melainkan kepatuhan yang sungguh-sungguh dan dilandasi oleh loyalitas yang tinggi. Rakyat tidak berani sama sekali melawan perintah atau petunjuk alim ulama, karena dari segi etika moral keilmuan dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat pedesaan di Aceh adalah ingkar terhadap perintah para ambia (nabi). Sebab dalam suatu hadist nabi disebutkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi atau ambia.

Ulama dalam mengemban tugas suci sebagai pewaris para nabi atau ambia harus selalu berkata dan bertindak benar, sesuai dengan kaidah dan ajaran Islam. Oleh karena itu ulama juga berfungsi sebagai

penyampaian risalah atau tuntunan bagi segenap lapisan masyarakat di pedesaan. Dalam menyampaikan risalah inilah ulama pergi ke mana-mana dari desa ke desa untuk berdakwah di tengah-tengah umatnya. Ia selalu berkhotbah untuk mengajak umatnya kepada yang benar dan menjauhi semua larangan Tuhan baik di menasah, mesjid, balai-balai pengajian maupun di dayah-dayah (pesantren).

Sebagai mubaligh para ulama dalam menyampaikan risalah agama pergi ke desa-desa, berkeliling sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Para ulama ini umumnya sangat menguasai retorika berdakwah agar disenangi oleh umatnya. Masyarakat pun sangat antusias mendengarkan isi ceramah yang disampaikan oleh para mubaligh tersebut. Apa lagi kalau isi ceramah itu agak sedikit keras dan dibumbui dengan humor-humor segar. Apa yang disampaikan oleh para mubaligh itu menjadi pegangan dan, tauladan bagi masyarakat. Oleh karena itu sangat sering kita mendengarkan pembicaraan masyarakat saat berkumpul beberapa orang yang mendiskusikan hasil ceramah para teungku atau mubaligh tersebut, baik yang menyangkut persoalan keduniawian maupun masalah ukhrawi (akhirat). Mereka (para anggota, masyarakat) itu dalam setiap pembicaraan selalu merujuk pada isi ceramah para mubaligh tertentu, misalnya menurut teungku pulan saat berceramah di desa anu mengatakan begini atau begitu. Perkataan atau isi ceramah alim ulama tersebut pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Para alim ulama dalam mengayomi masyarakat selalu mempergunakan lembaga-lembaga pengajian baik di dayah maupun di menasah atau surau. Mereka menjadi guru pengajian secara suka rela tanpa mengharapkan gaji atau upah baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk menghidupkan dayah atau lembaga-lembaga pengajian lainnya, para ulama itu memperoleh bantuan dari swadaya masyarakat antara lain dalam bentuk zakat, infak dan sadaqah. Selain itu mereka juga mendapatkan dukungan dari umatnya dalam bentuk tenaga dan moril. Dengan bantuan dan partisipasi dari masyarakat itulah mereka mampu melakukan misi-misi agama secara optimal.

Selain membina lembaga-lembaga pendidikan dayah, sejak masa kesultanan para alim ulama di Aceh juga bergerak dalam usaha-usaha

pembangunan lainnya terutama dalam bidang sosial, pembinaan moral/mental dan pertanian. Ulama yang bergerak dalam bidang pertanian antara lain; Teungku Chik Di Pasi, Teungku Chik Di Bambi, Teungku Chik Di Trueng Campli dan Teungku Chik Di Ribee. Keempat ulama besar ini ahli dalam bidang irigasi dan pertanian. Tali air yang dibangun oleh Teungku Chik Di Pasi yaitu *Lueng Bintang* sepanjang 40 km. Berikutnya adalah Teungku Chik Di Bambi yang membangun irigasi *Lueng Guda Agam*, juga 40 km. Sementara itu Teungku Chik Di Trueng Camli telah pula membangun saluran air sepanjang 45 km dan Teungku Chik Di Ribee membangun *Lueng Ribee* 35 km. Pembangunan tali air tersebut telah menyebabkan areal persawahan yang sangat luas di Pidie mendapat pengairan air yang cukup.³

Para ulama juga ada yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu Tabib (kedokteran) dan karang mengarang seperti Teungku Chik Kuta Karang. Keahlian dalam bidang ilmu kedokteran ini sangat membantu masyarakat pedesaan pada zamannya. Kondisi masyarakat Aceh pada waktu itu yang belum mengenal ilmu medis memang sangat membantu dengan kegiatan ulama yang menguasai ilmu ketabiban (kedokteran). Masyarakat di desa-desa kalau menderita penyakit selalu mendatangi para ulama untuk mendapatkan *peunawa* (penawar). Penawar yang dibuat oleh para teungku atau ulama sangat diyakini oleh masyarakat dan memang dapat, menyembuhkan penyakit.

Peran ulama sebagai tabib dalam masyarakat pedesaan di Aceh masih tetap berlangsung sampai sekarang ini. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama ini tidak hanya yang berhubungan dengan penyakit jasmani (fisik) tetapi juga menyangkut dengan ilmu jiwa (penyakit rohani/mental). Bahkan bila masyarakat mengalami kehilangan sesuatu, mereka langsung menemui teungku-teungku yang ada di desa-desa. Mereka yang mengalami kehilangan itu meminta kepada teungku untuk, mendo'akan atau memohon kepada Allah SWT agar harta yang hilang itu dapat ditemui/didapati kembali.

Pada bagian lain ada pula ulama-ulama seperti Teungku Chik Di Tanoh -Abee dan Teungku Haji Hasan Krueng Kalee yang mempunyai keahlian di bidang ilmu Falaq dan ilmu Hisab. Ilmu Hisab sangat membantu masyarakat dalam menentukan waktu dan jadwal shalat

dan jadwal puasa bulan Ramadhan (imsakiyah). Sementara ilmu Falaq sangat berperan dalam meramal keadaan cuaca, yang sangat penting artinya bagi masyarakat nelayan dan petani. Para nelayan bila hendak melaut selalu memperhatikan keadaan cuaca (bintang), sehingga usahanya membuahkan hasil yang memuaskan. Demikian pula dengan para petani, bila hendak turun ke sawah yang selalu harus sesuai dengan keadaan curah hujan, agar panennya dapat berhasil dengan baik.

Bagi para petani sawah, ilmu Falaq yang dimiliki oleh seorang ulama dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk melihat waktu yang tepat turun ke sawah. Bila waktu turun ke sawah telah tiba, bagi masyarakat tradisional di Aceh selalu dimulai dengan upacara *kenduri blang* (kenduri turun ke sawah) yang dipimpin langsung oleh para ulama. Setelah dilakukan upacara tersebut, maka dilanjutkan dengan kegiatan turun ke sawah perdana yang dimulai oleh teungku/ulama. Maksudnya adalah yang membawa cangkul dan bibit padi pertama ialah teungku di desa tersebut. Kemudian baru dilanjutkan oleh para petani lainnya yang ada di desa tersebut. Begitu lah pengaruh dan kepercayaan masyarakat terhadap para alim ulama dalam berbagai kehidupan pada masa dahulu.

Seorang ulama besar Aceh lainnya, Teungku Muhammad Daud Beureueh mempunyai keahlian tidak hanya dalam bidang ilmu agama, tetapi juga mempunyai kecakapan dalam bidang politik, bangunan, pertanian dan irigasi. Dalam bidang politik ia pernah menjadi Ketua Umum PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo serta Gubernur Kepala Daerah Propinsi Aceh. Dalam bidang pertanian dan irigasi, ia telah berinisiatif membuka kembali irigasi (*lueng*) yang telah tertutup dengan menggerakkan kekuatan masyarakat untuk bergotong royong, dan selesai dilaksanakan dalam waktu 28 hari. Ia juga memprakarsai pembersihan muara sungai di dalam kota Sigli yang telah rusak, dalam waktu yang sangat singkat. Siegel menjelaskan bahwa rakyat yang bekerja setiap harinya berkisar antara 300 hingga 2.000 orang. Masing-masing mereka membawa nasi bungkus (*bu kulah*) dan perbekalan kerja lainnya.⁴

Nilai dan tingkah laku kehidupan masyarakat-pedesaan di Aceh memperlihatkan corak yang Islami dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini tidak terlepas dari peranan para ulama melalui lembaga pendidikan dayah sebagai basis kehidupan para ulama. Peranan ulama hasil godokan dayah tersebut sangat berpengaruh dalam berbagai pranata sosial dalam masyarakat dengan menguasai lembaga meunasah (surau). Bahkan pelopor pembangunan sebuah menasah atau mesjid sering dipercayakan kepada alim ulama. Ulama menjadi penggerak yang berdiri di garis terdepan dengan memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya sebuah mesjid atau menasah. Ulama pula yang memotivasi masyarakat untuk berderma atau bersedekah demi selesainya sebuah menasah atau mesjid. Keikhlasan masyarakat menyumbangkan sebahagian hartanya pada pembangunan mesjid atau menasah, tidak terlepas dari kemampuan para ulama dalam menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya lembaga-lembaga tersebut. Para ulama ini memotivasi masyarakat dengan berbagai cara, yang kesemuanya itu selalu berorientasi pada nilai-nilai pahala yang akan diperoleh oleh masyarakat tersebut.

Selain itu masyarakat pun secara moral menaruh kepercayaan besar pada ulama dalam mengelola pelaksanaan pembangunan rumah ibadah itu tanpa menaruh curiga sedikitpun. Ulama dianggap orang yang paling jujur dan tidak akan memanfaatkan sumbangan dari masyarakat itu untuk kepentingan pribadinya.

Di Aceh, *meunasah* (surau) terdapat di setiap pelosok desa (kampung). Meunasah ini berfungsi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat, baik kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Semua kegiatan ibadah, mendidik anak-anak, mengurus atau merundingkan hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan umat dan berbagai aktivitas lain semua dipusatkan di meunasah. Dari segi bentuk, meunasah dibuat empat segi dan lantainya datar. Dari segi letak, meunasah membujur dari utara ke selatan. Sementara rumah-rumah penduduk juga dibangun dengan mengikuti pola meunasah. Antara rumah dan menasah terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaannya adalah rumah juga berbentuk persegi panjang. Sementara perbedaannya ialah posisi rumah membujur ke arah kiblat,

sedangkan meunasah berdiri melintang dari utara ke selatan. Lantai rumah tinggi dibahagian tengahnya sedangkan meunasah lantainya datar. Posisi letak kedua bangunan tersebut secara pemilikan, yang satu untuk pribadi sedangkan yang satu lagi untuk umum yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Nilai agama yang dimaksud ialah posisi bentuk dan letak seperti itu yang memudahkan orang dalam menentukan arah kiblat di waktu sembahyang (shalat) terutama bagi para tamu yang baru datang ke kampung tersebut. Para tamu setelah melihat rumah dan meunasah langsung dapat melakukan ibadah shalat dengan tepat menghadap kiblat tanpa harus meminta penjelasan pada tuan rumah atau *Teungku Imum Meunasah* (Imam Meunasah). Posisi letak rumah dan meunasah semacam itu dapat menjadi “kompas alamiah” bagi para musafir. Penyimpangan pembuatan konstruksi bangunan rumah atau meunasah dianggap oleh masyarakat melanggar nilai-nilai keagamaan.

Meunasah juga berfungsi sebagai tempat belajar mengaji bagi anak-anak. Sejak umur 4 tahun anak-anak pedesaan di Aceh sudah diajarkan mengaji di rumah-rumah oleh orang tuanya ataupun oleh tetangganya jika orang tuanya tidak sanggup mengajarkannya. Kemudian pada umur 10 tahun, anak-anak itu pada umumnya sudah mulai diajarkan di menasah, yang dipimpin langsung oleh Teungku Imum Meunasah (Imam Menasah). Setelah belajar mengaji anak-anak itu pada umumnya tidur di menasah terutama yang laki-laki. Di sinilah dididik berbagai nilai-nilai kehidupan oleh teungku menasah dan dibantu pula oleh tokoh-tokoh agama di desa tersebut.

Materi pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak usia tersebut pada umumnya berkisar do'a sembahyang, praktek sembahyang, pengetahuan dasar agama dan akhlak. Pada anak-anak tersebut diajarkan bahwa ia dibesarkan dengan kehidupan menasah, sehingga dalam hidupnya mereka merasa datang dari menasah dan kembali ke menasah. Maksudnya ialah di menasahlah mereka dibentuk dalam suasana keagamaan, maka diharapkan anak-anak akan terdidik dan terbiasa dengan pola kehidupan keagamaan. Ketika belajar di menasah anak-anak itu dapat melihat secara langsung praktek-praktek keagamaan seperti sembahyang berjama'ah, pengajian, perayaan hari-hari besar islam, menyelesaikan persengketaan, upacara

peugatih (menikahkan) dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan melihat secara langsung praktek kegiatan keagamaan, maka diharapkan anak-anak tersebut akan memiliki wawasan keagamaan dalam dirinya. Semuanya itu tidak terlepas dari peran para ulama yang ada di desa-desa tersebut.

Keadaan yang digambarkan itu dewasa ini telah mulai terjadi pergeseran akibat perkembangan teknologi dan media komunikasi yang telah menembus berbagai pelosok pedesaan. Menasah tidak lagi berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak pra sekolah dan usia sekolah sekalipun. Masyarakat telah mulai menyerahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah formal (SD) yang memang telah ada di hampir setiap desa pun demikian, kegiatan-kegiatan lain masih tetap dilaksanakan di menasah-menasah.

Sebagai tempat ibadah, menasah berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan shalat, secara berjama'ah. Shalat jama'ah ini diimami langsung oleh Teungku Imum Meunasah atau orang lain yang ditunjuk olehnya. Selesai melaksanakan shalat, biasanya dilanjutkan dengan berdo'a secara bersama-sama dan juga dipimpin langsung oleh imam desa tersebut.

Meunasah juga berfungsi sebagai lembaga musyawarah untuk memikirkan kemaslahatan umat, terutama persoalan pertanian sesuai dengan mata pencaharian masyarakat pada umumnya. Di menasah mereka sering membicarakan tentang jadwal turun ke sawah, mulai dari permulaan mengolah tanah, menanam benih (*bijeh*) sampai persoalan panen dan pada umumnya dilakukan secara bergotong-royong. Dalam setiap musyawarah itu selalu dihadiri oleh pemuka-pemuka desa, seperti *Tuha Peut*, *Zuha Lapan*, *Keujreun Blang* dan sebagainya. Pemuka-pemuka masyarakat itu dewasa ini disebut dengan LMD dan KLMD.⁵

Orang-orang yang diangkat menjadi *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, dan sebagainya itu dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat desa setempat. Kriteria pemilihan yang menjadi prioritas utama bagi pemuka masyarakat tersebut adalah tingkat kedalaman ilmu agama yang dimiliki olehnya. Artinya mereka juga pada umumnya terdiri dari para alim ulama atau tokoh-tokoh agama. Penetapan kriteria tersebut tidak

terlepas corak kehidupan umumnya masyarakat pedesaan di Aceh yang islami. Selain itu dalam setiap aktivitas mereka tidak pernah mengutamakan aspek materi atau bisnis, tetapi selalu dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan yang bermuara pada nilai-nilai agama.

Bila hasil pertanian yang diusahakan itu meningkat dan mencapai nisab, maka setiap petani itu akan membayar zakat. Membayar zakat ini dalam kehidupan masyarakat Aceh adalah untuk mensucikan harta dan mengharapkan keberkatan. Keberkatan rezeki ini menurut alam pikiran dan keyakinan masyarakat pedesaan di Aceh diperoleh setelah membayar zakat dan bersedekah kepada yang hak menerimanya, yang antara lain adalah para fakir miskin. Di samping itu dilaksanakan pula kenduri-kenduri seperti *kenduri panghulee* (maulid Nabi) dan kenduri untuk kegiatan ritual lainnya. Kenduri maulid merupakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Rasulullah, yang bahwa semua rezeki yang didapatkan itu tidak lain karena berkat usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu, menurut pandangan agama yang disampaikan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi/ambiya bahwa barang siapa yang melakukan kenduri untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas, maka akan dapat berjumpa dengan Rasulullah di kemudian hari (di Syurga). Selain itu masyarakat juga sangat yakin bahwa dengan melakukan kenduri itu akan dapat menambah rezeki dan menjauhkan semua mara bahaya (bencana).

Oleh karena itu jika kita amati secara cermat, amat banyak acara kenduri yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Aceh. Bahkan dapat dikatakan bahwa acara kenduri itu mulai dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan sampai kepada kenduri untuk orang yang telah meninggal dunia sekalipun. Semua kegiatan kenduri ini dikoordinir oleh para tokoh agama khususnya *Teungku Imum Meunasah* di tiap-tiap desa. Jadi kenduri ini selain bertujuan untuk melaksanakan syariat agama menurut kepercayaan masyarakat, pedesaan, juga berfungsi sebagai sarana (wadah) dari pola hubungan antara ulama/teungku dengan masyarakat desa di Aceh. Hal ini dapat dilihat, dari berbagai aktivitas yang dilakukan pada saat berlangsungnya acara-acara kenduri tersebut, yang secara

jelas memperlihatkan peranan para ulama sebagai tokoh kunci dalam kegiatan tersebut.

Masih berkaitan dengan fungsi dan peranan meunasah beserta imam desa (alim ulama), selain sebagai tempat/wadah ibadah, lembaga ekonomi dan pertanian juga berfungsi sebagai tempat menyelesaikan berbagai persengketaan yang dialami masyarakat. Setiap sengketa yang terjadi di kampung baik antara sesama keluarga maupun dengan tetangga semuanya diselesaikan secara kekeluargaan di meunasah. Sengketa itu antara lain menyangkut pembagian harta warisan, perkelahian, sengketa tanah diantara warga, pencemaran nama baik seseorang dan sebagainya yang dialami oleh warga desa yang bersangkutan.

Proses perdamaian itu semua berlangsung di meunasah dengan suatu upacara adat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Masalah pembagian harta warisan misalnya, dibahas secara bersama-sama yang dihadiri oleh semua anggota keluarga, *Teungku Imam Meunasah*, *Keuchik* (kepala desa), *Tuha Peut*, *Tuha Lapan* dan tokoh masyarakat lainnya. Untuk memutuskan tentang bagaimana pembagiannya dan berapa besar yang akan diterima oleh setiap orang, semuanya diserahkan kepada ulama. Ulama itu dianggap orang yang, paling jujur dan adil dalam memutuskan sesuatu perkara, terutama yang berhubungan langsung dengan syariat agama Islam. Sementara kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya adalah pemberi penguatan secara administratif. Jadi secara teknis, proses pembagian harta secara hukum berada di tangan ulama.

Kehebatan ulama bukan saja mampu memberikan putusan hukum, akan tetapi juga sanggup menjelaskan fungsi dan makna harta dalam kehidupan di dunia ini. Dengan demikian orang yang bersengketa tidak lagi rakus dalam memandang harta serta tidak serakah lagi dalam mendapatkan harta tersebut. Oleh sebab itu tidak ada diantara mereka yang mempersoalkan kembali putusan hukum ulama mengenai besar kecilnya harta warisan yang diterima oleh setiap orang. Mereka yakin betul bahwa yang diterima itu adalah haknya sesuai dengan ketentuan agama sebagaimana yang diputuskan oleh ulama tersebut.

Begitu pula halnya bila terjadi perkelahian diantara warga desa tersebut. Mereka pada umumnya tidak langsung melapor kepada pihak yang berwajib (polisi). Akan tetapi mereka lebih sering mengadu kepada perangkat desa terutama para alim ulama. Tokoh agama ini mengundang pemuka-pemuka masyarakat lainnya ke menasah untuk diproses dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dan biasanya pada masyarakat tradisional atau pedesaan di Aceh, perkara-perkara semacam itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi. Setelah adanya kesepakatan dari mereka yang bertikai kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upacara. *Peusijuek* (tepung tawar), agar perbuatan yang dapat merugikan kedua belah pihak itu tidak akan terulang kembali.

Banyak lagi persoalan sosial kemasyarakatan yang melibatkan tokoh agama. Diantara persoalan yang belum disebutkan adalah menyangkut dengan acara-acara kematian. Pada satu sisi masalah ini memang menyangkut dengan masalah keagamaan. Akan tetapi yang paling menonjol di sini ialah menyangkut keterlibatan para alim ulama. Setiap adanya orang meninggal, orang paling cepat mengetahui berita duka cita itu setelah keluarga yang bersangkutan adalah Teungku Imam Meunasah. Dialah yang memberitahukan kepada masyarakat luas selanjutnya dengan memukul beduk (*tambo*) tiga kali. Setelah itu baru masyarakat secara berbondong-bondong menuju ke tempat orang meninggal itu. Peran ulama tidak hanya di situ, tetapi berlanjut sampai dengan selesainya acara-acara kenduri di rumah itu. Jadi pola hubungan antara ulama dengan masyarakat desa berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2.2 Hubungan Alim Ulama Dengan Penguasa Pemerintahan

Sudah semenjak masa kerajaan, masa Penjajahan dan hingga masa kemerdekaan, dalam struktur pemerintahan tradisional di Aceh terdapat seperangkat aparat yang melaksanakan tugas pemerintahan secara bersama. Aparat tersebut dapat dijumpai mulai dari unit pemerintahan terkecil, yaitu *gampong* (desa). Aparat yang dimaksud adalah yang sekarang populer dengan sebutan penguasa (*umara*) dan ulama.

Umara dapat diartikan sebagai pemerintah atau pejabat pelaksana pemerintahan dalam suatu unit wilayah kekuasaan. Contohnya seperti Sultan yang merupakan pimpinan atau pejabat tertinggi dalam suatu unit pemerintahan kerajaan. *Uleebalang*, sebagai pimpinan unit pemerintahan *nanggroe* (negeri). *Panglima Sagoe* (Panglima Sagi) yang memerintah unit wilayah pemerintahan sagi : Kepala *Mukim* yang menjadi pimpinan unit pemerintahan *Mukim*⁶ : dan *Keuchik* yang menjadi pimpinan pada unit pemerintahan Gampong (kampung). Kesemua mereka, dalam struktur pemerintahan di Aceh dikenal sebagai pemimpin adat.

Sementara ulama adalah aparat pendamping dan penasihat para Umara atau pemimpin adat dalam melaksanakan pemerintahan, khususnya dalam memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut dengan bidang *hukom* (syariat atau hukum Islam). Dengan kata lain ulama lah yang membantu atau memberi nasehat kepada Sultan, *Panglima Sagoe*, *Oleebalang*, *Keupala Mukim* dan *Keuchik* dalam mengerjakan atau menyelesaikan berbagai hal yang berkenaan dengan masalah keagamaan di wilayah kekuasaannya. Dengan demikian para ulama ini dalam struktur pemerintahan tradisional di Aceh dikenal sebagai pemimpin agama atau tokoh agama.

Selain sebagai penasihat pimpinan pemerintah, ulama juga mempunyai tugas lain yang berkenaan dengan jabatannya itu. Diantara tugas-tugas tersebut misalnya dapat dilihat pada unit pemerintahan *Gampong*, seperti membina atau mengasuh pengajian anak-anak di *meunasah-meunasah*⁷, menyelesaikan sengketa sesama warga *Gampong* bersama *Keuchik* dan *Tuha Peut*,⁸ mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan warga mesyarakat, seperti memandikan jenazah, membuka kuburan, pembacaan do'a di kuburan (talkin), mengurus masalah *Prae* (pembagian harta warisan) di wilayahnya dan sebagainya.⁹

Sesuai dengan tugas tersebut, maka yang menjadi ulama pada sebuah *Gampong* haruslah dijabat oleh seseorang yang taat beribadah dan mengerti/paham tentang masalah-masalah keagamaan. Untuk itu ulama harus seorang berilmu dan taat beragama, yang dalam istilah Aceh disebut *Ureung nyang malem* (orang yang alim). Dengan

demikian tentunya sesuai dengan predikat ulama itu sendiri, yang berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan.¹⁰

Panggilan umum sehari-hari terhadap ulama adalah *Teungku*. Namun tingkatan mereka berbeda, tergantung pada kadar keilmuan atau keulamaan yang dimilikinya. Bila mereka telah sampai pada tingkat “ulama besar”, biasanya dipanggil dengan sebutan *Teungku Chiek* atau *Teungku Syiek*¹¹ Lazim pula dengan menyebut nama tempat ia mengajarkan pendidikan agama (perguruannya), atau tempat ia berdomisili di belakangnya.

Misalnya *Teungku Chiek Di Tiro*, *Teungku Chiek Kuta Karang*, *Teungku Chiek Pante Kulu*, *Teungku Chiek Pante Geulima*, *Teungku Ujong Rimba*, *Teungku Tanoh Abee*, *Teungku Awe Geutah*, *Teungku Krueng Kalee*, *Teungku Indrapuri*, *Teungku Lam Jabat*, *Teungku Beureueh*, dan sebagainya. Selain itu bila para ulama atau *Teungku* itu ada memegang suatu jabatan, maka panggilan untuk mereka biasanya juga diikuti dengan menyebut nama jabatannya itu. misalnya bila ia memegang jabatan *kadli*, baik pada tingkat kerajaan maupun pada tingkat *nanggroe*, maka sebutannya *Teungku Kadli*, dan bila memegang jabatan *Imum* (Imam) atau *khatib* pada setiap mesjid dalam sebuah *mukim*, maka panggilannya *Teungku Imum* atau *Teungku Khatib*. Demikian pula bila mereka sebagai pendamping atau penasihat *Keuchiek* pada sebuah *Gampong* maka-panggilannya disebut *Teungku Meunasah*¹² karena pengertian *Gampong* juga diidentik dengan *Meunasah*.

Pada tingkat unit pemerintahan terkecil di Aceh yang disebut *Gampong*, jabatan *Keuchik* selaku umara (penguasa pemerintahan) dan juga jabatan *Teungku Meunasah* selaku ulama dalam masyarakat diibaratkan dengan perbandingan sebagai berikut, yaitu *Keuchik* sebagai ayah dan *Teungku Meunasah* sebagai ibu¹³. Di samping itu masing-masing aparat ini memiliki batas-batas wewenang serta tugas sendiri-sendiri. *Keuchik* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat (keduniawian) dan *Teungku Meunasah* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan (akhirat).

Perpaduan atau kerjasama yang erat antara kedua jenis aparat ini (ulama dan umara/penguasa) di Aceh tercermin pula dalam sebuah

ungkapan yang sangat populer dalam masyarakat Aceh, yaitu *Adat ngon hukom hanjeut cree lagee zat ngon sifeut*. Artinya adat dengan hukum agama tidak dapat dipisahkan seperti benda/unsur dengan sifatnya. Dalam ungkapan tersebut yang dimaksud dengan *hukom* adalah hukum Islam yang diajarkan oleh para ulama. Dan yang dimaksud dengan adat ialah kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang dikelola oleh pemerintah atau penguasa yang diistilahkan Umara.

Masyarakat Aceh secara keseluruhan telah menjadi penganut agama Islam, dalam kehidupannya sehari-hari sejauh mungkin dicoba untuk diselaraskan dengan tuntunan ajaran Islam. Karenanya sistem budaya etnis yang dimilikinya yaitu adat telah disesuaikan dengan berbagai segi ajaran Islam, sehingga antara keduanya sudah sukar untuk dipisahkan, seperti telah diutarakan dalam ungkapan tersebut di atas. Di sini ajaran Islam sudah merupakan bagian dari pada adat atau telah diadatkan, sehingga sering dikatakan bahwa *adat na due* (adat ada dua) yaitu: 1. *adatullah nyang hana ubah* (ketentuan Allah yang tidak berubah), dan 2. *adat meuhakamah nyang tamong bak hukom*, (adat kebiasaan sehari-hari yang tunduk kepada syariat Islam/hukum Islam).¹⁴ Jadi Syariat dengan adat Islam merupakan suatu yang kembar dan harus dipadukan.

Seorang ulama besar Aceh di abad XIX, Syeih Abbas Ibnu Muhammad yang lebih populer dengan sebutan Teungku Chiek Kuta Karang, dalam karyanya *Tedhirat el-Rakidin* (1889) menyebutkan bahwa: *adat ban adat, hukom ban hukom, adat ngon hukom sama kembar, tatkala mufakat adat ngon hukom, nanggroe senang hana goga*. Artinya adat menurut adat, hukum syariat menurut hukum syariat, adat dengan hukum syariat sama kembar, tatkala mufakat adat dengan hukum syariat, negeri senang tiada hura-hura¹⁵. Dari apa yang dikemukakan oleh Teungku Chiek Kuta Karang di atas, jelas bahwa hubungan antara adat dengan syariat adalah sangat erat. Satu dengan yang lainnya saling terkait dan sulit untuk dipisahkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat Aceh dikenal dua jenis kelompok pemimpin, yaitu kelompok pemimpin adat (Umara) dan kelompok pemimpin agama (Ulama). Adapun mereka yang tergolong dalam kelompok pemimpin adat (penguasa/umara) adalah:

1. Sultan, yang disebut dengan istilah *Poteu* (Tuan kita) atau *Po teu raja*, yang keturunan laki-lakinya diberi gelar dengan *Tuwanku*.
2. Uleebalang¹⁶, mereka merupakan raja-raja kecil beserta dengan kerabatnya yang membantunya. Uleebalang ini pada masa dahulu (di saat Aceh masih sebagai sebuah kerajaan) merupakan bawahan Sultan Aceh, yang untuk pengukuhanannya diberikan sebuah *Sarakata*¹⁷ (besluit) yang dibubuhi segel atau stempel Sultan Aceh yang dikenal dengan nama *Cap Sikureueng* (cap sembilan)¹⁸. Para Uleebalang memerintah unit pemerintahan *nanngroe* secara otokratis yang ditetapkan menurut adat secara turun temurun. Anak laki-lakinya mendapat gelar *Teuku* dan panggilan yang lazim juga untuk mereka *Ampon*. Bila mereka sudah memegang jabatan uleebalang dalam waktu yang cukup lama disebut *Ampon Chiek*. Gelar untuk anak perempuan mereka yaitu *Cut* yang ditempatkan di depan namanya. Dalam menjalankan pemerintahannya Uleebalang dibantu oleh pembantu-pembantunya seperti Kadli, Banta¹⁹ dan Rakan²⁰.
3. Kepala *Mukim* yaitu mengepalai suatu kesatuan wilayah kekuasaan yang merupakan gabungan dari beberapa buah *Gampong* yang berdekatan dan penduduknya melaksanakan sembahyang bersama pada setiap hari Jumat di sebuah mesjid dalam wilayah mukim yang bersangkutan²¹.
4. *Panglima Sagoe*, yaitu sebagai pimpinan *Sagi* yang merupakan federasi dari *mukim-mukim* yang khusus terdapat di Aceh Besar, yang dalam istilah Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Jumlahnya hanya tiga buah, yaitu Sagi XXII Mukim, Sagi XXV Mukim, dan XXVI Mukim²². Ketiga Sagi inilah yang lazim disebut dengan nama *Aceh Lhee Sagoe* (Aceh tiga segi). Gelar untuk Panglima Sagoe ini juga ada yang menyebutnya dengan istilah Uleebalang.
5. *Keuchiek*, atau ada pula yang menyebutnya dengan *Geuchiek* yaitu yang mengepalai sebuah gampong (desa). Selain dibantu oleh *Teungku Maunasah* (Imam Menasah), Keuchiek juga dibantu oleh aparat lainnya, seperti yang disebut *Waki* (Wakil) yang merupakan wakil *Keuchiek* dan kelompok orang tua yang dinamakan *Ureung Tuha*. Menurut adat-..jumlah mereka ada yang empat orang, yang disebut *Tuha Peuet*.²³

Di samping itu ada juga yang delapan orang yang disebut *Tuha Lapan*. Unsur lain dalam suatu *gampong* yaitu yang dinamakan dengan *ureuengle* (orang banyak), yang merupakan anak-anak dari pada ayah kampung (*Keuchiek*) sebagai Umara dan ibu kampung (*Teungku Meunasah*), sebagai Ulama.

Sementara yang tergolong pimpinan agama (kelompok alim ulama) yang mengurus masalah keagamaan yang disebut *Hukom*, adalah:

1. *Kadli*, yaitu orang yang mengurus pengadilan agama atau yang dipandang mengerti mengenai hukum agama di Kerajaan Aceh. Jabatan *Kadli* ini diadakan pertama kali di Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda²⁴ yaitu untuk mengatur pelaksanaan pengadilan agama yang terpisah dengan pengaturan mengenai adat. Menurut tradisi lisan, *Kadli* yang pertama di Kerajaan Aceh bernama *Dja Sandang* atau disebut juga *Dja Bangka*, karena berasal dari *Kawon Dja Sandang*²⁵. *Kadli* di Kerajaan Aceh populer dengan panggilan *Kadli Malikul Adil*. Selain pada tingkat kerajaan, *Kadli* ini juga ada pada tingkat pemerintahan *Nanggroe* yaitu yang membantu Uleebalang dalam bidang *hukom*, dan sebutannya *Kadli Uleebalang*.
2. *Imum Mukim* (Imam Mukim), yaitu yang menjadi penasihat *Kepala Mukim* dalam bidang hukum. *Imum Mukim* inilah yang bertindak sebagai imam sembahyang pada setiap hari Jumat di sebuah mesjid²⁶.
3. *Teungku Meunasah*, meskipun sebagai pembantu *Keuchiek* dalam bidang *hukom* tetapi jabatan ini paling dominan dalam kehidupan masyarakat *gampong*.
4. *Teungku-teungku* pengelola lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti *Dayah* dan *Rangkang* juga termasuk murid-muridnya yang juga dipanggil dengan sebutan *Teungku*.

Dengan semboyan “Serambi Mekkah” Aceh doeloe, tidak saja telah mengisi diktu adat dan Islam seperti zat dengan sifat seumpama “kuku dan daging” di samping *Keuchiek* dengan *Teungku Meunasah* yang tak ubahnya sebagai “ibu dan ayah”, juga dikenal sebagai elite

sekuler dan ulama sebagai elite religius telah menunjukkan suatu hubungan yang akrab dan intim, di samping juga adanya masa-masa suram dan renggang. Contoh yang paling konkrit dapat dilihat pada masa perang Belanda di Aceh. Pada mula terjadinya perang tersebut Ulama dan Uleebalang bersama-sama telah melakukan perlawanan yang mengakibatkan pihak Belanda mengalami kekalahan. Sebagaimana diketahui selama berpuluh-puluh tahun masyarakat Aceh di bawah pimpinan Ulama dan Uleebalang dengan gigih dan heroik mengangkat senjata secara terbuka maupun secara gerilya melawan Belanda.

Namun dalam perkembangannya setelah melakukan berbagai usaha misalnya dengan politik *divide et empera*, pihak Belanda berhasil mematahkan perlawanan rakyat Aceh. Salah satu cara yang dilakukan oleh Belanda yaitu dengan memisahkan atau merenggangkan hubungan antara kelompok Ulama dengan kelompok Uleebalang. Untuk tujuan ini secara khusus Belanda mengirim seorang orientalis terkemuka yaitu C. Snuock Hurgronje. Dengan politik yang dilaksanakan berdasarkan saran C. Snouck Hurgronje ini, sebagian uleebalang dapat dirangkul dan selanjutnya mereka ini dijadikan sebagai aparat-aparat dalam struktur birokrasi Belanda. Mereka dijadikan perantara antara Belanda dengan rakyat. Selanjutnya para uleebalang yang sudah menjadi aparat Belanda, agar mereka menjadi lebih trampil dan tidak lagi dipengaruhi oleh para ulama, maka mereka dididik dengan pendidikan Barat.

Dalam perkembangannya dari mereka yang dididik ini telah muncul suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Beberapa dari kelompok ini pada tanggal 17 Desember 1916 mendirikan suatu organisasi yang diberinama *Atjeh Vereniging* (Serikat Aceh)²⁷. Tujuannya ialah untuk memajukan visi-visi mereka dan juga untuk memperkuat integritas dan solidaritas di antara mereka. Adapun susunan pengurus organisasi ini adalah sebagai berikut ; Teuku Chiek Mohammad Thayeb selaku ketua, Teuku Teungoh wakil ketua, Nyak Cut sekretaris I, Abubakar sekretaris II, Teuku Husein dan Teuku, Chiek Muhammad sebagai bendaharawan, Teuku Djohan Alamsjah dan Teuku Hasan sebagai komisaris.

Selanjutnya para pemimpin agama (ulama), setelah berperang lebih dari empat puluh tahun mereka masih tinggal, pada umumnya sudah tidak mempunyai cukup potensi lagi untuk menghadapi pihak Belanda. Oleh karenanya mereka hanya mengurus lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang mereka miliki, di samping juga ada di antara mereka yang duduk sebagai *Kadli Uleebalang*, serta ada pula yang bertugas yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan di *gampong-gampong* sebagai *Teungku Meunasah*.

Khusus bagi ulama yang mengelola lembaga-lembaga pendidikan seperti *Rangkang* dan *Dayah*, sesuai dengan perkembangan zaman sebagian di antara mereka terpaksa melakukan perubahan-perubahan pada lembaga pendidikan mereka itu. Misalnya dengan merubah dari sistem *Dayah* yang traditional ke sistem madrasah yang modern. Hal ini rupa-rupanya mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama dari tahun-tahun 1930-an, sehingga pertumbuhan lembaga pendidikan madrasah ini menjadi demikian pesat. Menurut buku *Ver slag Pertemoean Oelama-Oelama* pada tahun 1936, di seluruh Aceh terdapat 91 buah madrasah dan yang tidak terdaftar diperkirakan setengah dari padanya.²⁸

Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang baru ini dan juga pengaruh dari ulama-ulama yang bersekolah di luar Aceh (seperti di Sumatera Barat), maka dalam perkembangannya telah melahirkan suatu kelompok ulama baru yang modernis. Dengan demikian telah membuka kesempatan kembali bagi ulama untuk berperan aktif dalam masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat pada masa-masa menjelang kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Sama halnya dengan pendidikan yang dikelola oleh Belanda yang telah melahirkan suatu kelompok baru dengan mendirikan suatu organisasi *Atjeh Vereeniging*, maka para ulama yang modern ini juga dalam rangka memperkuat integritas dan solidaritas sesama mereka, mendirikan suatu organisasi yang diberi nama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Organisasi ini didirikan pada tanggal 5 Mei 1939, dengan susunan pengurusnya sebagai berikut:

Ketua I Teungku Muhammad Daud Beureueh, Ketua II Teungku Abdurrahman Matang Glumpang Dua, Sekreteris I Teungku M. Nur

El Ibrahimy, Sekretaris II Teungku Ismail Yakob, Bendahara T. M. Amin yang kemudian diganti oleh Teungku H. Mustafa Ali, Komisariss Teungku Abdul Wahab Seulimum, Teungku H. Syeh Abdul Hamid, Teungku M. Daud, Teungku Usman Lampoh Awe, Teungku Yahya Raden, Teungku Mahmud, Teungku Usman Aziz dan Teungku Ahmad Daman Huri Takengon²⁹.

Oleh karena organisasi PUSA merupakan organisasi kedaerahan yang khas Aceh dan dipimpin oleh para ulama yang dekat dengan rakyat, maka tidak mengherankan apabila dalam waktu yang relatif singkat organisasi ini sudah meluas ke seluruh daerah dan menjadi milik masyarakat³⁰. Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda, organisasi alim ulama ini juga menunjukkan keaktifannya dalam hubungan untuk mengusir Belanda secara cepat dari Aceh. Misalnya dengan menjalin suatu kerjasama dengan pihak Jepang, meskipun kemudian setelah Jepang berkussa, PUSA menjadi musuh Jepang juga. Peranan organisasi ini selanjutnya semakin menentukan pada masa mempertahankan kemerdekaan (1945--1950). Pemimpin-pemimpin PUSA pada waktu itu menjadi penggerak masyarakat, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat yang paling bawah sekalipun. Salah satu contoh yaitu empat orang ulama terkemuka dengan mengatasnamakan Ulama seluruh Aceh pada waktu itu, mengeluarkan sebuah maklumat yang mengajak rakyat Aceh untuk berperang melawan Belanda kembali bagi kepentingan/keselamatan tanah air, agama dan bangsa. Dalam maklumat tersebut dikatakan bahwa perang terhadap Belanda itu adalah perang sabil, dan merupakan lanjutan dari pada perjuangan Almarhum Teungku Chiek Di Tiro dahulu. Keempat ulama yang mengeluarkan maklumat tersebut ialah: Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, Teungku M. Daud Beureueh, Teungku Haji Jakfar Sidik Lamjabat, dan Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri. Dengan dikeluarkannya maklumat itu, maka seluruh rakyat tanpa ragu-ragu maju ke medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia dari rongrongan Belanda.

Demikianlah gambaran tentang pola hubungan antara alim ulama atau tokoh-tokoh agama dengan penguasa pemerintahan (umara) dalam kehidupan masyarakat sejak masa kerajaan-kerajaan Aceh

sampai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keharmonisan hubungan antara kedua kelompok elite penguasa di Aceh itu tidak hanya berlangsung dalam periode kajian penelitian, bahkan juga berlangsung setelah kemerdekaan hingga sekarang ini. Peranan mereka sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan, dan perlu dibina secara terus menerus demi kelangsungan program pembangunan secara merata.

Catatan

1. Ibrahim Hasan, *Pola Hubungan Ulama-Umara Dalam meningkatkan Persatuan dan Kesatuan yang Berwawasan Kebangsaan*, 1991, hal. 2.
2. Alfian, "Cendikiawan dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh Sebuah Pengamatan -Permulaan", dalam Alfian (ed.), *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. LP3ES, Jakarta, 1977, hal., 200.
3. Baihaqi A K, "Peranan Ulama Dalam Masyarakat Tradisional Aceh" dalam Taufik Abdullah (ed.) *Agama dan Perubahan Sosial*. CV. Rajawali, Jakarta, 1983 hal., 117.
4. *Ibid.*, hal., 118.
5. Adnan Abdullah, *Kebudayaan Suku-Suku Bangsa di Daerah - Aceh*, LPM Unsyiah, Banda Aceh, 1994, hal., 21.
6. K.F.H. Van Langen, "De Inrichting Van Het Atjehsche Stastbestuur Onder het Sultanaat", BKI 37, 1888, hal., 380.
7. *Meunasah dan Meulasah* ialah pusat kegiatan masyarakat *Gampong*, yang juga berfungsi sebagai tempat beribadah, tempat musyawarah, tempat pendidikan keagamaan, tempat anak-anak muda berkumpul dan sebagainya.
8. Dewan Penasehat *Gampong*, yang jumlahnya empat orang. Lihat A.J. Vleer, "De Positie Van Den Toeha Peut Atjehsche Staatbestel". *Kolonial Studien*, 1935, hal., 150.

9. Lihat Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan perubahan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 150
10. *Ibid.*, hal., 3.
11. Pada masa sekarang populer dengan sebutan Abu atau Abu Chiek.
12. Lihat C. Snouck Hurgronje, *De Atiehers I*. E.J. Brill, Leiden, 1993, hal., 87.
13. Lihat J. Jongejans, *Land En Volk Van Atjeh Vroeger Enher*, Hollandia Drukkerrij, Baarn, 1939, hal., 292--293.
14. R.A. Hoesein Djajadiningrat, *Atjehsch Nederlandsch-Woordenboek*, Landsdrukkerij, Batavia, 1934, hal., 8--9.
15. Lihat T. Ibrahim Alfian, *Perang Di Jalan Allah*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981, hal., 36.
16. Secara harfiah artinya Panglima Perang.
17. Lihat G.L. Tichelman, "Ben Atjehsche Sarakata", *Afschrijf Van een besluit Van Sultan Iskandar Muda*, TBG., 73, 1933, hal. 368--373.
18. G.P. Rouffaer, "De Hindoestansche Oorsprong Van Het Negenvouding Sultans Zegel Van Atjeh" *BKI* 59, 1906, hal., 360.
19. Terdiri dari adik laki-laki atau saudaranya.
20. Pemimpin militer *Uleebalang* yang disebut Panglima.
21. K.F.H. Van Langen, *Op. Cit.*, hal., 390.
22. *Ibid.*, hal., 383.
23. A.J. Vleer, *Op.-Cit.*, hal. 420.
24. *Ibid.*, hal., 422. Dalam masyarakat Aceh terdapat empat *Kawom* atau *Suke* (suku) yaitu; 1. *Kawom Lhee Reutoeh* (suku tiga ratus), 2. *Kawom Imeum Peut* (suku imam empat), 3. *Kawom Tok Batee*, dan 4. *Kawom Dja Sandang*.
25. Th. W. Juynbol, "Atjeh", *The Encyclopaeydia of Islam*, Vol.I 1960, hal. 74.

26. Mairl., 3225/20.
27. Verslag. *Pertemoeen Oelama-Oelama Di Sungai Limpah*, Oktober 1936 hal., 2.
28. Mengenai lahirnya organisasa PUSA, lihat misalnya Ismuha, *Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Atjeh 30 Tahun Yang Lalu*, *Sinar Darussalam*, No. 14 dan 15, Djuni dan Djuli 1969, hal., 43--47 dan hal. 33--40.
29. A.J. Piekaar, *Atjeh En De Oorlog Met apan*, 1949, hal 31--32.

BAB III

DARI PERANG ACEH SAMPAI PERGERAKAN NASIONAL

3.1 Partisipasi Alim Ulama Dalam Perang Aceh.

Pada akhir bulan Agustus 1872, sepucuk surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda sampai ke tangan Sultan Mahmud Syah, penguasa Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam surat itu disebutkan bahwa Belanda menginginkan Aceh takluk kepadanya. Akan tetapi Sultan Mahmud Syah menolak keinginan Belanda tersebut. Bersamaan dengan itu ia mengonsolidasikan kekuatan rakyat, dan andalan utama konsolidasi itu ialah kekuatan para ulama.

Memobilisasikan kekuatan ulama ini dianggap sangat penting, karena mereka berada pada posisi dominan dalam masyarakat. Para ulama ini bukan saja dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang saleh yang berilmu tinggi, tetapi juga sekaligus sebagai pemimpin-pemimpin atau panglima-panglima perang. Didalam tubuh mereka terdapat unsur-unsur cendekiawan, pemuka agama, pahlawan, dan bahagian penting dari pusat jaringan kekuasaan yang relatif berhasil memimpin masyarakat secara efektif.¹

Sebagai akibat dari penolakan Sultan Mahmud Syah terhadap tekanan Belanda tersebut, maka pada 18 Februari 1873 Menteri Jajahan Van De Putte atas nama Pemerintah Belanda di Nederland menginstruksikan kepada Gubernur Jenderal Loudon di Batavia agar penyerangan terhadap Aceh dapat segera dimulai. Untuk memenuhi

instruksi itu, Loudon mengadakan sidang khusus Dewan Hindia Belanda dalam rangka pengaturan teknis pelaksanaan penyerangan. Keputusan sidang dibeslitkan oleh Gubernur Jenderal pada 4 Maret 1873. Dalam keputusan itu ditetapkan pula wakil ketua Dewan Hindia Belanda F.N. Nieuwenhujzeun sebagai komisaris pemerintah untuk Aceh dan diharapkan sudah dapat berangkat ke sana 7 Maret 1873. Kapal-kapal yang dipersiapkan untuk mengangkut pasukan dan perbekalan perang adalah Cidatel van Antwerpen, Siak, Goehorn dan Marnix.² Pelaksanaan, penyerangan terlebih dahulu diawali dengan surat menyurat, dan setelah Sultan menolak untuk menyerah baru dilakukan penyerangan (perang).

Serangan Belanda pertama yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler dilakukan pada 5 April 1873 dengan dukungan kekuatan 3200 pasukan (prajurit) dan ditambah 168 perwira.³ Pasukan Belanda mulai mendarat di Pantai Cermin Ulee Lheue. Dengan demikian suatu perang kolonial resmi telah dimulai oleh pihak Belanda. Peperangan yang telah menghabiskan waktu lebih kurang 40 tahun itu menurut Van't Veer tidak ada bandingannya. Dalam hal masa berlangsungnya, perang ini dapat dibandingkan perang 80 tahun di negeri Belanda sendiri. Dalam hal jumlah orang yang tewas (lebih dari seratus ribu jiwa), perang ini merupakan peristiwa militer yang tiada bandingannya. Perang Aceh bagi negeri Belanda bukan sekedar pertikaian (konflik) bersenjata melainkan peristiwa politik nasional, kolonial, dan internasional.⁴ Peperangan itu oleh Belanda diperkenalkan dengan nama "Perang Aceh", sedangkan rakyat Aceh mengenalnya dengan nama "Perang Belanda" (istilah Aceh : *Prang Kaphee Ulanda*).

Sebelum perang dimulai, Belanda telah memperhitungkan bahwa Aceh akan dapat ditaklukkan dalam waktu yang singkat. Ternyata kenyataannya tidak demikian. Ketidaktepatan perhitungan itu disebabkan oleh cara penyelidikan Belanda terhadap kekuatan rakyat Aceh yang tidak menyeluruh. Mereka hanya melihat pada aspek politik dan ekonomi saja yang memang Aceh pada waktu itu telah lemah. Misi Kraijenhoff yang sampai tiga kali datang ke Aceh antara tahun 1817 -- 1872 atas nama misi persehabatan, hanya melihat pada situasi pemerintahan Kerajaan Aceh yang lemah dan perlengkapan militer

yang jauh lebih kurang dibandingkan dengan Belanda. Mereka pada waktu itu tidak mendalami hakekat kehidupan rakyat Aceh dari aspek sosial budaya dan agama yang melandasi aksi perlawanan rakyat.

Akibatnya, agresi pertama Belanda 5 April 1873 itu mengalami kegagalan total. Pasukan Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan laskar rakyat Aceh yang begitu sengit. Dalam pertempuran memperebutkan Mesjid Beiturrahman 14 April 1873, pasukan Aceh dibawah pimpinan Teuku Imam Lueng Bata berhasil menewaskan Pimpinan pasukan Belanda, Jenderal Kohler. Tiga hari kemudian tentara Belanda terpaksa mundur kembali ke pantai, dan pada 29 April 1873 setelah mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda di Batavia, mereka bersama seluruh pasukannya kembali ke pulau Jawa. Dalam agresi pertama itu, kerugian yang dialami oleh pihak Belanda adalah; 37 bawahan dan 8 perwira mati, 405 orang luka-luka (termasuk diantaranya 32 perwira), dan kemudian 30 orang dari padanya juga meninggal. Sedangkan dipihak Aceh diperkirakan telah jatuh korban sebanyak 900 orang yang tewas.⁵

Setelah mengalami kekalahan pada penyerangan pertama, pemerintah Hindia Belanda ingin segera mengirimkan angkatan laut dan daratnya untuk penyerangan yang kedua. Selama mengadakan persiapan untuk penyerangan ini, Belanda melakukan blokade terhadap pantai Aceh untuk mencegah agar Kerajaan Aceh tidak melakukan hubungan dengan negara luar. Menghadapi situasi seperti ini, pihak Aceh pun tidak tinggal diam. Di Penang (Malaya) dibentuk sebuah dewan yang terdiri dari delapan orang untuk mewakili kepentingan-kepentingan Aceh ke luar negeri. Dewan ini bertugas mengusahakan perbekalan perang dengan upaya menembus blokade Belanda serta berusaha mengadakan hubungan dengan tempat-tempat lain di nusantara agar terjadi juga pemberontakan untuk melawan Belanda. Anggota-anggota dewan ini terdiri dari empat orang bangsawan yaitu ; Teuku Ibrahim, Teuku Nyak Rayek, Teuku Haji Panglima Prang Yusuf, dan Teuku Nyak Abu, kemudian dua orang, Arab kelahiran Penang yaitu ; Syeikh Ahmad dan Syaikh Kasim, serta dua orang Keling kelahiran Penang yaitu ; Umar dan Ollah Maidin.⁶

Sementara itu sejak bulan November 1873, pemerintah Hindia Belanda mulai memberangkatkan angkatan laut dan angkatan daratnya

dari Jawa dengan kekuatan dua kali lipat daripada waktu agresi yang pertama. Pasukan yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Van Swieten terdiri dari 60 kapal dengan, 206 pucuk meriam, 22 pucuk mortir, 389 orang perwira dan 7888 serdadu biasa, 32 orang perwira dokter, 3565 orang hukuman laki-laki yang dipaksa untuk berperang dan 246 hukuman perempuan. Di samping menggunakan barisan berkuda (kavaleri) dengan 4 perwira dan 75 orang bawahannya, serdadu Belanda ini juga dilengkapi dengan tentara zeni lengkap dengan perlengkapannya yang canggih ; antara lain rel kereta api, rakit besi dan rakit perahu.⁷ Karena menghadapi perlawanan dengan rakyat Aceh, maka di samping persiapan teknis, dilakukan pula persiapan kultural, yaitu mengikutsertakan tiga orang perwira agama ; seorang Weldpridekter, seorang pastur dan seorang guru agama Islam., H.M. Ilyas dari Semarang. Selain itu ditambah lagi dengan beberapa orang mata-mata dari Jawa yang kemudian bertambah dengan beberapa orang Cina yang biasa berbahasa Aceh dari Penang. Mata-mata ini juga telah melibatkan seorang Keling, seorang Arab, seorang Padang, seorang dari Trumon (Aceh Selatan) dan beberapa meta-meta lainnya. Di Aceh sendiri, telah menunggu seorang kaki tangan Belanda yang ulung bernama Ali Bahanan. Persiapan kultural ini juga dilengkapi dengan dukungan beberapa orang dari Jawa, antara lain seorang Perwira Legiun Mangkunegaran, Pangeran Ariogondosisworo, Perwira Paku Alam, R.M.P. Pakung Perang, Pitmeester (Kapten Barisan Kuda) Bangkalan (Madura), Pangeran P. Adinegoro dan Perwira Barisan Sumenep, R.A. Kromo.⁸

Agresi kedua dilakukan pada 16 November 1873. Selain dari Letnan Jenderal Van Swieten sebagai komandan pasukan, turut pula dua orang jenderal lainnya, yaitu Mayor Jenderal Verspijck dan Mayor Jenderal J.L.J.H Pel. Ditambah lagi dua orang kolonel dan empat orang letnan kolonel, disamping sejumlah mayor dan kapten yang sudah banyak pengalaman dalam pertempuran. Dengan mendaratkan pasukannya di kampung Leu'u (dekat Kuala Gigieng, Aceh Besar), maka pada 9 Desember 1873, dimulailah oleh Belanda agresi keduanya terhadap kerajaan Aceh.

Dalam menghadapi serangan Belanda kedua kalinya itu, laskar Aceh nampaknya lebih bersemangat. Hal ini disebabkan selain oleh

kemenangan yang diperoleh pada masa lalu, juga karena banyak bantuan laskar yang mengalir dari daerah-daerah uleebalang. Dari Uleebalang Maeureudu dan Pidie masing-masing mengirim bantuan kira-kira 500 orang. Demikian pula dari pantai barat, terutama dari Meulaboh yang telah mendatangkan hampir setengah dari penduduknya ke ibu kota. Sedangkan Tuanku Hasyim yang pada saat itu berada di Sumatera Timur kembali lagi ke Banda Aceh (ibu kota kerajaan) dengan membawa pulang 900 pasukan untuk bertempur mempertahankan istana dalam (keraton) dan Mesjid Raya Baiturrahman. Dalam suasana sengitnya pertempuran, Panglima Sagi XII Mukim juga telah mengerahkan pasukan tambahan sebanyak 500 orang pada tanggal 4 Januari 1874.⁹

Pertempuran sengit terjadi di Mesjid Raya Baiturrahman. Mesjid ini berhasil dikuasai oleh Belanda pada 6 Januari 1874 setelah bertempur dengan pejuang selama delapan hari. Dalam pertempuran ini, pasukan Aceh selain dipimpin oleh Tuanku Hasyim, turut didampingi pula oleh Teuku Imum Lueng Bata dan Teuku Nanta Setia. Akibat gempuran pasukan Belanda yang begitu hebat yang didukung oleh peralatan perang yang memadai, maka pejuang Aceh terpaksa mengundurkan diri. Tuanku Hasyim mengatur pertahanan di mesjid raya, memperkuat kubu pertahanan di Peukan Aceh dan Lambhuek serta menyusun pertahanan dalam (keraton).

Berdasarkan catatan pihak Belanda, setelah masjid raya dapat diduduki, masih terdapat 3.000 lagi pejuang Aceh yang berasal dari Mukim XXII untuk mempertahankan garis perang yang dibuat oleh Panglima Polem dengan mengambil pertahanan di Lampu'uk. Dalam (keraton) dijaga oleh lebih kurang 900 orang bersenjata. Raja Pidie datang ke Aceh Besar bersama 500 orang rakyatnya dan membuat kubu pertahanan di Lueng Bata. Sementara itu pada pertengahan Januari 1874, telah datang pula lebih kurang 1000 orang rakyat Peusangan dengan mengambil kedudukan di Kuala Cangkul. Demikian juga Raja Teunom, Teuku Imum Muda dengan mengerahkan sekitar 800 orang rakyatnya ke Kutaraja untuk menghadapi serdadu Belanda.¹⁰

Meskipun persenjataan pihak Belanda sangat lengkap menurut ukuran pada waktu itu, sedang di pihak Aceh dengan persenjataan

yang sangat sederhana, namun berkat semangat jihad fiisabilillah yang dikobarkan oleh para ulama, rakyat terus bertempur melawan kafir Belanda. Mereka rela mengorbankan segala yang dimilikinya, harta dan jiwa sekalipun. Setelah menderita korban yang cukup banyak di kedua belah pihak, maka Sultan Mahmud Syah dan Panglima Polem mengundurkan diri ke Lueng Bata pada 13 Januari 1874. Istana (dalam) masih terus dipertahankan oleh para pejuang Aceh, sedangkan di Lueng Bata terdapat pertahanan dengan kekuatan 1000 orang. Dua orang kerabat Sultan mempertahankan Keutapang dengan dibantu oleh sekitar 500 orang pasukan dari Meureudu. Oleh karena kurang terjalannya kerja sama dan koordinasi diantara para pejuang Aceh, akhirnya istana kerajaan (dalam) dapat dikuasai oleh Belanda pada 24 Januari 1874, setelah terlebih dahulu dikosongkan. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa jatuhnya dalam (istana) kepada tentara Belanda disebabkan oleh pengkhianatan penduduk Meuraksa di tepi pantai, dan juga datangnya musibah penyakit kolera.¹¹ Tidak lama setelah direbutnya istana tersebut, Sultan Mahmud Syah pun mangkat di Pagar Ayer, akibat serangan penyakit kolera dan dimakamkan di Cot Bada.

Jatuhnya keraton (istana) adalah malapetaka yang menyebabkan keadaan menjadi kacau. Oleh karena itu diperlukan pemusatan pikiran dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk meneruskan perjuangan. Salah satu langkah yang diambil ialah diadakan musyawarah yang dihadiri oleh lebih kurang 500 orang pemimpin dan ulama. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Imum Lueng Bata dan Teuku Lamnga. Setelah para ulama memberikan penjelasan dan pendapat menurut hukum Islam, maka rapat memutuskan bahwa untuk mengusir kafir Belanda wajib Perang Sabil. Keputusan itu merupakan sumpah yang diucapkan secara bersama-sama dengan suara yang mengguntur.¹²

Berdasarkan dokumen tulisan tangan dengan huruf Arab Melayu dan memakai cap kerajaan Aceh, yang diperoleh Ismuha dari Said Abidin Lam Oi, disebutkan bahwa pada hari Ahad tanggal 1 Muharram tahun 1290 Hijriah, telah bersumpah tiga orang pemimpin Aceh untuk tidak tunduk dan menyerah pada kekuasaan Belanda. Bila ada diantara seorang dari mereka yang tunduk, maka akan dikutuk (dimurka) oleh

Tuhan Yang Maha Esa sampai kepada anak cucunya. Ketiga pemimpin tersebut adalah ; ulama, Teungku di Meulek Said Abdullah bin Sidi alhabib Saifuddin Teungku Di Ahmed I Jamalullail Ba Alawy Al Husainy, Paduka Banta Muda Tuanku Hasyim, dan Paduka Banta Keuchik Tuanku Mahmud.

Dokumen itu dimulai dengan Muqaddimah dalam bahasa Arab dan dilanjutkan dengan bahasa Melayu yang berbunyi sebagai berikut:

“Syahdan sebermula maka ketahui olehmu hai Thalib, bahwasanya inilah surat amanah pesan washiat hamba faqir Teungku Di Meulek Said Abdullah bin Sidi Alhabib Saifuddin Teungku Di Ahmad Al-Jamalullai Ba`Alawy Al Husainy dan amanah pesan washiat Sri Paduka Bangta Muda Tuanku Hasyim dan Sri Paduka Bangta Keuchik Tuanku Mahmud, yaitu pada tahun hijrah Nabi SAW seribu dua ratus sembilan puluh (sanah 1290 H) pada tanggal 1 hari bulan Muharram pada hari Ahad yaitu pada zaman kerajaan Paduka Sri As-Sultan `Alauddin Mahmud Syah Dhillullahi fil `Alam.

Yang pertama telah ijma' mufakat kami tiga orang nama yang telah tersebut dalam suratimeya ini dengan bersumpah bahwasanya kami tiga orang sekali-kali tidak mau tunduk dibawah kekuasaan Belanda dengan menyerah diri takluk di bawah kekuasaan seteru. Maka barang siapa dalam tiga orang yang ternama tersebut namanya dalam surat istimewa ini tunduk dan ta`luk ke bawah kekuasaan Holands, maka atasnya kutuk Allah sampai pada anak cucunya masing-masing.¹³

Pada sumber yang lain Ismail Yakub dalam tulisannya “Teungku Chik Di Tirol’ disebutkan bahwa adanya suatu perundingan yang dinamakan dengan Perundingan Lamsie, termasuk wilayah XXII Mukim yang dikepalai oleh Panglima Polem sebagai kepala sagi. Perundingan itu diadakan setelah Seulimum jatuh ke tangan Belanda. Perundingan itu dilakukan secara rahasia yang dihadiri oleh uleebelang-uleebalang, para panglima, para ulama dan orang-orang terkemuka dalam daerah XXII Mukim, termasuk di dalamnya Panglima Polem sendiri dan Tengku Chik Abd. Wahab Tanoh Abee.

Dalam perundingan itu telah dibicarakan berbagai macam pendapat mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi kafir Belanda. Ada diantara mereka yang terlalu bersemangat atau menggebu-gebu, dan ada pula yang sangat pesimis terhadap perjuangan. Setelah semua hadirin menyampaikan pendapat dan saran, kemudian mereka meminta nasehat dari Teungku Chik Tanoh Abee. Ia mengatakan bahwa tenaga perjuangan belum seluruhnya hancur. Persoalan yang paling mendasar adalah sudah berkurangnya kesucian batin dan kebenaran hati para pejuang. Panjang lebar ia memberikan pendapat dan nasehat. Pada akhirnya ia menutup dengan kata "Sebelum kita memerangi musuh lahir, perangilah dahulu musuh batin, yaitu hawa nafsu. Harta rakyat yang ada pada masing-masing kita yang telah diambil karena menuruti hawa nafsu, serahkan kembali dengan segera. Janganlah rakyat itu selalu teraniaya. Tegakkanlah keadilan di tengah-tengah kita terlebih dahulu, sebelum keadilan pada orang lain. Dari itu, taubatlah Teuku-Teuku dahulu sebelum mengajak rakyat memerangi kompeni. Kalau tidak juga dikembalikan harta-harta rakyat yang diambil dengan jalan tidak sah, yakinlah rakyat itu akan membelakangi kita dan kita akan tersapu bersih dari Aceh ini melebihi dari yang sudah-sudah. Kalau yang saya minta Teuku-Teuku penuh, maka saya akan bersama-sama ke medan perang. Bila tidak, saya dan murid-murid saya jangan dibawa serta. Dan saya pandang, Teuku-Teuku berperang dengan saudara sendiri."¹⁴ Nasehat dan kata penutup Teungku Chik Di Tanoh Abee itu dikuatkan lagi oleh Teuku Panglima Polem yang menganjurkan secara tegas agar masing-masing uleebalang yang ada padanya harta rakyat, hendaklah dikembalikan dengan segera, baru kemudian secara bersama-sama berjuang melawan musuh Belanda.

Dilakukannya perundingan-perundingan diantara para pemimpin Aceh yaitu para uleebalang, ulama dan para pejuang Aceh lainnya berkaitan erat dengan melemahnya kekuatan rakyat Aceh akibat penetrasi yang dilakukan Belanda secara terus menerus. Agresi Belanda yang kedua telah berhasil direbut istana kerajaan Aceh dan mesjid raya. Rencana Belanda selanjutnya adalah menaklukkan daerah-daerah uleebalang di luar Aceh Besar. Belanda menyadari sepenuhnya akan arti dari pada daerah uleebalang sebagai sumber

kekuatan perlawanan rakyat Aceh. Sejak tahun 1874, Belanda telah bergerak menuju kedaerah-daerah Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Daerah-daerah ini setelah ditaklukkan diharuskan menandatangani pernyataan sederhana yang terdiri dari enam pasal. Kemudian setelah tahun 1876 dikenal dengan istilah "pernyataan panjang" delapan belas pasal yang setelah tahun 1898 dengan sebuah "Korte Verklaring", yaitu masa pemerintahan Van Heutz, karena disadarinya bahwa pernyataan yang telah lalu kurang membawa hasil bagi Belanda.¹⁴ Dalam menghadapi situasi seperti itu, para ulama menggalang persatuan dan membangkitkan semangat jihad melalui penyebaran ideologi perang sabil. Para ulama berusaha menggugah rakyat menjadi lebih dinamis dalam menghadapi musuh. Strategi yang dijalankan ialah dengan menumbuhkan kemauan keras untuk berperang yang berlandaskan pada firman Allah dan sunnah Nabi.¹⁵ Usaha ini juga didukung oleh para uleebalang yang masih setia pada perjuangan mengusir kafir Belanda. Dengan demikian ideologi perang sabil dapat persemayi sebagai motor penggerak dalam peperangan. Oleh karena itu timbullah keberanian yang memungkinkan orang bersedia menempuh penderitaan guna mempertahankan kehormatan agama dan tanah airnya.

Ulama-ulama tersebut mempergunakan pusat-pusat pengajian atau dayah sebagai tempat menggodok para pejuang untuk menghimpun kekuatan menghadapi Belanda. Teungku Chik Di Tiro misalnya telah menginsyafkan orang dengan lisan dan tulisan untuk berjuang mengangkat senjata. Kepada pihak Belanda bahkan disampaikan bahwa bilamana Belanda mau memeluk agama Islam, maka tidak ada masalah bagi mereka untuk memerintah di tanah Aceh. Hal yang sama juga dilakukan oleh Teungku Chik Kuta Karang. Dalam tulisannya yang berjudul "*Tedzkirat Ar-Raqidin*" (nasehat bagi orang-orang yang berdiam diri), ia dengan sangat sengit menyerang para uleebalang yang memilih sultan lemah, karena baru berusia 13 tahun. Para uleebalang menurutnya adalah kelompok-kelompok yang terpecah karena hal-hal yang sepele, tetapi tidak melihat bahaya-bahaya besar yang mengancam mereka. Ia juga mengecam para ulama yang menurutnya hanya sibuk dengan berzikir saja dan melupakan tanggung jawab mereka sebagai pendamping para

penguasa. Karena kelalaian inilah yang menyebabkan para penguasa sesat dan tersesatkan. Masing-masing mereka telah menjalankan tugas dan fungsinya secara tidak benar, sehingga kafir Belanda telah menginjak Aceh.¹⁶

Selain Teungku Chik Di Tiro dan Teungku Chik Kuta Karang, masih banyak lagi para ulama yang ikut berpartisipasi aktif dalam upaya melawan penjajahan Belanda di Aceh. Para ulama tersebut antara lain Teungku Chik Pante Kulu, Teungku Tapa, Teungku Fakinah dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan aktivitas para ulama tersebut dalam tulisan berikut ini :

3.1.1 Teungku Chik Di Tiro.

Pada akhir tahun 1880, dapat dikatakan bahwa daerah yang disebut "Aceh Lhee Sagoe" yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Kotamadya Banda Aceh sekarang, telah jatuh ke tangan Belanda, kecuali daerah pegunungan Seulawah yang dijadikan sebagai tempat persembunyian para pejuang Aceh. Sementara itu di daerah pesisir (di luar Aceh Lhee Sagoe), Belanda menjalankan politik diplomasi, yaitu damai dan berunding. Beberapa uleebalang sudah ada yang bersedia menandatangani "Korte Verklaring" (perjanjian pendek). Isinya merupakan pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda atas daerah itu, sedangkan uleebalang yang bersangkutan diangkat menjadi "Zelfbestuurder" (yang memerintah sendiri), artinya daerah itu tidak langsung diperintah oleh Belanda.

Para pejuang Aceh yang bersembunyi di sekitar gunung Seulawah terus memikirkan jalan keluar dalam menghadapi Belanda yang telah berhasil menguasai Aceh Besar. Untuk itu mereka melakukan pertemuan yang membahas langkah-langkah yang harus diambil berkaitan dengan keadaan menghadapi musuh Belanda pada waktu itu. Pertemuan itu dilaksanakan di gunung Biram dekat Lamtamot, kira-kira 10 km dari Seulimum. Sesudah bertukar pikiran secara panjang lebar, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa perjuangan perlu dilanjutkan. Untuk itu harus diupayakan bantuan dari luar Aceh Besar. Bantuan itu harus diminta melalui para ulama, karena ulamalah yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat pada waktu itu,

terlebih-lebih dalam menghadapi peperangan melawan kafir Belanda yang mempunyai kekuatan besar.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka diutuskanlah beberapa orang ke daerah Pidie untuk menemui para ulama. Utusan gunung Biram itu berangkat melalui bukit Barisan di pinggir gunung Seulawah untuk menghindari dari penglihatan mata-mata musuh Belanda. Setelah tiba di Pidie, utusan itu dengan sangat hati-hati mencari informasi mengenai keberadaan ulama terkemuka. Sesudah beberapa lama mencari, akhirnya mereka mendengar bahwa pusat pimpinan ulama di Pidie adalah di Tiro. Seluruh uleebalang dan ulama di Pidie menaruh hormat kepada ulama Tiro yang sangat terkenal yaitu Tengku Chik Di Tiro. Sebab Tiro pada waktu itu sebagai Pusat pendidikan Islam.

Ulama yang sangat terkemuka sebagaimana yang diharapkan oleh utusan pejuang dari Aceh Besar itu adalah Teungku Chik Di Tiro Muhammad Amin, atau sering juga disebut dengan Teungku Chik Dayah Cut. Ketika Belanda memaklumkan perang kepada Kerajaan - Aceh (1873), ia adalah sebagai pimpinan dayah di Tiro. Teungku Chik Di Tiro ini selalu berseru kepada orang-orang di Pidie agar ikut berp.erang sabil ke Aceh Besar. Oleh karena kedalaman ilmu pengetahuan agamanya, ia mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. Untuk membantu usahanya dalam mengerahkan kekuatan rakyat berperang sabil melawan Belanda, maka ia mengangkat Syeh Muhammad Saman Tiro sebagai tangan kanannya.

Teungku Chik Di Tiro selalu memupuk semangat rakyat untuk berjihad pada jalan Allah, baik melalui khotbah-khotbah maupun tulisan hikayatnya. Melalui pemupukan semangat berperang sabil yang dilakukannya, tidak hanya membangkitkan jiwa patriotisme rakyat Aceh dalam melawan kafir Belanda, tetapi juga telah mengangkat karirnya sebagai seorang ulama yang paling ditakuti oleh Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu instruksi rahasia dari Gubernur Jenderal Belanda pada bulan Maret 1882, yang menyebutkan bahwa akan diberikan hadiah kepada orang-orang Aceh bila sanggup menangkap dan menyerahkan para pejuang dan pemimpin Aceh seperti Teungku Chik Di Tiro dan lain-lain. Siapa saja yang berhasil

menangkapnya dalam keadaan hidup atau mati, maka Belanda akan memberikan hadiah sebanyak 1000 dollar.¹⁷

Ketakutan Belanda terhadap Teungku Chik Di Tiro tidak hanya menyangkut pengaruh pribadinya, tetapi ia telah dapat menembus sistem pertahanan Belanda yang dimulai sejak 1884. Sistem pertahanan konsentrasi yang lebih mementingkan konsolidasi kekuatan di daerah-daerah yang telah dikuasai, ternyata telah dapat dipergunakan oleh para pejuang Aceh secara efektif. Mereka bahkan dengan mudah dapat menyerang pertahanan Belanda yang labil itu. Sementara itu melalui pertahanan model konsentrasi seperti ini telah menyebabkan pihak Aceh dapat memasukkan senjata dari Pulau Pinang. Oleh sebab itu pemerintah Hindia Belanda pada bulan November 1883 dan bulan April 1885 meminta kepada pemerintah Inggris agar menghentikan ekspor senjata kepada pihak Aceh.

Sementara itu, utusan pejuang Aceh yang berasal dari Aceh Besar setelah menjumpai Teungku Chik Di tiro menyampaikan amanah bahwa daerah Aceh Besar telah dikuasai oleh Belanda. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya yang ada di Pidie. Untuk menumbuhkan semangat juang yang tinggi serta menyadarkan kembali sebahagian masyarakat terutama para uleebalang yang telah bersekutu dengan Belanda, maka sangat dibutuhkan seorang ulama kharismatik sebagaimana halnya Teungku Chik Di Tiro.

Menyahuti amanah yang disampaikan oleh utusan Gunung Biram tersebut, maka Teungku Chik Di Tiro mengundang orang-orang terkemuka di sekitar Tiro untuk menghadiri rapat yang sengaja diadakan di Dayah Krueng. Dalam rapat ini utusan Gunung Biram menjelaskan suasana di Aceh pada waktu itu. Kemudian Teungku Chik Di Tiro memberikan komentar seperlunya. Untuk menentukan sikap dan bantuan yang akan diberikan kepada pejuang di Aceh Besar, maka diadakan rapat yang kedua bertempat di Dayah Lampoh Raya. Dalam rapat yang kedua ini diambil beberapa keputusan yaitu :

1. Bantuan ke Aceh Besar harus diberikan secepatnya, sebab bila terlambat maka Belanda akan dengan cepat menyerbu Pidie dan menguasai Aceh lainnya. Dengan demikian mereka akan

mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Aceh Besar yaitu mengungsi dan menyingkir ke gunung-gunung. Kemudian bila pejuang dari Aceh Besar telah tersapu-bersih, maka Belanda akan menuju Pidie, daerah yang berbatasan dengan Aceh Besar. Kalau sudah begitu, maka jangankan mengusir musuh di Aceh Besar, mempertahankan Pidie saja pun sangat sulit.

2. Pemimpin yang akan diutus ke Aceh Besar harus mempunyai sifat-sifat istimewa. Sebab semangat kaum pejuang yang sudah luntur harus sanggup dibangun kembali untuk berjuang dan bergerilya, dan ini membutuhkan seorang tokoh yang handal, jujur, berani dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Untuk memenuhi maksud rapat tersebut, maka terpilihlah Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman sebagai pemimpin pejuang Aceh yang akan membantu perjuangan melawan kafir Belanda bersama pejuang Aceh Besar lainnya. Dia dianggap orang yang mampu memberikan inspirasi motivasi kepada pejuang Aceh dalam menghadapi keberingasan dan keganasan serdadu Belanda.

Untuk memobilisasikan kekuatan rakyat yang sudah terkocar kacir itu, Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman melakukan aktivitas-aktivitas unik. Ia mengadakan kenduri-kenduri sebagai media menghimpun rakyat dan menyebarkan ajarannya mengenai konsep perang sabil serta menyadarkan orang untuk memerangi "kaphe" (kafir) Belanda. Melalui kenduri pula ia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh berbagai informasi dari peserta yang hadir. Selain itu ia juga dapat mempergunakan kesempatan tersebut untuk membagi-bagikan azimat (semacam penangkal peluru) kepada para pengikutnya.¹⁸

Teungku Chik Di Tiro selalu menanamkan kesadaran akan kecintaan tanah air dan kedaulatan Aceh kepada warga masyarakat. Untuk menginsafkan para uleebelang dan keuchik (kepala kampung) yang telah memihak dan mengakui kedaulatan Belanda, Syaikh Muhammad menyurati mereka agar kembali ke jalan perang sabil. Tugas menyampaikan surat tersebut dilaksanakan oleh Habib Lamnyong dan Habib Samalanga dengan dibantu oleh pemimpin-pemimpin agama seperti Tgk. Polem di Njong, Tgk. Awe Geutah

Peusangan, Tgk. Di Blang Bagoh dan pengikut Teungku Chik Di Tiro lainnya. Dalam surat-surat yang disampaikan kepada mereka, ia selalu mendasarkan pendapatnya pada Al Qur'an dan sunnah Nabi.

Surat-surat yang dikirim oleh Teungku Chik Di Tiro dalam mengajak para uleebalang untuk ikut berjuang melawan Belanda juga ditindaklanjuti oleh para pengikutnya. Dua orang mitranya yaitu Habib Lhong dan Tgk. Pante Glima telah mengirim surat kepada T. Cut Mahmud Lamngoh dari Mukim VII Baid dan T. Muhammad dari Mukim IX. T. Cut Mahmud didesak agar menggabungkan diri dengan pihak pejuang muslimin, sedangkan pada T. Muhammad diusulkan agar mengadakan pertemuan dengan Habib Lhong dan Tgk. Pante Glima guna membicarakan cara-cara untuk melepaskannya dari cengkeraman orang-orang kafir.¹⁹

Melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Teungku Chik Di Tiro terutama dengan membakar semangat jihad fiisabilillah, telah banyak merepotkan pemerintah Hindia Belanda. Banyak benteng-benteng dan pasukan Belanda yang diserang secara mendadak oleh pasukan Syeikh Muhammad Saman ini. Ajaran atau konsep perang sabil yang digunakannya ternyata mampu melaksanakan perang gerilya dalam menghadapi pasukan Belanda.

Dalam salah satu laporan Gubernur Belanda Van Teijn, menyebutkan bahwa perlawanan yang sebenarnya di Aceh Besar dilakukan hanya oleh beberapa pemimpin yang mempunyai pengikutnya serta didukung oleh persenjataan lebih kurang 150 orang. Mereka mematuhi semua perintah yang diberikan oleh Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman dan anaknya Teungku Muhammad Amin. Mereka terbagi dalam beberapa pasukan kecil dan muncul di depan lini konsentrasi dengan menembaki benteng-benteng serta kendaraan Belanda. Disamping itu mereka juga menyerang pasukan patroli, menyusup ke dalam lini konsentrasi untuk menjarah, memotong kawat telepon, menghancurkan jembatan-jembatan dan rel kereta api serta berbagai sabotase lainnya.

Pada bagian yang lain Gubernur Van Teijn juga menyebutkan bahwa pengikut Teungku Chik Di Tiro di Aceh Besar semakin berkurang. Mereka yang menggabungkan diri dengannya adalah para

perampok, orang-orang berbahaya, orang yang tidak disukai di kampung mereka, dan orang yang dapat memadukan nafsu merampok dengan perang melawan kafir, bukan karena keyakinan mereka hendak mengusir Belanda dari tanah airnya. Teijn menambahkan pula bahwa para pengikut Teungku Chik Di Tiro itu datang dari Pidie, Gigieng dan Tanah Gayo yang tidak memiliki apa-apa.²⁰ Memang penafsiran ini berdasarkan kaca mata Belanda, dan Teijn tidak dapat memahaminya dari perspektif orang Aceh. Orang-orang Aceh ini mengikuti petunjuk ulama tersebut didasari pada penafsiran bahwa orang-orang yang pergi berperang dapat memperoleh harta rampasan (ghaniman) dan mereka juga mendapat pahala. Oleh karena itu hati siapa yang tidak tergugah untuk mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Walaupun demikian, Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman bukanlah tipe orang beringas yang selalu siap menerkam musuhnya tanpa kompromi dan perikemanusiaan. Dia selain berjuang mengangkat senjata, juga melakukan perjuangan secara diplomasi. Almarhum tidak hanya menulis surat kepada para uleebalang dan pemimpin adat agar tetap ingat pada jalan Allah, tetapi juga mengadakan surat menyurat dengan pihak Belanda agar bersedia memeluk agama Islam. Bila mereka mau masuk Islam, maka tidak ada larangan bagi mereka untuk memerintah di tanah Aceh. Bahkan kalau harapan ini dapat terwujud, ia bersama pengikutnya akan menghentikan perlawanan dan bersedia mengakui pemerintah yang sah, berlandaskan pada agama Islam.

Akan tetapi tawaran Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman ini tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah Hindia Belanda. Belanda hanya bersedia berdamai dengan menghentikan peperangan dan akan memberikan kedudukan (jabatan) yang baik kepada Teungku Chik Di Tiro. Karena bukan kedudukan dan jabatan yang dicarinya, maka usaha kedua belah pihak mengalami jalan buntu. Usaha Teungku Chik Di Tiro untuk menghentikan peperangan dengan taktik membawa Belanda kepada agama Islam tidak berhasil. Demikian juga sebaliknya, Belanda tidak berhasil membawa Teungku Chik Di Tiro berdiam di Kutaraja dan berdamai dengan pihak Belanda.

Perjuangan Teungku Chik Di Tiro memang telah membawa nuansa baru dalam peperangan melawan Belanda di Aceh. Dalam masa 10 tahun lebih ia memimpin peperangan melalui konsep "perang sabilnya", telah dapat merebut kembali sebahagian besar daerah dalam Aceh Besar. Tinggal hanya daerah di sekitar Kutaraja (Kodamadya Banda Aceh sekarang) saja yang belum dapat direbutnya. Belanda akhirnya dengan siasat sangat licik berhasil menewaskannya pada tanggal 25 Januari 1891. Dia meninggal bukan karena Belanda menembaknya di medan perang, melainkan dengan membayar pengkhianat bangsa yang bersedia memberinya racun dalam makanan yang dihadiahkan kepadanya sebagai sumbangan yang diberi nama "khanduri untuk Teungku".²¹

Setelah Teungku Chik Di Tiro meninggal, perjuangannya dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Teungku Chik Muhammad Amin. Ia lebih ahli dalam hal berperang dari pada hukum agama. Ketika Belanda menyerbu benteng pertahanan "Aneuk Galong", ia gugur sebagai kusuma bangsa. Sebagai penggantinya ialah adiknya sendiri yaitu Teungku Di Tungeb atau sering juga disebut dengan Teungku Beb. Perjuangan itu terus berlanjut yang dipimpin oleh beberapa keturunannya dan juga oleh para pahlawan lainnya sampai dengan tahun 1912.

3.1.2 Teungku Chik Pante Kulu

Keberhasilan Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman dalam memimpin peperangan melawan Belanda di Aceh, selain dari keahliannya sendiri juga didukung oleh peranan Hikayat Perang Sabil yang dikarang oleh Teungku Chik Pante Kulu. Nama lengkapnya adalah Teungku Chik Haji Muhammad Pante Kulu. Semenjak kecil ia sudah mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Ia belajar di Dayah Tiro yang pada waktu itu dipimpin oleh Teungku Chik Dayah Cut Muhammad Amin. Sesudah menguasai berbagai bidang ilmu yang diajarkan di dayah tersebut, Teungku Pante Kulu kemudian pergi naik haji untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Setelah tiba di tanah suci, ia juga memperdalam ilmu pengetahuannya di Mekkah.

Selain dari belajar memperdalam ilmu pengetahuan agamanya di Mekkah, Teungku Chik Pante Kulu juga bergaul dengan ahli-ahli

pergerakan yang berkunjung ke kota suci tersebut pada waktu itu. Ketika pecahnya perang Belanda di Aceh, ia masih berada di Mekkah. Sesudah berdiam di sana selama empat tahun, Teungku Chik Pante Kulu kemudian pulang kembali ke Aceh dengan maksud untuk membantu peperangan.

Mengenai keadaan peperangan yang sedang berlangsung di Aceh Besar, Teungku Chik Pante Kulu mengetahui dari bekas gurunya Teungku Chik Muhammad Amin Dayah Cut. Gurunya itu menjelaskan bahwa Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman telah diangkat sebagai panglima perang dan sedang berjuang melawan kafir Belanda di Aceh Besar. Teungku Chik Pante Kulu juga mendapat perintah dari gurunya itu untuk menyusul ke Aceh Besar dan membantu perjuangan bersama Teungku Chik Di Tiro.

Teungku Chik Pante Kulu mempunyai bakat yang besar mengenai sastra, terutama kesusastraan Aceh. Ia tidak hanya pandai dalam mengarang sajak-sajak Aceh, tetapi juga mahir dalam membacanya dengan suara yang merdu dan lagunya yang seronok. Ia telah menyusun sebuah hikayat yang diberi nama Hikayat Perang Sabil.²² Hikayat ini disusun dalam bahasa Aceh bersajak sebagaimana lazimnya karangan-karangan dalam bahasa Aceh lainnya pada waktu itu. Hikayat tersebut berisi anjuran untuk berperang melawan kafir yang ingin menghapuskan agama Allah, yang disebut dengan "Perang Fi Sabilillah". Kalah dan menang serta hidup atau mati dalam peperangan tersebut akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Kalau mati dalam perang itu disebut "syahid" dan akan mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat nantinya. Oleh karena itu orang akan berlomba-lomba untuk berperang melawan kafir dengan suatu harapan akan mendapat jaminan masuk syurga dari Tuhan.

Pengaruh Hikayat Perang Sabil terhadap mentalitas para pejuang sangat besar. Dari segi isinya, hikayat ini dapat dibagi atas dua bagian yaitu; (1) yang berisi anjuran berperang sabil secara umum dengan menunjukkan pahala atau keuntungan serta kebahagiaan, dan (2) yang berisi berita mengenai tokoh atau keadaan peperangan di suatu tempat yang patut disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong semangat orang berjihad. Sedangkan faedah yang akan diterima oleh

orang yang mati dalam perang sabil itu ialah ; diampunkan semua dosanya oleh Allah Ta'ala, mendapat tempat di dalam syurga dengan berbagai kenikmatan, kuburnya akan menjadi luas dan ia akan sentosa di dalamnya, luput dari bahaya kiamat, mendapat pakaian dan permata yang indah di dalam syurga, mendapatkan isteri bidadari satu mahligai berjumlah 72 orang, dan diampunkan oleh Tuhan dosa 70 kerabat dari orang yang mati syahid itu.²³

Oleh karena itu setiap orang Aceh yang mendengar bacaan hikayat tersebut, dengan suka rela mendaftarkan diri menjadi-anggota laskar muslimin untuk mencari mati syahid. Pengaruh itu tidak hanya selama masa peperangan berlangsung, tetapi juga terus sampai perang itu usai. Akibatnya pemerintah Hindia Belanda melarang keras orang membaca menulis, memiliki, mendengar dan menyimpan Hikayat Perang Sabil tersebut. Bila ada yang melanggar larangan tersebut dikenakan hukuman yang berat.

Seorang sastrawan Aceh, Anzib Lamnyong dalam kata pengantarnya waktu menyalin Hikayat Perang Sabil itu ke dalam huruf latin, menulis tentang pengaruh hikayat tersebut sebagai berikut :

“Apabila Belanda mengetahui ada orang yang menyimpan Hikayat Prang Sabil, terus dirampas dan penyimpanannya dihukum, demikian pula terhadap siapa saja yang membacanya.

Penyalin naskah ini pernah mengetahui, ada seorang-orang yang bernama Leem Abah, penduduk kampung Peurada kemukiman Kayee Adang, daerah XXVI Mukim (sekarang kecamatan Ingin Jaya). Pada suatu malam ia mendengar orang membaca Hikayat Prang Sabil. Besoknya tanpa diketahui siapapun, pada pagi-pagi buta ia telah berada di Peukan Aceh di depan Societeit Atjeh Club (Balai Teuku Umar sekarang) dimana dijumpainya seorang-orang Belanda lagi berjalan-jalan, lantas dengan mendadak Leem Abah menghunus rencongnya yang disembunyikan dalam lipatan kain, dan ditikam Belanda itu tepat pada dadanya, hingga jatuh terlejang dan mati terus di situ juga. Sesaat kemudian Leem Abah tersebut terus ditangkap dan akhirnya diinternir ke Pulau Jawa, yang mungkin telah dibunuh, sebab tidak pernah pulang lagi ke Aceh.

Peristiwa ini terjadi dalam tahun 1907, pada waktu pertama kali Belanda menetapkan wajib bayar pajak bagi orang Aceh.²⁴

Selain dari peristiwa tersebut, banyak peristiwa-peristiwa lainnya dengan kejadian serupa sebagai akibat dari pengaruh Hikayat Perang Sabil. Mereka (para pejuang Aceh) secara individu masuk ke kota dan langsung membunuh Belanda yang dijumpainya. Belanda terpaksa mengadakan penjagaan yang ketat, dan siapa saja yang dicurigainya terus ditangkap dan diberikan hukuman.

3.1.3 Teungku Chik Kutakarang

Menurut Snouck Hugronje, Teungku Kutakarang adalah seorang yang giat, pandai, tetapi aneh, sebab ada ajarannya yang berbeda dari yang diajarkan oleh sebahagian besar ulama.²⁵ Nama lengkapnya ialah Syaikh Abbas ibn Muhammad alias Teungku Chik Kutakarang. Salah satu dari ajarannya yang aneh itu ialah bahwa dalam bertempur menghadapi kafir, pasukan Aceh yang sedang berjihad itu harus memakai pakaian sutera dan senjata bertatah emas dan perak supaya orang kafir segan melihat kekayaan orang Islam. Sedangkan menurut Teungku Chik Di Tiro sebaliknya, yaitu melarang orang Islam memakai emas atau sutera, juga bagi mereka yang sedang berjihad di medan sabil.²⁶

Teungku Chik Kutakarang pada saat terjadinya peperangan melawan Belanda di Aceh, bermukim di Mesjid Ulee Susu, tujuh kilometer sebelah selatan Kutaraja. Disamping menjaga makam Teungku Lam Keuneu'eun yang dianggap keramat, ia juga mengajarkan ilmu agama di mesjid tersebut. Setiap kali orang-orang berkumpul untuk mengadakan kenduri di makam itu, ia mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan ajaran-ajarannya mengenai agama dan perang sabil. Teungku Chik Kutakarang juga mengajarkan bahwa barang siapa yang memerangi kafir, maka hendaklah ia berperang dengan mempergunakan alat-alat perang seperti yang dipakai musuh. Ajaran ini nampaknya didasarkan pada pengalaman orang-orang Aceh dalam melawan Belanda, sebab ketika mereka mengalami kekurangan senjata, orang-orang Aceh dalam berbagai kesempatan memang berusaha merampas dan melarikan senjata-senjata Belanda.

Pada tanggal 24 April malam, 1877, pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Kujruan Muda (putra raja Meulaboh) menyerang

serdadu Belanda yang sedang menjaga benteng. Akibat serangan ini beberapa tentara Belanda tewas. Kejadian dengan kasus yang sama juga terjadi pada bulan Maret 1878, ketika Belanda mendirikan pos di Lhong Leumoh, Aceh Besar. Sejumlah 12 orang Aceh di bawah pimpinan Pang Saman, seolah-olah tanpa senjata, dengan membawa barang-barang menuju pos. Ketika telah menghampiri pos itu, mereka dengan tiba-tiba membuang barang-barang yang sedang diusungnya dan menghabiskan serdadu-serdadu itu dengan pedangnya. Dalam peristiwa ini tiga orang tewas, sedangkan, seorang koprал dengan seorang serdadu lainnya luka berat. Para penyerang tadi berhasil menguasai senapan beserta pelurunya dan segera menghilang. Melihat banyaknya terjadi serangan tiba-tiba terhadap pos-pos Belanda dengan merampas dan membawa lari senjata-senjata Belanda, maka Mayor Jenderal K. Van der Heijden menetapkan bahwa orang-orang Aceh tidak dibenarkan mendekati bivak atau benteng tentara Belanda dengan membawa senapan, tombak, pedang, klewang dan berbagai persenjataan lainnya sampai sepuluh langkah dari pos penjagaan. Bila ada yang berani melanggar, maka serdadu Belanda berkewajiban membunuh mereka.

Dalam mengupayakan penyerangan terhadap pos-pos Belanda secara efektif dan berkelanjutan, Teungku Chik Kutakarang juga mengatur masalah logistik kepada para pejuang dengan mengandalkan bantuan rakyat. Menurutnya, dahaga dan lapar dapat ditolong rakyat, karena mereka mempunyai makanan dan minuman yang memadai. Meskipun demikian pasukan muslimin juga melakukan penanaman bahan makanan di berbagai tempat daerah-daerah pedalaman.²⁷

Penyerangan Belanda terhadap Aceh menurut Teungku Chik Kutakarang adalah telah ditakdirkan Tuhan karena rakyat Aceh telah mengubah janji. Mereka tidak melaksanakan suruhan Tuhan. Masuknya kafir ke Aceh pada Hijrah 1289, oleh karena orang-orang Aceh tiada bersyukur akan nikmat Allah dan memasukkan bidah dalam agama Islam, hingga agama Islam tidak sejalan dengan syara'. Bahkan dalam tulisannya yang sangat terkenal "Tadzkiat Ar-Raqidin" (Nasehat bagi orang-orang yang berdiam diri), Teungku Chik Kutakarang menyerang para uleebelang yang hanya sibuk perselisihan-perselisihan yang dapat membawa kepada perpecahan. Demikian juga

halnya ulama, yang menurutnya telah sibuk dengan berzikir saja, dan melupakan tanggung jawab mereka sebagai pendamping para penguasa. Melalui peringatan dan nasehat Teungku Chik Kutakarang inilah, kemudian para ulama dan uleebelang memainkan peranannya kembali sebagaimana mestinya.²⁸

Ia juga mengatakan bahwa apabila seseorang mengerjakan perbuatan yang memberi manfaat kepada kafir, bersahabat dengan kafir dan menolong kafir, seperti memotong rumput pada jalan kafir supaya kafir enak berjalan-jalan, dan menerima uang dari kafir, maka berdasarkan *ijma'* ulama dari empat mazhab, orang itu juga dapat digolongkan sebagai kafir pula. Demikianlah aktivitas dan peranan Teungku Chik Kutakarang selama berlangsungnya peperangan melawan kafir Belanda di Aceh, sampai akhirnya ia meninggalkan dunia pada tahun 1895.

3.1.4 Teungku Fakinah (Ulama Pahlawan Wanita)

Salah seorang tokoh wanita dan juga seorang ulama yang turut berperanan dalam perang Belanda di Aceh ialah Teungku Fakinah. Nama Teungku Fakinah juga sering disingkat dengan Teungku Faki. Tiga buah benteng baru yang didirikan di Lam Krak atas perintah Teungku Chik Di Tiro, satu diantaranya dikerjakan oleh para wanita di bawah pimpinan Teungku Fakinah. Benteng tersebut terletak di Kuta Cot Weue. Teungku Fakinah tidak hanya terlibat dalam pembuatan benteng tersebut, tetapi juga turut menjadi panglima dalam mempertahankan benteng itu dari kepungan tentara Belanda. Sedangkan satu benteng lainnya di Kuta Bak Garut, dikepalai oleh adiknya, yaitu Teungku Amat yang sering juga disebut dengan sebutan Teungku Leupueung.²⁹

Teungku Fakinah lahir pada tahun 1856 di Mukim Lam Krak, daerah XXII Mukim yang dikepalai oleh Panglima Polem. Ayahnya bernama Teungku Asahan (nama aslinya Datu Mahmud), sedangkan ibunya bernama Fathimah, yang sering dipanggil dengan sebutan Cut Mah, puteri seorang ulama besar yaitu Teungku Muhammad Saad, yang lebih dikenal dengan sebutan Teungku Chik Lam Pucok.³⁰

Sejak kecil Teungku Fakinah belajar ilmu pengetahuan agama terutama tentang tulis baca Al-Qur'an dari kedua orang tuanya. Ia

belajar memahami berbagai kitab di dayah Lam Krak sampai berumur 20 tahun, dan sejak itu ia dapat dianggap sebagai seorang gadis yang alim. Pada usia 20 tahun itu Teungku Fakinah dikawinkan dengan seorang ulama muda yang bernama Teungku Ahmad. Kedua suami isteri ini kemudian memimpin pusat pendidikan Islam Dayah Lam Pucok, yang dibangun oleh orang tua Teungku Fakinah. Sejak itu Dayah Lam Pucok selain menerima santri pria, juga menerima santri wanita untuk menerima berbagai ilmu pengetahuan dari Tengku Fakinah, termasuk juga kerajinan tangan.

Ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama ke Aceh pada tahun 1873, suami Teungku Fakinah yaitu Teungku Ahmad bersama pemuda lainnya yang sudah terlatih di Dayah Lam Pucok ditugaskan untuk menghadapi tentara Belanda yang mendarat di Pantai Cermin. Pendaratan tentara Belanda itu disambut dengan perlawanan yang seru, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Di pihak Aceh, pada 8 April 1873 telah menewaskan beberapa orang tokoh pejuang, yaitu wakil komandan pasukan Rama Setia, Imum Lam Krak, dan Teungku Ahmad (suami Teungku Fakinah), serta sejumlah prajurit lainnya.³¹

Setelah syahidnya Teungku Ahmad, maka kedudukannya diganti oleh isterinya Teungku Fakinah, baik sebagai pimpinan Dayah Lam Pucok maupun selaku pimpinan lasykar. Usaha pertama Teungku Fakinah adalah mengadakan kampanye untuk membangkitkan semangat jihad ke seluruh daerah Aceh Besar. Ia mengajak kaum wanita untuk ikut membantu peperangan, dan mengusahakan pengumpulan dana untuk kepentingan perang. Setelah usahanya ini berhasil, kemudian ia membentuk lasykar wanita yang mula-mula hanya terdiri dari janda-janda yang suaminya telah syahid dalam perang sabil. Tetapi setelah itu banyak juga wanita yang masih mempunyai suami menjadi anggota pasukannya.

Pada tanggal 9 Juni 1896, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel J.W. Stempoort dengan jumlah yang besar menyerang benteng-benteng pimpinan Teungku Fakinah di daerah Lam Krak. Serangan itu disambut dengan perlawanan yang gigih selama dua bulan. Setelah menghadapi perlawanan para pejuang Aceh yang

berkepanjangan itu, baru pada bulan Agustus 1896 Belanda dapat menduduki daerah Lam Krak. Teungku Fakinah bersama pasukannya mengundurkan diri ke Kuta Cot Ukam, kemudian ke Gleyeueng dan seterusnya ke Indrapuri. Dalam pertempuran itu syahid pula suami Teungku Fakinah yang kedua, yaitu Teungku Badai.³²

Setelah Aceh Besar jatuh ketangan Belanda, maka Teungku Fakinah bersama pasukannya yang lain hijrah ke Pidie, mula-mula di Tiro, dan kemudian pindah ke Tangse. Di sini ia bersama ulama lainnya mendirikan dayah darurat untuk mendidik putera-peteri Aceh. Tidak lama setelah ia bermukim di Tangse, kemudian Belanda menyerbu ke daerah tersebut, dan pada bulan April 1899 Belanda dapat menguasai daerah itu. Teungku Fakinah bersama pasukannya kemudian mengungsi ke daerah Pase, dan selanjutnya menuju ke daerah Gayo luas untuk melanjutkan perang gerilya.

3.1.5 Teungku Tapa

Menurut Teuku Ibrahim Alfian dalam tulisannya “Perang Di Jalan Allah” menyebutkan bahwa nama asli dari Tengku Tapa adalah Abdullah Pakeh. Ia adalah keturunan Minangkabau, berasal dari kampung Tilatang, Bukit Tinggi. Pada tahun 1885 ia terlibat dalam kerusuhan di Padang Atas, sehingga dikenakan hukuman kerja paksa selama 20 tahun, dan ditempatkan di daerah Aceh. Dalam menjalankan hukuman itu, ia melarikan diri. Karena mempunyai keahlian dalam bidang pengobatan penyakit, ia kemudian diterima oleh Sultan Muhammad Daud Syah. Tengku Tapa mendapatkan tugas dari sultan untuk mengumpulkan dana dalam membiayai perang sabil. Dalam menjalankan fungsinya itu, ia pergi ke Perlak Aceh Timur beberapa kali dalam tahun 1888 dan 1889. Selanjutnya ia pergi ke Tanah Gayo dan menetap di sana. Pada suatu hari dalam perjalanan, ia bertemu dengan saudara isterinya. Melaluinya dititipkan beberapa hadiah untuk isterinya di tanah Gayo. Rupanya amanah Teungku Tapa tidak disampaikan, sehingga timbul percekocokan kedua, dan Teungku Tapa membunuh saudara isterinya tersebut. Setelah itu ia melarikan ke Bulue Blang dan bertapa di sana, sehingga orang memanggilnya dengan Teungku Tapa.³³

Pada tanggal 19 Juni 1898, Teungku Tapa menuju Simpang Ulim Aceh Timur. Ia disambut dengan hormat oleh Panglima Prang Nyak Hakim, raja Julok Kecil. Kehadiran Teungku Tapa mendapat dukungan dari kaum muslimin Simpang Ulim, Julok Kecil, Julok Besar, Idi Cut dan Idi Besar. Jumlah pengikutnya mencapai 10.000 orang, dan 500 orang diantaranya adalah wanita dari Pasai yang tertarik oleh kehadirannya, yang juga mereka sebut dengan "Putri Meureundam Diwi atau juga Malem Diwa". Ia juga mendapat dukungan dari ulama-ulama/Pasai seperti Teungku Bahrin dari Geudong, Teungku Arun dari Matang Ubi, Teungku Muda Tiro dan Teungku Awe Geutah. Teungku Tapa bersama pengikutnya sering melakukan serangan-serangan terhadap tentara Belanda yang ada di Aceh Timur.

Menghadapi gerakan-gerakan seporadis dari Tengku Tapa dan pengikutnya, Controleur dan komandan militer Belanda di Idi mengadakan persiapan-persiapan sambil menunggu bala bantuan dari Kutaraja. Sebagian pengikut Teungku Tapa yang mengadakan penyerangan terhadap tentara Belanda di pasar Idi dapat disapu oleh pasukan Belanda. Sementara itu penduduk yang ada di wilayah timur seperti dari Perlak, Sungai Raya dan Simpang Anas datang ke Idi untuk membantu perjuangan Teungku Tapa.

Bala bantuan Belanda dari Kutaraja tiba di Idi pada 4 Juni 1898, dan mereka langsung menuju ke Teupin Batee tempat pertahanan Teungku Tapa. Setelah tiba di sana, maka terjadilah pertempuran ke dua belah pihak. Barisan Aceh mengalami kekalahan, namun belum dapat ditaklukkan seluruhnya. Akhirnya Belanda mengundurkan diri kembali ke Idi setelah dua opsir dan 15 anggota pasukannya terluka. Pertahanan Belanda yang telah ditinggalkan itu diduduki kembali oleh pengikut Teungku Tapa, sehingga Belanda merasa terdesak untuk menambah pasukannya lagi. Pada hari-hari berikutnya dengan kekuatan yang besar, pasukan Aceh berada di perbukitan dekat Idi. Sementara itu pada tanggal 6 Juli 1898, Belanda memanggil Teuku Chik Perlak dalam rangka penghentian atau melarang penduduk di wilayahnya untuk tidak ikut bersama pasukan Teungku Tapa.

Untuk menghadapi pengikut Teungku Tapa yang semakin banyak itu, gubernur sipil dan militer Belanda Van Heutsz datang ke Idi

bersama bala bantuan tambahan pada 7 Juli 1898. Sementara itu pada 9 Juli, Belanda mendapat serangan dari pasukan Teungku Tapa dari jarak dekat, tetapi dapat dihentikannya. Dua hari kemudian Belanda dapat mengusir pejuang Aceh yang ada di kubu-kubu pertahanan sekitar Idi. Keberhasilan mengusir para pejuang Aceh ini dicapai setelah Belanda terlebih dahulu harus menghadapi pertempuran sengit di dekat kediaman Keuchik Saat (peutua di Seuneubok Aceh), tempat Teungku Tapa berada. Dalam pertempuran tersebut, pihak Aceh meninggalkan 80 mayat, sedangkan di pihak Belanda 3 mati dan 21 luka-luka.

Sementara itu Teuku Muda Yusuf dari Simpang Ulim bersama 200 orang pengikutnya lengkap dengan senjata muncul di pedalaman Idi menuju ke Perlak. Mereka melakukan pertemuan dengan Teuku Chik Perlak dan Teuku Bintara Pekan dari Julok yang secara nyata mendukung perjuangan yang sedang dilakukan oleh Teungku Tapa. Akan tetapi usul ini ditolak oleh Teuku Chik Perlak, dan akibatnya Teuku Yusuf mengundurkan diri dan kembali ke Simpang Ulim melalui daerah pedalaman.

Selanjutnya pada 16 Juli 1898, pasukan Belanda kembali mengadakan kontak senjata dengan pihak Aceh. Ketika terdengar berita bahwa pasukan Belanda telah menduduki Bagok, Teungku Tapa dengan seluruh pasukannya mengundurkan diri, dan akhirnya kembali ke daerah Gayo. Di tempat ini Teungku Tapa bersama pengikutnya melancarkan kembali perang sabil dengan bergerilya untuk melawan kafir Belanda. Untuk menghimpun kembali kekuatannya, ia terlebih dahulu mengadakan kenduri di Paya Terbang (sebelah kanan sungai Pase), dan kemudian di tempat keramat Kuala Piada. Teungku Tapa bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin adat yang memusuhi Belanda, dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan di Matang Ubi, Paya Bungkok, Metang Kuli, Paya Bakong dan di Geudong.³³ Kemudian pada pertengahan tahun 1900, ia bersama pasukannya kembali lagi ke Piada untuk ketiga kalinya. Dalam petualangannya untuk melanjutkan perang sabil ini, ia tidak banyak lagi mendapat pengikutnya. Kemudian dalam suatu pertempuran dengan tentara Belanda, Teungku Tapa bersama semua pengiringnya dapat ditewaskan oleh pasukan Belanda di dekat Piada, Pasai Aceh Utara.

Setelah meninggalnya Teungku Tapa, perjuangannya dilanjutkan lagi oleh para ulama lainnya, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, sampai dengan periode masa pergerakan nasional.

3.2 Partisipasi Alim Ulama Dalam Pergerakan Nasional

Dalam periode awal abad ke-20, Aceh selain masih berperang melawan penjajahan Belanda, juga telah mulai berkenalan dengan unsur-unsur kebudayaan Barat, yaitu pendidikan modern yang mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pada awal tahun 1900 perlawanan terhadap Belanda masih terus berlangsung, antara lain dipimpin oleh Sultan Muhammad Daud Syah, Teuku Panglima Polem Raja Daud, Teungku Di Mata le, Teungku Di Barat (Pasai Aceh Utara), Tengku Cot Plieng, Teungku Alue Keutapang, Teungku Di Reube, Tengku Di Beureueh, Teungku Di Lam Gut (Pidie), Teuku Ben Peukan Meureudu, Teungku Di Krueng Sinagen, Teuku Ben Blang Pidie, Habib Meulaboh, dan teungku-teungku dari Tiro seperti Teungku Chik Mayet dan Teungku Di Buket.³⁴

Walaupun Sultan Aceh Muhammad Daud Syah terpaksa menyerah bulan Januari 1903, namun peperangan melawan kafir Belanda masih terus berlangsung. Teungku Cot Plieng beserta pengikutnya melakukan penyerangan secara terus menerus terhadap Belanda. Demikian pula halnya di Aceh Utara, perang sabil terus berlanjut yang dipimpin oleh Teungku Di Barat dan Teungku Di Mata le bersama-sama dengan pemimpin adat lainnya Teungku Chik Di Tunong, Pang Nanggroe dan Cut Meutia.³⁵ Hal yang sama juga terjadi di Gayo Alas. Untuk menundukkan daerah tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengiriskan Letnan Kolonel Van Dealen untuk mengadakan hubungan politik dengan raja-raja di sana. Di daerah Gayo Van Daalen mendapat perlawanan yang sengit. Rakyat Gayo baik laki-laki maupun perempuan, bahkan anak-anak sekalipun dengan gagah berani mempertahankan setiap jengkal tanah pusaka mereka dari gempuran serdadu Belanda. Van Daalen telah melaksanakan tugasnya dengan sangat kejam dan biadab. Ia tidak segan-segan membantai lawan-lawannya dalam setiap pertempuran. Hal ini dapat

dilihat dari korban pembantaianya yang dilakukan pada pertempuran di desa Kuto Reh, Likat dan Kuto Lengat (tanah Geyo). Dalam pertempuran ini Van Dealen telah membunuh secara massal pejuang Aceh yang tidak hanya laki-laki, tetapi juga kaum wanita dan anak-anak yang tidak berdosa.

Dalam periode ini banyak para ulama dan pejuang yang syahid. Para ulama terkemuka itu antara lain adalah Teungku Di Alue Keutapang, Teungku Kadli, Teungku Di Cot Cicem, Tengku Lemana dan para ulama lainnya. Korban keganasan Belanda juga dialami oleh Sultan Aceh Muhammad Daud Syah. Ia dianggap telah melanggar janji kesetiiaannya kepada Belanda, karena turut membantu para ulama dalam melakukan perang sabil. Akibatnya pada bulan Desember 1907 Sultan Muhammad Daud Syah dibuang oleh Belanda ke Ambon.

Belanda memperkirakan bahwa dengan dibuangnya sultan perlawanan para ulama dan pejuang lainnya secara berangsur-angsur akan aman dan takluk kepada Belanda. Namun perkiraan ini meleset, bahkan rakyat Aceh masih melancarkan penyerangan secara sistematis seperti yang terjadi di Lhok Seumawe, Lhok Sukon, Idi dan Tapaktuan. Menghadapi situasi seperti ini, gubernur militer Belanda Letnan Kolonel H.N.A. Swart sejak ditugaskannya di Aceh 10 Juni 1908, melakukan pengejaran secara besar-besaran terhadap para ulama yang memimpin peperangan. Pada bulan September 1909 syahid Teungku Di Buket dan Teungku Chik Mayet, keduanya adalah putera Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman. Beberapa kekalahan lainnya di pihak Aceh adalah ; menyerahnya Teuku Banta dengan 106 pengikutnya (Juli 1908). Teuku Ben Blang Pidie dengan 160 pengikutnya (Juli 1908). Kecuali itu, setahun kemudian banyak juga para alim ulama yang gugur, antara lain; Teungku Di Kunat (Novembar 1909), Teungku Di Reubee (Desember 1909), Habib Ahmad (Mei 1910). Teungku-Saleh, Teungku Kalipah, Teungku Ma'at (Maret 1911), dan Teungku Di Barat (Februari 1912). Selain itu karena tekanan-tekanan yang dilakukan Belanda, menyerah pula Teungku Lemana dari keluarga ulama Tiro (September 1910), Teungku Di Pidie di Aceh Barat. Keujruen Pameue (Maret 1911), Habib Musa dan Teungku Mat Aceh (1913)

Walaupun Belanda melakukan tekanan secara terus menerus terhadap para ulama dan pejuang Aceh, namun perlawanan terhadap kolonialisme Belanda tidak pernah berakhir secara total. Pada tahun 1925, di Aceh Selatan muncul perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Cut Ali, yang oleh Belanda dianggap sebagai seorang pemimpin yang berinisiatif dan mempunyai otak yang tajam.³⁷ Dari laporan Belanda juga disebutkan bahwa pada tahun 1926, Teuku Raja Tampol dan Pang Karim masih merupakan bahaya besar terhadap ketentraman dan ketertiban pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 1928 muncul pula gerakan Teungku Amin di Tapaktuan, pemberontakan Bidin Keubay di Lhol Pawoh Utara, dan serangan Khadem Ambong di kenegerian Manggeng Aceh Selatan. Selanjutnya pada tahun 1933 muncul pula perlawanan rakyat di Lhong Aceh Besar. Kasus yang sama juga terjadi di Leupueng pada tahun 1937. Jadi dapat dikatakan bahwa perlawanan yang dilancarkan oleh para alim ulama dan pejuang Aceh lainnya terhadap Belanda terus berlanjut sampai dengan berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan Aceh khususnya pada tahun 1942. Walaupun dilakukan dalam jumlah dan kelompok kecil, namun tetap merepotkan pemerintah Belanda.

Pada akhir periode zaman pergerakan nasional, aktivitas alim ulama di Aceh masih mewarnai kehidupan politik dan sosial budaya di Aceh. Dalam masa ini aktivitas para ulama lebih terarah pada bidang pendidikan. Para alim ulama membentuk sebuah organisasi modern dengan nama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Organisasi ini lahir setelah para alim ulama dari seluruh Aceh melakukan musyawarah di Matang Glumpang Dua (Aceh Utara), yang diprakarsai oleh seorang ulama terkemuka Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap pada 5 Mei 1939, atau bertepatan dengan hari perayaan Maulid Nabi 12 Rabbil'ul Awal 1358 Hijriah.

Adapun tujuan didirikannya organisasi PUSA ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syi'ar Islam yang suci, terutama di tanah Aceh yang pernah digelar dengan "Serambi Mekah" pada masa yang lalu. Namun dalam perkembangannya daerah Aceh telah berubah menjadi suatu

negeri yang amat ketinggalan dari tetangga-tetangganya yang berdekatan, apa lagi yang kejauhan.

2. Untuk berusaha mempersatukan paham ulama-ulama di Aceh dalam berbagai persoalan, terutama yang menyangkut dengan hukum syariat, karena berdasarkan pengalaman masa yang lampau membuktikan bahwa akibat terjadi perbedaan paham para ulama telah menyebabkan terjadinya pertentangan diantara para ulama yang membawa kepada perpecahan.
3. Berusaha untuk memperbaiki dan mempersatukan rencana pelajaran sekolah-sekolah agama di seluruh tanah Aceh.³⁸

Setelah berhasil disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka dilakukan pemilihan ketua beserta pengurus harian PUSA. Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

- Ketua I : Teungku M. Daud Beureueh.
- Ketua II : Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap.
- Setia Usaha I : Teungku M. Nur el Ibrahimy.
- Setia Usaha II : Teungku Ismail Yakob.
- Bendahara : T.M. Amin.
- Komisaris :
 - Teungku Abdul Wahab Seulimum.
 - Teungku Syekh Abd. Hamid Samalanga.
 - Teungku Usman Lampoh Awe.
 - Teungku Yahya Baden Peudada.
 - Teungku Mahmud Simpang Ulim.
 - Teungku Ahmad Demanhuri Takengon.
 - Teungku M. Daud.
 - Teungku Usman Aziz Lhok Sukon.³⁹

Dilihat dari sejarah politik, PUSA telah memberikan kepada Aceh suatu organisasi modern yang "otentik" dan bersifat keacehan. PUSA yang didirikan dan dibina oleh para ulama Aceh telah mengembangkan idiom-idiom politik yang memang telah bersemi di hati sanubari rakyat Aceh. Menurut seorang pengamat asing menilai bahwa PUSA bahkan telah memberikan kepada Aceh yang telah dilanda kemelut kekalahan dalam perang Belanda, suatu saluran bagi tekanan-tekanan struktural dari masyarakat sendiri.⁴⁰

Gerakan dari PUSA ini lebih kentara lagi terlihat dalam kehidupan politik di Aceh pada periode kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Para ulama yang tergabung dalam organisasi ini bahkan dapat menguasai dan mengendalikan kehidupan politik di Aceh pada masa itu. Banyak diantara mereka yang ikut terlibat dalam pemerintahan daerah dengan berbagai jabatan yang diembannya, yang secara rinci akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

Catatan

1. Alfian, "Cendikiawan dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh" dalam Alfian (ad.), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. LP3ES, Jakarta, 1977, hal., 204.
2. Muhammad Ibrahim. *et. al.*, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Depdikbud, Banda Aceh, 1977/1978, hal., 99.
3. *Ibid.*
4. Paul Van't Veer, *Perang Aceh*. PT. Grafiti Pers, Jakarta, 1985 hal., 1.
5. Muhammad Ibrahim. *et. al.*, *op. cit.*, hal., 101.
6. Ibrahim Alfian. *Perang Di Jalan Allah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987 hal.67
7. Fachry Ali, "Pasang Surut Peranan Politik Ulama *Prisma*". LP3ES, Jakarta, 1984, hal., 19.
8. Ismuha, "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah". dalam Taufik' Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1983, hal. 38--39.
9. Muhammad Ibrahim, *et. al.*, *loc. cit.*
10. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, hal., 67--68.
11. *Ibid.*

12. Mohammad Said. *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I. PT. Harian Waspada Medan, 1961, hal. 437
13. Ismuha. *Op. cit.*, hal. 41--42.
14. Muhammad Ibrahim, et. al., *op. cit.*, hal, 103.
15. Ibrahim Alfian, *op. cit.* hal., 151.
16. Taufik Abdullah., *Islam dan Masyarakat*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal., 171.
17. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, hal., 152.
18. *ibid.*, hal., 153.
19. *ibid.*, hal., 156.
20. *Ibid.*, hal, 157.
21. Ismuha, *op. cit.*, hal., 47.
22. *Ibid.*, hal., 48.
23. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, hal., 111.
24. Ismuha, *op. cit.*, hal., 50.
25. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, hal., 161.
26. *Ibid.*, hal, 162.
27. *Ibid.*, hal, 163.
28. Taufik Abdullah, *op. cit.*, hal., 174.
29. Ismuha, *op. cit.*, hal., 51.
30. Muhammad Ibrahim, et. al., *op. cit.*, hal, 116.
31. H.M. Zainuddin, *Srikandi Atjeh*, Pustaka Iskandar Muda., Medan, 1996, hal. 70.
32. Ismuha, *op. cit.*, hal., 53.
33. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, hal., 167.
34. Muhammad Ibrahim, et, al.,, *op. cit.*,, hal, 129.

35. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid II, PT. Harian Waspada, Medan, 1985, hal., 263.
36. Muhammad Ibrahim, et. al., *op. cit.*, hal, 131.
37. *Ibid.*
38. Ismuha, *op. cit.*, hal., 59.
39. *Ibid.* hal., 60
40. Taufik Abdullah, *op. cit.*, hal., 177.

BAB IV

DALAM KANCAH REVOLUSI KEMERDEKAAN

4.1 Sekitar Proklamasi : Respon Ulama dan Uleebalang

Pemberitaan mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu dan dan khabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh masyarakat Aceh diterima agak terlambat. Berita menyerah kalahnya-Jepang, baru pada tanggal 23 Agustus resmi diketahui rakyat, karena pada tanggal tersebut Atjeh Syu Tyokon (residen Aceh) memanggil para pemimpin rakyat setempat ke kediamannya (Pendopo Gubernur sekarang). Dalam pertemuan itu S. Lino secara resmi menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan situasi daerah Aceh, dan posisi Jepang pada waktu itu. Ia menegaskan bahwa perang telah selesai dan kepada pemimpin rakyat dianjurkan untuk bersama dengan pemerintah Jepang menjaga keamanan di daerah Aceh.¹

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pada tanggal 25 Agustus Tyokon S. Lino mengeluarkan sebuah maklumat yang ditujukan kepada seluruh rakyat Aceh, yang menyatakan bahwa peperangan Asia Timur Raya telah berakhir dan kemaharajaan Dai Nippon telah bersedia melangsungkan perdamaian dengan sekutu.² Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus pesawat tempur sekutu menjatuhkan surat selebaran di kota Kutaraja dan di kota-kota lain di seluruh Aceh. Surat selebaran itu ditujukan kepada penduduk Indonesia, dengan menyatakan bahwa perang sudah-selesai. Jepang telah mengaku

tunduk tidak dengan perjanjian, dan ditutup dengan hiduplah Seri Ratu!. Hiduplah Indonesia.³

Berdasarkan kata-kata penutupan surat selebaran itu, menyatakan identitas Raja Belanda secara nyata. Sejak waktu itu rakyat Aceh berpendapat bahwa yang akan datang atas nama sekutu adalah Belanda. Oleh karena itu golongan yang terang-terangan melawan Belanda waktu Jepang akan datang pada tahun 1942 merasa gelisah, seperti mereka yang langsung berkenaan dengan pembunuhan Asisten Residen di Sigli, Controleur di Seulimum, dan Kepala Exploitasi A.S.S. (*Atjeh Staats Spoorwagen*) di Banda Aceh. Sedangkan golongan yang tersisih dengan pendudukan Jepang, pada waktu itu merasa gembira dan mengadakan persiapan seperlunya untuk menyambut-kedatangan Belanda kembali.

Berkenaan dengan situasi itu, T.M.A. Panglima Polem menjelaskan sebagai berikut :

Pada tanggal 23 Agustus 1945 kami dipanggil Tyokan diantaranya saya, T. Nyak Arief, Tgk. Moh. Daud Beureueh & yang lain-lain. Tyokan menerangkan bahwa Jepang sudah berdamai dengan sekutu, lantaran dijatuhkan boom atoom. Akhirnya kami mengetahui mereka sudah menyerah kalah. Setelah tersebar luas tentang kekalahan Jepang, maka keadaan menjadi panas dingin. Kalau selama ini kami sudah panik, maka sekarang lebih panik lagi, terutama oknum-oknum yang sudah turut memberontak melawan Belanda, apalagi pemimpin-pemimpinnya, diantaranya saya dan T. Nyak Arief. Betapa tidak jika kami hendak gerilya, maka kami tidak mempunyai senjata lagi. Disamping itu ada pula yang menjadi senang mengharap kembali induk semangnya.⁴

Keadaan itu tidak berlangsung lama karena para pemuda (Ghazali Yunus dan kawan-kawan) yang bekerja pada kantor berita Jepang, *Domei*, mereka secara rahasia berhasil mendengar berita proklamasi. Selanjutnya mereka memberitahukan kepada para pemuda Indonesia yang bekerja pada Hodoka (kantor berita penerangan Jepang), dan Harian Atjeh Sinbun. Sehingga berita proklamasi itu berkembang cepat dikalangan instansi pemerintahan. Teuku Nyak Arief juga menerima kawat pemberitahuan tentang proklamasi kemerdekaan dari Dr. A.K. Gani di Palembang, serta Muhammad Syafei dan Adinegoro di Bukit Tinggi, masing-masing

tanggal 24 dan 26 Agustus 1945. Setelah itu tiba berita resmi dari wakil Pemerintah Pusat, kemudian diangkat menjadi Gubernur Sumatera Utara, Mr. Mohd. Hasan.⁵

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, disambut dengan penuh kegembiraan oleh seluruh rakyat Aceh, sehingga mewujudkan keadaan yang sangat baik pada waktu itu. Kegentingan hilang dengan segera, sedangkan persatuan diantara rakyat dari setiap golongan dan lapisan masyarakat bertambah kuat. Rakyat bersatu padu dalam usaha memenuhi isi dan tujuan proklamasi kemerdekaan.⁶

Para ulama sebagai salah satu golongan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan rakyat Aceh, melihat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak disenangi baik oleh Jepang maupun Belanda. Mereka secara terang-terangan ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya dengan kekuatan senjata. Oleh karena itu pada 15 Oktober 1945, ulama Aceh mengeluarkan maklumat bersama, yang berbunyi sebagai berikut :

Perang dunia yang maha dahsyat telah tamat. Dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta telah berdiri Republik Indonesia di bawah pimpinan dari paduka yang mulia Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Belanda adalah satu kerajaan yang kecil dan miskin, satu negeri yang kecil, lebih kecil dari daerah Aceh dan telah hancur lebur. Bangsa dari negeri yang seperti ini kini bertindak melakukan kekhianatannya terhadap tanah air kita Indonesia yang sudah merdeka itu untuk dijajahnya kembali.

Kalau maksud yang jahaman itu berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakyat, merampas semua harta benda negara dan harta rakyat dan segala kekayaan yang telah kita kumpulkan selama ini akan musnah sama sekali. Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia menjadi hambanya kembali. dan menjalankan usaha untuk menghapus agama Islam kita yang suci, serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Di Jawa bangsa Belanda serta kaki tangannya telah melakukan keganasannya terhadap kemerdekaan Indonesia, hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan di pihak kita. Sungguhpun begitu mereka belum juga insaf.

Segenap lapisan masyarakat yang, telah bersatu padu, dengan patuh berdiri di belakang kedua pemimpin besar Soekarno-Hatta

dan sedang menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan.

Menurut keyakinan kami adalah perjuangan seperti ini, perjuangan suci yang disebut Perang Sabil. Maka percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah, sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Teungku Chik Di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah maju ke muka, untuk mengikut jejak perjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh akan segala perintah-perintah pemimpin kita, untuk keselamatan Tanah Air, Agama dan Bangsa.

Kutaraja, 15 Oktober 1945.

Atas nama Ulama Seluruh Aceh.

Tgk. Haji Hasan Kroeeng Kale, -Tgk.M.Daoed Beureueh, Tgk. Haji Dja'far Sidik Lamdjabat, Tgk. Haji Ahmad Hasballah Indra - Poeri .⁷

Jadi maklumat bersama itu merupakan suatu fatwa bahwa perang melawan Belanda dalam mempertahankan Republik Indonesia adalah suatu keharusan dalam agama, dan dapat dinamakan perang sabil, yang kalau meninggal waktu melakukannya mendapat pahala syahid. Oleh karena itu maklumat tersebut sangat penting bagi rakyat Aceh/, mereka tidak mau kalau hanya mati sia-sia. Tetapi mereka rela mati, kalau mati itu adalah mati syahid. Mati syahid hanya ada dalam perang sabil. Orang yang dapat menetapkan mati syahid atau bukan, hanyalah para ulama.

Fatwa ulama Aceh itu dengan cepat beredar ke segala lapisan masyarakat di kota dan di desa, sehingga diikuti tua dan muda dengan satu tujuan membela tanah air tumpah darah Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian tertanamlah keyakinan yang membaja dalam hati rakyat Aceh, bahwa berjuang dan berperang melawan musuh-musuh Republik Indonesia adalah Perang Sabil, dan kalau mati namanya mati syahid.⁸

Untuk itu mereka selalu mengikuti perkembangan perjuangan rakyat Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya. Para ulama melihat bahwa negara dan bangsa dalam keadaan genting, terutama sekali sesudah mendapat berita tentang hebatnya pertempuran

pada 10 Nopember 1945 di Surabaya. Karena itu para Ulama Aceh menyatakan bahwa Maklumat Bersama tanggal 15 Oktober belum memadai untuk menghadapi kegentingan negara pada waktu itu. Tetapi perlu menyusun suatu rencana yang lebih luas dan harus terjun langsung ke dalam kancah perjuangan phisik. Sebagai kelanjutan Maklumat Bersama 15 Oktober itu, maka pada tanggal 17 Nopember 1945, bertempat di Mesjid Tiro diadakan suatu rapat besar yang dihadiri sekitar 600 orang ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam Kabupaten Pidie. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Teungku Umar Tiro dan mengambil keputusan mendirikan Barisan Mujahidin, dengan ketua umumnya. Teungku Umar Tiro sendiri.⁹

Kemudian pada tanggal 23 Nopember 1945 berlangsung musyawarah ulama seluruh Aceh bertempat di Mesjid Raya Baiturrahman, di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Musyawarah memutuskan mendirikan Barisan Hisbullah dengan Ketua Umumnya Teungku Muhammad Daud Beureueh, serta mengeluarkan sebuah Fatwa yang menyatakan bahwa keadaan sekarang Hukum Perang Fardhu Ain.¹⁰

Pengurus Besar Hisbullah terdiri dari: Teungku Haji Hasan Kruengkale, Teungku Said Abdullah Kayu, Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Haji Makam Gampong Blang, Teungku Muhammad Lampisang, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Abdul Wahab Seulimum, Teungku Muhammad Saleh Lambhuk, Tuanku Abdul Aziz, Teungku Haji Hamzah Ateuh, Teuku Muhammad Amin, Teungku Muhammad Daud Uleelheu, Syekh Marhaban Kruengkale, Teungku Haji Jakfar Lamjabat, dan Teungku Sulaiman Mahmud Uleekareng. Di antara mereka yang terpilih menjadi ketua Umum dan Wakil Ketua Umum masing-masing Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Haji Hasballah Indrapuri, sedangkan Sekretaris Umum, Sekretaris I dan II masing-masing Teuku Muhammad Amin, Syeh Marhaban dan Teungku Sulaiman Mahmud.¹¹

Tidak berapa-lama kemudian, yaitu pada 1 Desember 1945 Barisan Hisbullah ditukar namanya menjadi lasykar Mujahidin. Pada waktu itu juga mengeluarkan maklumat pertamanya, yang isi

utamanya mengajak seluruh rakyat Aceh untuk berjihad melawan musuh-musuh proklamasi 17 Agustus 1945.¹²

Setelah lasykar Mujahidin berdiri di seluruh Aceh, maka organisasinya disempurnakan dan dijadikan sebuah Divisi Lasykar : Rakyat dengan nama Divisi X/Teungku Chik Di Tiro, dengan Komandan Divisinya yana pertama Hasballah Laud, kemudian diganti oleh Cekmat Rahmany dan Abdulmuthalib sebagai Kepala Staf. Divisi ini dilengkapi dengan delapan seksi, yang masing-masing dikepalai oleh : Seksi I Abdulmuthalib, Seksi II Ilyas Lebe, Seksi III A. Hamdany, Seksi IV Hasballah Asyik, Seksi V Said Ali, Seksi VI Ayat Musi, Seksi VII Yusuf Bakhrum, dan Seksi VIII Yusuf Haji Saleh.

Divisi X/Teungku Chik Di Tiro mempunyai lima resimen yaitu: Resimen I berkedudukan di Banda Aceh, Resimen II berkedudukan di Sigli, Resimen III berkedudukan di Bireun, Resimen IV berkedudukan di Meulaboh, dan Resimen V berkedudukan di Takengon. Pada pertengahan tahun 1946 dibentuk lagi Barisan Berani Mati Lasykar Teungku Chik Paya Bakong, sebagai penjelmaan Tentara Perjuangan Rakyat (T P R), yang lahir pada permulaan tahun 1946. Markas divisi ini tidak ditempatkan di Kutaraja melainkan di Idi (Aceh Timur), yaitu kota kelahiran Tentara Perjuangan Rakyat (TPR), di bawah pimpinan Amir Husein Al Mujahid.¹³

Dengan adanya Agresi Militer Pertama Belanda pada 27 Juli 1947, maka hampir seluruh wilayah Indonesia dilanda oleh serangan Belanda tersebut. Pematang Siantar sebagai tempat kedudukan Gubernur Sumatera dan Gubernur Muda Sumatera Utara dapat diduduki Belanda. Sementara itu daerah Aceh tidak diduduki Belanda (kecuali Sabang), tetapi keadaan di daerah ini cukup genting juga, terutama kesiagaan menghadapi kemungkinan-kemungkinan penyerbuan Belanda ke Aceh. Selain dari itu tentara dan barisan kelasykaran dikirim untuk menghadapi Belanda di Medan Area. Keadaan yang ada semakin rawan. Pemerintah Republik Indonesia sangat memahami fungsi dan pengaruh ulama di Aceh. Oleh karena itu mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Wakil Presiden tanggal 26

Agustus 1947 No. 4/WKP/SUM/47.¹⁴ Kemudian diangkat pula pembantu-pembantu Gubernur Militer baik dari tokoh-tokoh tentara, para cendekiawan maupun Ulama. Mereka yang berasal dari tokoh ulama yaitu Haji Halim Hasan, anggota D P D Sumatera Timur, dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler; Teunggu Abdul Wahab, Bupati Sigli, dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler. A. Hasjmy dengan pangkat Mayor Tituler, dan Said Abubakar, dengan pangkat Mayor Tituler.¹⁵

Sehubungan dengan agresi Belanda itu, Panglima Sumatera Soekardjo Hardjo Wardoyo mengirim sebuah radiogram kepada pemimpin-pemimpin rakyat Aceh yang berbunyi sebagai berikut.

“Pemimpin-pemimpin rakyat Aceh
Pengambilan kota medan terletak di tangan saudara-saudara
segenap penduduk Aceh jangan sangsi tdk
alirkan terus kekuatan aceh ke medan dan jangan berhenti
sebelum medan jatuh tdk hrs
panglima sumatera.¹⁶

Dengan adanya radiogram tersebut, beban yang harus dipikul menjadi bertambah. Rakyat Aceh telah membantu medan perang Sumatera Timur sejak akhir tahun 1946, kini lebih meningkatkan lagi. Tugas yang diinstruksikan oleh Panglima Sumatera itu disambut rakyat Aceh dengan penuh tanggung jawab.

Untuk itu dibentuk Resimen Istimewa Medan Area (RIMA) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hasballah Haji, putera Teungku di Garut. Ia alumnus Perguruan Normal Islam P U S A tahun 1943, dan anggota Gyu Gun pada masa pendudukan Jepang. Resimen itu terdiri dari tiga batalyon TRI, dibantu oleh pasukan lasykar rakyat Divisi. Teungku Chik Di Tiro, Divisi Teungku Chik Paya Bakong, Divisi Rencong, dan Divisi Hisbullah.¹⁷

Para ulama di Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur yang tidak langsung terjun ke dalam perang Medan Area, aktif-mengumpulkan bahan makanan untuk supply mereka yang bertempur di Medan Area. Ada pun bahan makanan yang diperlukan ialah beras dan daging. Oleh karena itu rakyat Aceh banyak menyumbangkan sapi, kerbau, dan beras sesuai dengan kemampuannya.

Untuk memformilkan kegiatan tersebut, pada 2 Agustus 1947 di Banda Aceh di bentuk Badan Perbendaharaan Perang Sabil, dengan keputusan Dewan Pertahanan Daerah Aceh No. 7/Dpd. Ada pun pimpinan umum dari badan tersebut terdiri dari Teungku Hasballah Indrapuri dan Teungku Abdurahman Menasah Meucap Geulempang Dua. Kemudian badan ini mendirikan cabang-cabangnya di seluruh Aceh, dengan tugas mengumpulkan sumbangan dari seluruh rakyat untuk dipergunakan sebagai biaya perjuangan.¹⁸

Dalam usaha mengintegrasikan tenaga dan kesatuan komando, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, tentang pembubaran tentara., lasykar-lasykar, dan barisan-barisan rakyat dan menggabungkannya kedalam tentara Nasional Indonesia (TNI).¹⁹

Penetapan Presiden itu tidak dapat direalisasikan dengan segera, karena meletusnya agresi I Belanda, di samping itu masih ada faktor lain yang bersifat politis dan psikologis yang sangat sulit seperti. dikemukakan oleh M. Nur El Ibrahimy sebagai berikut :

Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, salah sedikit menanganinya dapat menimbulkan bahaya. Di Aceh pada waktu itu di samping TRI ada pula Divisi Tgk.Tjhik di Tiro (dahulu Barisan Mujahidin) yang tadinya dibawah pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri sebelum menjadi Gubernur Militer. Divisi ini terbesar diantara lasykar-lasykar rakyat dan persenjataannya pun agak lengkap juga. Di samping itu terdapat Divisi Tgk. Tjhik di Paya Bakong di bawah pimpinan Amir Husin Almujaahid. Kemudian terdapat pula Divisi Rencong. Divisi ini meskipun tidak sebesar Divisi Tgk. Tjhik di Tiro, tetapi mempunyai senjata yang lengkap, bahkan ada pula senjata berat.

Pembaca dapat membayangkan bagaimana sukarnya mempersatukan barisan-barisan rakyat yang ideologinya berlain-lainan dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang-kurang harmonis atau tidak serasi. Apa lagi barisan-barisan ini agak kurang percaya kepada TRI, tentara Pemerintah yang resmi., karena sebagian anggota TRI adalah bekas anggota tentara Hindia Belanda

Kemudian barisan-barisan rakyat ini, yang masing-masing menganggap dirinya berjasa tak mau dibubarkan dan digabungkan dengan TNI. Mereka ingin hidup terus berdiri sendiri dengan alasan

revolusi belum selesai. Mereka meragukan kemampuan TNI berjuang sendiri dengan tidak dibantu oleh lasykar-lasykar rakyat yang sudah ada oleh karena itu mereka tidak mau melepaskan senjatanya.²⁰

Uraian di atas, menunjukkan pengintegrasian keempat Divisi Barisan Rakyat Bersenjata ke dalam TNI di Aceh tidaklah mudah. Masing-masing kesatuan merasa punya hak yang sama untuk mempertahankan negara dari musuh. Bahkan ada anggapan yang satu lebih kuat dan lebih bersih dari yang lain.

Walaupun demikian, akhirnya dengan pengaruh ulama Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer semua Barisan Rakyat bersenjata bersedia dibubarkan dan senjatanya diserahkan kepada TNI. Para anggota divisi rakyat tersebut hanya sebagian kecil yang lulus seleksi masuk ke TNI. Sedangkan sebagian besar kembali ke masyarakat dengan tidak meminta fasilitas apa-apa. Dengan demikian terbentuklah TNI dalam suatu kesatuan yang dinamakan Divisi X pada tanggal 13 Juni 1948.²¹ Prestasi ini merupakan hasil perundingan antara kelima unsur, yaitu unsur TNI dan empat unsur Lasykar Rakyat yang terdiri dari Divisi Teungku Chik Di Tiro, Divisi Teungku Chik Paya Bakong, Divisi Rencong, dan Divisi Hisbullah. Penggabungan kelima unsur itu mewujudkan suatu hasil yang sangat sempurna, sehingga tidak ada efek yang merugikan sesudah itu seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya mempunyai wibawa dan kepandaian yang mencukupi.

Dengan dilancarkan agresi Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda berhasil menguasai dan menduduki ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta dan dapat menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan beberapa pejabat Tinggi Pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian sebagian diasingkan ke Brastagi/Prapat dan sebagian lagi ke Pulau Bangka.

Setelah agresi Belanda kedua ini, salah satu daerah yang belum dikuasai Belanda adalah daerah Aceh. Sedangkan sebagian besar daerah yang susah dikuasainya telah dibentuk negara-negara boneka, seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa

Timur, dan negara-negara boneka lainnya, diberbagai daerah Indonesia. Negara-negara itu dimaksudkan sebagai persiapan untuk membentuk Negara Federal.²²

Untuk menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia di Aceh, Belanda berusaha membujuk pemimpin-pemimpin rakyat Aceh untuk pembentukan sebuah Negara Boneka. Dalam usahanya ini Belanda melalui Wali Negara Sumatera Timur, Dr. Tengku Mansur, telah mengirimkan sepucuk surat mengajak Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk membentuk suatu Negara Federal, serta menghadiri Muktamar Sumatera yang dilaksanakan di Medan pada bulan Maret 1949.²³ Isi Surat yang ditandatangani oleh Dr. Tengku Mansur tersebut berbunyi sebagai berikut :

Kehadapan Paduka Yang Mulia
Gubernur Militer Aceh
di Kutaraja

Perkembangan perjalanan politik di Indonesia menunjukkan semakin jelas, bahwa adalah berfaedah dan baik-baik suku-suku bangsa di Sumatera untuk mencapai suatu kerja sama yang akan dapat terkoordinir bukan saja dalam lapangan politik ekonomi, tetapi juga dengan beberapa cara lain.

Itulah sebabnya maka saya boleh memulai menggerakkan untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera buat turut serta dalam Muktamar Sumatera yang akan dilangsungkan di Medan pada tanggal 28 Maret ini. Tujuan Konperensi ini yang 5 hari lamanya mengadakan perhubungan yang pertama di antara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera yang berbagai-bagai itu, dan saya menyatakan penghargaan saya moga-moga perhubungan yang pertama ini berangsur-ansur menjadi pertalian yang bertambah-tambah eratnya untuk kebahagiaan bangsa Sumatera dan bangsa Indonesia seluruhnya. Negara Sumatera Timur akan merasa suatu kehormatan untuk menerima perutusan tuan sebagai tamu selama Muktamar itu.

Yang diundang ialah:

Aceh	Bengkalis	Lampung
Tapanuli	Bangka	Bengkulu
Nias	Belitung	Indragiri
Minangkabau	Sumatera Selatan	Jambi
		Riau

Terlepas dari segala perbedaan faham politik saya menyatakan penghargaan saya, supaya Aceh juga akan menyuruh suatu perutusan mewakilinya pada Mukhtamar pertama dari suku-suku Sumatera ini.

Pembesar-pembesar di Sabang telah diperintahkan untuk menyambut perutusan Tuan dan mengawaininya ke Medan dengan kapal terbang.

Wali Negara Sumatera Timur
T. Dr. Mansur.²⁴

Usaha yang dijalankan oleh Belanda untuk membentuk negara boneka di daerah Aceh tidak berhasil. Tanggapan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo Teungku Muhammad Daud Beureueh, terhadap surat Dr. Teungku Mansur sangat tegas sekali. Beliau menolak ajakan tersebut, sebagaimana yang terlihat dari suatu pernyataan beliau dimuat dalam surat kabar *Semangat Merdeka*.²⁵

Pernyataan yang diberikan oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah sebagai berikut: Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk satu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat Republikan. Sebab itu juga, undangan dari Wali Negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, dan karena itulah tidak kita balas. Di Aceh tidak terdapat salah faham sebagaimana diterangkan oleh Belanda itu, bahkan kita mengerti betul apa yang dimaksud oleh Belanda itu dengan Mukhtamar Sumateranya. Maksud Belanda ialah hendak mendiktekan kepada Dr. Teungku Mansur supaya menjalankan politik *divide et impera* lagi. Sebab itu kita menolak adanya Mukhtamar Sumatera tersebut. Aceh telah siap sedia menanti segala kemungkinan yang akan timbul dari sikap penolakan itu. Kita yakin bahwa mereka yang telah menerima baik undangan Dr. Tengku Mansur tersebut, bukanlah orang Republikan, tetapi adalah kaki tangan dan budak kolonialisme Belanda.²⁶

Berdasarkan surat tanggapan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo tersebut, jelas bahwa rakyat Aceh tidak mengingini bentuk Negara Federal gaya van Mook tersebut.

Meskipun situasi negara dalam suasana revolusi, para ulama yang tergabung dalam PUSA juga aktif memperjuangkan dan menjalankan lembaga agama dalam Pemerintahan Republik Indonesia di Aceh. Hal ini telah dimulai pada masa pendudukan Jepang, yaitu mendirikan kantor urusan agama dengan keluarnya *Atjeh Syu Rei* No. 12 Syowa 19 NI-Gatu 15 Niti (15 Pebruari 1944) tentang susunan *Syukyo Hoein* (Mahkamah Agama) dan *Atjeh Syu Kokuzi* No-35 tentang peraturan pelaksanaan *Atjeh Syu Rei* tersebut. Menurut *Atjeh Syu Rei* No. 12 ini, di ibu kota daerah Aceh, diadakan *Syukyo Hoein* (Mahkamah Agama), ditiap-tiap Bunsyu (Kabupaten) diadakan *Qadlityo*, dan di tiap-tiap *Son* diadakan *Qadli Son*.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Mahkamah Agama Daerah Aceh yang pada masa Jepang bernama, *Atjeh Syu Syukyo Hooiin* itu, diubah namanya menjadi Dewan Agama Islam Aceh dan sebagai kepalanya diangkat Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap sebagai pengganti Teungku Haji Djakfar Sidiq Lamjabat yang telah bertugas semenjak masa pendudukan Jepang. Pada waktu daerah Aceh sebagai daerah Keresidenan yang berada di bawah Propinsi Sumatera Utara, di Banda Aceh dibentuk suatu Panitia yang diketuai oleh Muhammad Nur El Ibrahimy, untuk menyusun suatu struktur pejabat Agama Aceh. Dalam struktur ini ditetapkan bahwa bahagian Pendidikan Agama berada di bawah Pejabat Agama Keresidenan Aceh. Sebagai Kepala Pejabat Agama, ditunjuk Teungku Muhammad Daud Beureueh dan sebagai Kepala Pendidikan Agama ditunjuk Teungku Muhammad Nur El Ibrahimy.²⁷ Kemudian oleh pejabat-pejabat agama ini, ditetapkan sekolah-sekolah Agama yang sebelumnya berstatus swasta, diserahkan kepengurusannya kepada pemerintah. Karenanya pada masa Revolusi Kemerdekaan di Aceh Kepala Bahagian Pendidikan Agama Daerah Aceh, telah menerima penyerahan 180 sekolah madrasah *Ibtida-iyah* di seluruhnya dan nama-namanya dirubah menjadi SRI (Sekolah Rendah Islam). Penyerahan ini dilakukan dengan sepucuk surat penyerahan yang dinamakan "Qanun Penyerahan Sekolah-sekolah Agama kepada Pemerintah Daerah Aceh".²⁸ Sesudah penyerahan itu, maka terdapat lebih kurang 750 orang guru dari 180 buah sekolah Madrasah *Ibtida-iyah*, yang mendidik guru negeri dan menerima gaji dari Pemerintah.

Selain golongan ulama, para Uleebalang (bangsawan) yang merupakan salah satu golongan berpengalaman dalam struktur masyarakat Aceh, juga ikut aktif mengisi dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan, seperti yang dikemukakan oleh C. Van Dijk sebagai berikut:

Dalam meninjau kembali, "revolusi sosial di Aceh tahun 1945 demikian biasanya peristiwa itu disebut sering dijadikan alasan dengan melukiskannya sebagai hukuman yang dikenakan kepada para pengkhianat terhadap Republik Indonesia. Tetapi ini hanya sebagian benar, karena mencap semua uleebalang sebagai lawan perjuangan kemerdekaan Indonesia tentu saja adalah pemutarbalikan kenyataan.

Pada bulan-bulan pertama sesudah pernyataan kemerdekaan banyak uleebalang secara aktif menyokong Republik. Karena Pemerintah Republik, seperti juga Pemerintah Jepang dan Pemerintah Belanda sebelumnya, di Aceh mengharapkan yang lebih berpendidikan dan lebih berpengalaman untuk mewakilinya, sesungguhnya kaum uleebalang, mempunyai peranan penting pada tahap-tahap perjuangan kemerdekaan di sini. Gubernur Sumatera Republik yang pertama adalah Teuku Muhammad Hasan, yang mewakili Sumatera dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Residen Aceh Republik yang pertama adalah Teuku Nyak Arif, yang kemudian digantikan, mula-mula secara tidak resmi dan pada Januari 1946 dengan resmi, oleh Teuku Mohammad Daudsyah (Mohammad Daudsyah).., Wakil residen Aceh di samping itu, pada bulan-bulan mula-mula itu, adalah Teungku Panglima Polim Muhammad Ali, sedangkan Komite Nasional-Aceh diketuai Tuanku Mahmud anggota keluarga Sultan.²⁹

Dengan demikian golongan *uleebalang* (bangsawan) terbagi atas dua kelompok yaitu: Pertama kelompok yang meragukan kemampuan bangsa Indonesia untuk merealisasikan isi dan tujuan proklamasi kemerdekaan. Kelompok ini mengharapkan Belanda berkuasa kembali di Aceh, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah adat seperti yang telah berlangsung secara turun temurun pada masa sebelum pendudukan Jepang.

Uleebalang (bangsawan) yang berisi keras dengan dengan pola keuleebalangan gaya lama tersebut adalah Teuku Muhammad Daud Cumbok, Uleebalang Cumbok, Kecamatan Lam Meulo. Oleh karena itu ia bersikap anti Republik, dengan mengirim utusan kepada pejabat-

pejabat Belanda yang ditawan Jepang di Rantau Prapat, 15 September 1945, dan mengharapkan supaya mereka selamat serta kembali ke Aceh.

Sikap anti Republik Indonesia itu dinyatakan secara terang-terangan dengan melarang para pemuda mengibarkan bendera Merah Putih di kantornya. Tindakan itu tidak hanya sampai disitu saja, ia memerintahkan pengikutnya untuk mencabut kembali poster-poster perjuangan di daerah kekuasaannya yang sengaja dipasang oleh para pemuda pejuang yang tergabung dalam PRI (Pemuda Republik Indonesia) dan pemuda PUSA.³⁰

Kedua, kelompok yang mendukung proklamasi kemerdekaan. Kelompok ini segera tampil ke permukaan dengan semangat nasionalis yang tinggi, melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan dan mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan. Diantara *uleebalang* yang berjiwa nasionalis seperti itu adalah Teuku Nyak Arief. Beliau menyambut berita proklamasi sebagai suatu kemenangan perjuangan bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan dilanjutkan. Oleh karena itu Teuku Nyak Arief segera memelopori penyebaran berita proklamasi dan pengibaran bendera Merah Putih ke seluruh daerah Aceh.³¹ Selanjutnya melakukan langkah-langkah pertama untuk membentuk Tentara Republik Indonesia di Aceh. Menurut T. Ibrahim Alfian, bahwa satu minggu sesudah proklamasi kemerdekaan diketahui di Aceh, Teuku Nyak Arief mengundang perwira-perwira Gyugun, Korps Sukarelawan Indonesia yang terbentuk pada masa pendudukan Jepang, untuk membicarakan pembentukan Tentara Republik disini. pada tanggal 27 Agustus terbentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API)

Dengan lahirnya API di daerah Aceh maka dasar yang kuat untuk tumbuh tentara yang resmi mulai diletakkan. Dalam proses selanjutnya API bertukar namanya menjadi TKR (Tentara Keamanan rakyat, kemudian Keselamatan Rakyat), lalu menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), dan akhirnya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Sehubungan dengan perkembangan organisasi itu yang meluas ke seluruh daerah. Pada tanggal 6 Oktober 1945, *Atieh Syu Tyokan* S. Lino mengundang para pemimpin Aceh ke rumahnya guna membicarakan situasi ibukota Kutaraja khususnya dan daerah Aceh

pada umumnya. Mereka yang turut/ hadir, dari pihak Aceh antara lain: Teuku Nyak Arief (Residen RI Daerah Aceh), Tuanku Mahmud (Ketua KNI Aceh), Teungku Muhammad Daud Beureueh (Ketua PUSA dan anggota KNI Aceh); dari pihak Jepang: *Tyokan S. Lino* sendiri, *Atjeh Syu Seityo S. Masubutsi*, *Keimutio* (Kepala polisi), *Bo-ci Tai Tyo* (Kepala Pertahanan). Dalam pertemuan itu S. Lino menegaskan bahwa, meskipun Jepang telah kalah, namun masih diberi kuasa oleh sekutu dan bertanggung jawab di dalam hal pemerintahan dan keamanan daerah ini. Oleh karena itu segala kegiatan yang dilakukan harus dengan izin pemerintah Jepang. Penguasa Jepang meminta agar API yang telah didirikan tanpa seizinnya serta mengarah seperti organisasi ketentaraan segera dibubarkan.³²

Sehubungan dengan penegasan S. Lino itu, Teuku Nyak Arief menjawab dengan tegas, yang intinya, bahwa Jepang harus tahu diri mereka telah kalah dan tidak berhak lagi mengatur rakyat Indonesia, seperti pada masa mereka berkuasa dulu. Setelah memberi jawaban demikian, " Teuku Nyak Arief meninggalkan pertemuan tersebut. Beliau kemudian juga diikuti oleh tokoh tokoh lainnya tanpa mengucapkan kata-kata sepatah pun. Dengan terjadi peristiwa ini, maka semangat orang-orang Jepang menjadi mundur.³³ Sedangkan tujuan yang diharapkan oleh Jepang dalam pertemuan itu mengalami kegagalan total.

Pada tanggal 28 Agustus 1945, Teuku Nyak Arief yang selama ini memangku jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bentukan Jepang (*Atjeh Syu Sangi Kai*), terpilih dan diangkat menjadi Ketua Komite Nasional (KNI) daerah Aceh, dengan Tuanku Mahmud sebagai wakilnya. Untuk mengatasi masalah keuangan perjuangan yang semakin lama semakin berat, Teuku Nyak Arief menjual harta benda pribadinya, hal yang sama dilakukan oleh Tuanku Mahmud.

Sehubungan dengan tanggung jawab di atas, pada bulan September 1945 Teuku Nyak Arief telah membuat surat perintah kepada Teuku Panglima Polem Muhammad Ali (Panglima Sagi XXII Aceh Besar) untuk menemui *Atjeh Syu Sei Tyo* (Kepala-Urusan Pemerintahan Umum pada Kantor Keresidenan Aceh). Dalam-surat itu Teuku Nyak Arief meminta agar *Somubu Tyo* menghadap *Atjeh*

Syu Tyokan (Residen Aceh) S. Lino untuk membicarakan penyerahan pemerintahan dari Jepang kepada Teuku Panglima Polem. Ditegaskan juga melalui Panglima Polem, bahwa sejak waktu itu Teuku Nyak Arief tidak bersedia lagi mengadakan hubungan dengan Jepang. Pembicaraan itu tidak memperoleh hasil yang diharapkan karena *Tyokan* (Residen) tidak dapat bertindak lebih jauh selain dari yang telah ditentukan oleh Sekutu.³⁵

Oleh karena itu Teuku Nyak Arief bersama pemimpin-pemimpin Aceh lainnya menentukan sikapnya sendiri. Mereka segera bertindak untuk menyusun aparat pemerintahan Keresidenan Aceh. Dalam bulan September 1945 itu juga semua pegawai bangsa Indonesia yang bekerja pada kantor pemerintah Jepang disumpah oleh Teungku Ismail Yakob menjadi pegawai pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan pengambil alih pemerintah dari tangan Jepang secara bertahap terus dilaksanakan, walaupun mendapat acaman keras dari Jepang. Hal ini menunjukkan keberanian dan kewibawaan Teuku Nyak Arief.

Untuk lebih menyempurnakan aparat pemerintahan di daerah Aceh, maka Pemerintah Republik Indonesia mulai tanggal 3 Oktober 1945 dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera dari Negara Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 1945 No. 1/X. telah mengangkat Teuku Nyak Arief sebagai Residen Aceh.³⁶ Dalam bulan Oktober ini juga tiba di Kutaraja utusan sekutu yang bernama Mayor Knottenbeu untuk membicarakan pendaratan sekutu di Aceh dalam rangka melucuti senjata Jepang dan mengurus para tawanan perang. Residen Aceh Teuku Nyak Arief menolak rencana sekutu ini. Dalam hal tersebut Residen Aceh itu mengemukakan dengan tegas bahwa suka bekerja sama dengan sekutu, tetapi tidak dengan orang-orang Belanda, "babi-babi sombong tentara Belanda yang keparat". Sedangkan persoalan yang berhubungan dengan perlucutan senjata Jepang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu tentara sekutu tidak ada gunanya datang ke daerah Aceh.³⁷ Selama berada di Aceh, Knottenbeu, juga mengadakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh pemimpin Indonesia lainnya, seperti dengan Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, Tuanku Mahmud, namun pertemuan-pertemuan tersebut lebih banyak menemui kegagalan bahkan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh utusan sekutu itu tampak turut lebih meruncing suasana di daerah Aceh.

Sehubungan dengan keadaan itu, maka pada tanggal 10 Nopember Knottenbelt kembali ke Medan. Gawatnya keadaan pada waktu itu terlihat pada hari keberangkatan Knottenbelt: dimana kendaraan Teuku Nyak Arief terpaksa berjalan di depan sekali untuk menghindari hal-hal yang mungkin dapat mengancam jiwa utusan sekutu itu. Mereka selamat sampai di Medan, di sana Teuku Nyak Arief langsung ke markas sekutu dan menjumpai Jenderal Kelly untuk memberikan peringatan khusus sehubungan dengan rencana sekutu untuk menguasai daerah Aceh. Hal itu diperkuat lagi dengan laporan hasil penyelidikan Knottenbelt, yang mengemukakan bahwa Aceh dapat diibaratkan sebagai sebuah tong mesiu yang untuk meledaknya hanya diperlukan sebuah nyala api kecil, sementara seorang utusan yang bijaksana dan ahli tidak akan mungkin memadamkannya jika ia telah meledak, akan tetapi ia akan berguna sekiranya tangan yang mematikan api itu belum sempat mendatangi suatu malapetaka.³⁸

Berdasarkan laporan itu, maka pihak sekutu tidak mendatangkan lagi utusannya ke Aceh dan rencana untuk menduduki daerah ini juga ditunda. Oleh karena itu ketika mobil Chevrolet yang ditumpangi Teuku Nyak Arief dari Medan yang bercat macan loreng dan berbendera merah putih, ditengah jalan diserang dengan tembakan mitraliur pesawat terbang pemburu. Namun dengan perlindungan Tuhan Teuku Nyak Arief selamat dari bahaya maut dan dapat meneruskan perjalanan ke Aceh.³⁹

Kekuatan angkatan bersenjata terus disempurnakan oleh Teuku Nyak Arief. Selain TKR juga dibentuk satu peleton polisi istimewa yang terdiri dari suku Jawa dan Menado yang dikepalai oleh Teuku Nyak Arief. Tangsi-tangsi dan asrama, di tempati oleh polisi Istimewa dan TKR yang dilatih dengan sistem tempur modern. Bekas opsir Gyugun dilantik kembali menjadi perwira-perwira TKR. Seperti Kolonel Syamaun Gaharu, Mayor T.A. Hamid, Kapten Husin Yusuf, Said Usman, Said Ali, Nyak Neh, dan Kapten T. Muhammadiyah.

Sebagai seorang Residen, Teuku Nyak Arief lebih banyak mengurus persoalan yang berhubungan dengan militer dari pada

mengurus soal-soal pemerintahan sipil. Sebenarnya kedua bidang ini sangat sukar dipisahkan, karena pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh keadaan revolusi. Namun demikian Teuku Nyak Arief juga berusaha menyelesaikan persoalan - persoalan pemerintahan sipil.

4.2 Alim Ulama Dalam Revolusi Sosial

Setelah proklamasi kemerdekaan muncul beberapa kelompok elite di Aceh sebagai berikut :

Kelompok elite pertama adalah golongan *uleebalang* (bangsawan) yang secara turun temurun menduduki jabatan pemerintahan dalam suatu kawasan daerah di Aceh. Secara garis besar uleebalang digolongkan ke dalam satu kelompok, tetapi sebenarnya mereka mempunyai status yang berbeda-beda. Perbedaan status ini berkaitan erat dengan usia silsilah Sultan Aceh, dan otoritas politik dalam tata feodal seperti luas daerah kekuasaan.

Kedua, elite ulama yang merupakan pemimpin spritual dalam kehidupan masyarakat, Aceh. Mereka yang tergolong dalam kelompok elite ulama ini memiliki status yang berbeda sesuai dengan Kualitas ilmu yang dimiliki. Elite ulama ini dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu elite ulama modernis dan elite ulama ortodoks. Diantara kedua kelompok ini tampaknya elite ulama modernis telah mampu menyusun organisasi yang agak teratur yaitu PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Oleh karena itu kelompok elite ulama ini mempunyai jaringan komunikasi dengan seluruh anggotanya yang tersebar di seluruh Aceh. Sejak masa pendudukan Jepang, elite ulama modernis sudah banyak memangku jabatan tertentu dalam pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan keagamaan. Sedangkan elite ulama ortodok umumnya masih tetap meneruskan peran tradisionalnya, terutama di pesantren-pesantren.

Kelompok elite ketiga adalah elite pemuda, mereka dapat dikelompokkan atas dua/kelompok, yaitu elite pemuda yang mendapat pendidikan militer Jepang dan elite pemuda yang mendapat pendidikan sekolah keagamaan modernis. Mereka yang termasuk kelompok elite pertama umumnya bersatu untuk membentuk angkatan bersenjata di

Aceh yaitu API. Sedangkan kelompok elite kedua, tampil dengan berani membentuk barisan barisan kelasyakan.⁴⁰

Kelompok elite keempat, yaitu elite minoritas. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini terdiri dari pemimpin-pemimpin golongan minoritas yang berasal dari daerah luar Aceh. Oleh karena itu jumlah mereka tidak banyak.

Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh daerah Aceh, maka orang-orang atau golongan-golongan elite yang telah ada dalam masyarakat Aceh mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang proklamasi 17 Agustus 1945, hal itu disebabkan hubungan kontak sosial yang berlangsung antara masing-masing kelompok elite selama ini. Reaksi dan pendapat yang terlihat dalam uraian selanjutnya merupakan pencerminan dari sisi kelompok elite di Aceh.

Pertama tampak dari golongan *uleebalang* (bangsawan), mereka terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok pertama, mereka ini selama penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang tidak mempunyai kesadaran "Nasionalis Indonesia", dapat kita katakan sebagai pro-Belanda, serta tidak ada kepercayaan diri untuk berdiri sendiri sebagai orang yang merdeka. Hal itu tergambar dari keyakinannya bahwa bangsa Indonesia dianggap tidak mampu menggerakkan roda pemerintahan "Negara yang Merdeka", dan mereka ini berkeyakinan bahwa "Proklamasi 17 Agustus 1945" tidak bersifat permanent karena pasti akan terbentuk lagi Gubernemen Hindia Belanda, kemudian dengan keyakinan itu dapat mempengaruhi mental mereka terhadap keadaan yang sedang berlangsung pada waktu itu. Hal itu terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh *uleebalang* di Pidie, yaitu menggalang persatuan dan kekuatan sesama elite *uleebalang* yang sependapat untuk mengembalikan wewenang dan kekuasaan mereka, yang di anggap telah hilang selama itu.⁴¹

Kelompok kedua, yaitu para *uleebalang* yang selama pendudukan Belanda bersikap "anti penjajah", baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Mereka ini dengan terus menerus mengikuti perkembangan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia

dan mendukung penuh kepadanya. Mereka ketika mendapatkan berita “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” menyambut dengan gembira serta meyakini bahwa Republik Indonesia pasti akan menang.

Kedua terlihat dari golongan elite ulama, mereka terpecah menjadi dua kelompok dalam menanggapi berita “Proklamasi 17 Agustus 1945”. Pertama kelompok elite ulama ortodoks menyambut dengan gembira berita proklamasi. Di samping rasa gembira mereka ini masih ada keraguan yang mempertanyakan apakah Bangsa Indonesia sanggup mempertahankan kemerdekaan itu, sikap itu muncul karena pengalaman waktu terjadi “Perang Kolonial” diberbagai wilayah Indonesia, banyak wilayah-wilayah Indonesia itu tidak bisa bertahan lama, kecuali Aceh. Walaupun demikian mereka telah bertekad bahwa bersama-sama golongan ulama lainnya akan mengumumkan “Perang-Sabil” terhadap Belanda yang akan datang menjajah Indonesia lagi.

Kedua kelompok elite ulama modernis, mereka ini lebih cepat bergerak dalam menanggapi berita “Proklamasi 17 Agustus 1945. Tindakan itu disebabkan tingkat kesadaran nasional dan pengetahuan politik mereka lebih tinggi. Seperti para ulama yang dahulunya pernah menjadi baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota partai politik Syarikat Islam dan para ulama pimpinan/anggota PUSA/Pemuda PUSA. Mereka ini sudah memperhitungkan kemungkinan akan terjadinya suatu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia setelah Jepang kalah. Oleh karena itu mereka menyambut. berita proklamasi kemerdekaan dengan tekad akan berjihad untuk mempertahankan proklamasi itu.⁴² Ketiga terlihat dari golongan elite pemuda, mereka ini berpendapat bahwa dengan terjadinya perubahan politik dunia dewasa ini, bangsa Indonesia harus mewujudkan suatu kemerdekaan yang abadi. Berdasarkan pemikiran ini, maka para pemuda di Aceh menyambut berita proklamasi dengan mengambil inisiatif untuk membentuk “Angkatan Pembela Proklamasi 17 Agustus 1945”, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Dengan demikian mereka ini telah mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi.

Keempat terlihat dari golongan elite minoritas, dalam kelompok ini terdapat dua macam pendapat, yaitu disatu sisi berpendapat bahwa Belanda kemungkinan akan kembali lagi untuk menjajah, hal ini

menandakan bahwa mereka ini kurang mempercayai akan kemampuan para pejuang kemerdekaan. Tetapi disisi lain dari kelompok ini mereka yang telah mengerti tentang politik kebangsaan untuk "Bernegara yang Merdeka,, dan juga telah mengerti usaha yang dilakukan oleh para pejuang baik secara militer maupun secara diplomasi, mendukung seluruhnya proklamasi kemerdekaan.⁴³

Sehubungan dengan penjelasan di atas, tampak bahwa kelompok elite ulama (terutama modernis) dan pemuda yang paling cepat menentukan sikap sehubungan dengan proklamasi kemerdekaan dan karenanya lebih berperan dan meraih pengaruh pada waktu itu. Mereka melihat jalur militer merupakan jalur yang tepat untuk mewujudkan cita-citanya. Untuk itu mereka mendirikan lembaga kemeliteran atau kelasykaran, sebagai dasar bagi perwujudan orientasi politiknya.⁴⁴

Sedangkan kelompok elite bangsawan yang masih tetap meneruskan tradisi pemerintah lokal seperti yang disebutkan di muka, pada mulanya tidak berniat untuk membentuk pasukan militer ataupun kelasykaran. Kemudian setelah pembentukan lasykar- lasykar rakyat yang merupakan "tentara bayangan di samping API menimbulkan perasaan curiga dikalangan sekelompok uleebalang terutama di daerah Pidie. Kecurigaan itu dapat dipahami bila dihubungkan dengan yang terjalin antara pemimpin kelasykaran dan pengurus PUSA yang berkedudukan di Pidie, tambahan lagi kekuatan API yang belum begitu tangguh dalam memperlihatkan jalinan kerja sama yang baik dengan badan-badan kelasykaran.

Kecurigaan itu mengacu kepada suatu konflik seperti yang telah terjadi antara Asisten Residen Pidie dengan satu lasykar BPI (Barisan Pemuda Indonesia) pada waktu pengibaran bendera Merah Putih di Sigli, demikian juga halnya dengan peristiwa yang sama antara satuan BPI dengan uleebalang Cumbok di Lam Meulo (sekarang Kotabakti).⁴⁵

Insiden Sigli dan Lam Meulo itu menimbulkan reaksi luas baik dari kalangan ulama maupun kelasykaran, yang mereka tafsirkan sebagai perlawanan terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Sebaliknya para uleebalang di Pidie merasa dirinya terancam oleh reaksi keras dari pihak ulama dan kelasykaran. Tambahan lagi

persekutuan yang terjadi dan tidak kesesuaian pendapat antara sebagian golongan mereka (Teuku Nyak Arief., Teuku Panglima Polem Muhammad Ali dll) dengan para lasykar dalam kedua kasus tersebut.

Sehubungan dengan situasi yang dianggap genting itu, Teuku Umar Keumangan, Beureunun mengambil inisiatif untuk melaksanakan pertemuan uleebalang pada tanggal 22 Oktober 1945 di Beureunun, Pidie. Pertemuan itu membicarakan masalah konsolidasi kekuatan dan menggalang hubungan sesama para elite uleebalang tampaknya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal itu tampak pada ketidak-hadiran beberapa orang diantara mereka. Dengan demikian menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan kepentingan dari masing-masing uleebalang.⁴⁶

Walaupun ada beberapa uleebalang di daerah Pidie yang tidak menghadiri pertemuan itu, tetapi mereka berhasil menentukan sikapnya untuk mengantisipasi suasana revolusioner yang sedang berkembang di daerah Aceh pada umumnya dan di Kabupaten Pidie khususnya. Sikar tersebut tercermin dari kebulatan sikap mereka akan menghadapi segala ancaman yang datang dari pihak manapun secara bersama. Oleh karena itu diputuskan pembentukan Markas Uleebalang dan barisan ketentaraan yang di beri nama Barisan Penjaga Keamanan. Markas tersebut berkedudukan di Lam Meulo (sekarang Kota Bakti) dan dipimpin oleh Teuku Sri Muda Pahlawan Bentara Cumbok Muhammad Daud (Uleebalang V Mukim Cumbok, Lam meulo).⁴⁷

Barisan Penjaga keamanan tersebut terdiri atas tiga kesatuan, yang masing-masing mempunyai tugas khusus. Ketiga satuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barisan Cap Bintang, dengan tugas utama menghadapi perlawanan rakyat yang menentang kekuasaan para uleebalang.
2. Barisan Cap Sauh, dengan tugas utama dibidang keuangan untuk membiayai gerakan.
3. Barisan Cap Tombak, dengan tugas utama menangkap para pemimpin rakyat yang menentang mereka.⁴⁸

Pada tanggal 25 Oktober 1945 Markas Uleebalang mulai menggerakkan tentaranya untuk menangkapi anggota BPI/PRI yang bertugas sebagai anggota keamanan pada Kantor Pos dan Kantor Telepon di Lam Meulo. Kemudian pada tanggal 3 Nopember 1945 beberapa yang dianggap lawan ditangkap dan pada tanggal 8 Nopember 1945 Kantor BPI/PRI di Lam Meulo direbut, sehingga anggota organisasi itu terpaksa menyingkir dari sana. Dengan demikian daerah Lam Meulo dan sekitarnya berhasil dikuasai oleh Markas Uleebalang.

Perlakuan yang diterima oleh satuan lasykar BPI/PRI di Lam Meulo telah menggelisahkan Pemerintah Daerah di Kutaraja. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi reaksi yang serupa dari pihak ulama, pemuda, dan masyarakat biasa. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Aceh mengirim utusan ke Lam Meulo dalam usahanya untuk menyelesaikan persengketaan secara damai. Utusan itu tidak ditanggapi oleh Markas Uleebalang, bahkan utusan Pemerintah Daerah itu diperlakukan secara tidak wajar.⁵⁰

Setelah wilayah Lam Meulo berhasil dikuasai sepenuhnya, Markas Uleebalang merencanakan untuk menduduki kota Sigli. Pada tanggal 25 Nopember 1945, sekitar jam 12 malam BPK memasuki kota itu, dengan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh senjata dari tentara Jepang yang pada waktu itu masih menduduki kota itu. Selain itu barisan rakyat dibawah komando pemuda, terutama dari PRI, juga memasuki kota untuk mencegah jatuhnya senjata dari ditangan Jepang kepada pihak Markas Uleebalang.⁵¹

Untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar antara kedua lasykar tersebut, pihak TKR menawarkan jasa baiknya agar pihak Jepang mau menyerahkan senjata kepada TKR. Tawaran ini ditolak oleh Jepang dan menegaskan bahwa pemerintah pendudukan Jepang masih terikat perjanjian dengan sekutu.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Jepang menyerahkan sebagian senjata kepada satuan lasykar BPK. Oleh karena itu terjadi bentrokan senjata antara kedua lasykar itu pada permulaan Desember 1945. Bentrokan yang berlangsung antara BPK dan PRI akhirnya dapat dihentikan oleh pemerintah daerah melalui TKR, pada tanggal

6 Desember 1945. Ada pun jalan yang ditempuh untuk itu yaitu dengan pengosongan kota Sigli oleh kedua lasykar, penyerahan keamanan kota Sigli kepada TKR dan penyerahan senjata kepada TKR.

Kemudian pada tanggal 10 Desember Markas Uleebalang untuk kedua kalinya mengadakan pertemuan di kediaman Teuku Laksamana Umar Uleebalang Nyong, di Luengputu. Dalam pertemuan itu berhasil ditetapkan suatu keputusan yaitu, Markas Uleebalang harus bertindak lebih tegas lagi untuk menangkap dan membunuh para pemimpin yang menentang gerakan mereka, dan diharapkan akhir Desember 1945 rencana ini sudah dapat dilaksanakan.⁵²

Sehubungan dengan keputusan pertemuan Luengputu itu, maka Tentara Markas Uleebalang, BPK segera bertindak. Mereka mulai melepaskan tembakan terhadap kampung yang diperkirakan sebagai tempat pemusatan kekuatan lawan mereka. Pada tanggal 16 Desember 1945 BPK menembaki kampung-kampung di sekitar Luengputu dan Metareum yang selama ini menjadi pemusatan tokoh-tokoh PUSA dan PRI. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1945 mereka membakar gedung sekolah agama di Titeu serta kantor-kantor kehakiman di beberapa tempat.⁵³

Kejadian itu mendorong Teungku Muhammad Daud Beureuah untuk membawakan tindakan Markas Uleebalang tersebut ke forum Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, akan tetapi tidak mendapat tanggapan. Peristiwa ini juga segera dilaporkan kepada T.T. Mohd. Said, Asisten Residen Pidie di Sigli. Untuk itu beliau mengadakan penyelidikan di tempat perkara. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut dikemukakan bahwa Teuku Daud Cumbok bukan dengan sengaja menembaki Metareum, akan tetapi hanyalah efek samping suatu latihan.

Untuk menghadapi tindakan Markas Uleebalang yang semakin meningkat itu, para pemimpin rakyat yang terdiri dari PUSA, Pemuda PUSA, PRI dan lain-lain, mulai mengkonsolidasi diri secara lebih terpadu. Pada tanggal 22 Desember 1945 mereka membentuk suatu badan perjuangan rakyat yang dinamakan Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) dengan tempat kedudukan sementara di Garot dan kemudian dipindahkan ke kota Sigli. Organisasi ini mendapat sambutan dari

rakyat. sehingga di seluruh Aceh didirikan barisan-barisan perjuangan yang tunduk di bawah komando MBRU itu. Perkembangan itu merupakan suatu tantangan bagi Markas Uleebalang. Oleh karena itu mereka lebih meningkatkan lagi serangan-serangannya tanggal 30--31 mereka kembali menyerang Metareum dan kampung-kampung sekitarnya yaitu Ilot, Lagang, Lala, Pulo Kameng, sehingga kampung-kampung tersebut dan kampung sekitarnya mengalami kerusakan berat.⁵⁴

Oleh karena itu, Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk kesekian kalinya membawa persoalan ini dalam komite Nasional Indonesia Daerah Aceh dengan memperlihatkan barang bukti berupa pecahan-pecahan peluru mortir kepada Wakil Ketua Tuanku Mahmud dan anggota Sutikno Padmo Sumarto.⁵⁵

Bersamaan dengan tindakan-tindakan Markas Uleebalang itu, Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) mulai bergerak yang diawali oleh sebuah maklumat yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Ada pun isi maklumat tersebut adalah sebagai berikut :

Saudara-saudara kaum Muslimin!

Perjuangan kita sekarang adalah untuk menghapuskan segala kejahatan dan pengkhianatan tanah air. Oleh karena itu, maka kami harap janganlah kejahatan itu terbit dari kita!

1. Jangan membakar rumah siapa pun yang punya.
2. Jangan mengambil harta orang walau pun tidak berharga.
3. Segala orang yang ditangkap mesti diperlakukan dengan baik.
4. Jangan sekali-kali memukul musuh yang telah ditawan, karena Allah tidak akan menolong orang-orang yang kejam dan tidak menerima doa mereka.⁵⁶

Dengan demikian maklumat itu merupakan suatu seruan yang secara psikologis menarik simpati rakyat tetapi sebelumnya, dilupakan oleh Markas Uleebalang. Kekacauan tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah Lam Meulo, Beureuneum, dan Luengputu, tetapi meluas hampir ke seluruh daerah Aceh Pidie, mulai dari Meureudu pada perbatasan Aceh Utara sampai daerah uleebalang XII Mukim Pidie pada perbatasan Aceh Besar.

Dengan melihat keadaan sudah demikian parahnyanya, maka pada tanggal 6 Januari 1946 Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh mengadakan sidangnya yang pertama untuk membahas situasi di Pidie. Sidang ini dihadiri oleh segenap anggota Markas Umum kecuali Pesindo dan Mujahidin.⁵⁷

Kemudian pada tanggal 8 Januari Markas Umum mengadakan sidangnya yang kedua. Ada pun tokoh-tokoh yang hadir dan berperan dalam memberikan pendapat, serta membuat laporan, yaitu : Ketua Markas Umum (Syamaun Gaharu, dari TKR), Teungku Muhammad Daud Beureueh dari Mujahidin, Ali Hasjmi dari Pesindo, Ismail Yakob adalah seorang tokoh PUSA, tetapi di sini mewakili PNI) serta Husin Yusuf dan Teuku Muhammad Syah, yang keduanya mewakili TKR. Setelah sidang selesai, maka pada tanggal 8 Januari itu juga Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh bersama dengan Markas Umum Daerah Aceh mengeluarkan maklumat dan ultimatum yang ditujukan kepada Markas Uleebalang di Lam Meulo. Kedua pernyataan ini ditandatangani oleh Wakil Residen Aceh Teungku Panglima Polem Mohammad Ali dan Syamaun Gaharu, selaku ketua markas Umum daerah Aceh.⁵⁸

Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa segala perusuh yang bertindak di Luhak Pidie yang berpusat di Cumbok adalah pengkhianat tanah air (musuh Negara Republik Indonesia) dan menghimbau bagi orang-orang yang telah terpengaruh agar menghindari diri dari mereka, kalau tidak mereka akan dihukum sesuai dengan kesalahannya. Sedangkan ultimatum yang mengiringi Maklumat itu, isinya menyerukan kepada kelompok Cumbok agar menyerah pada siang hari tanggal 10 Januari atau "akan ditundukkan dengan kekerasan".⁵⁹

Ultimatum yang telah dikeluarkan Pemerintah tidak diperhatikan sama sekali oleh pihak Markas Uleebalang. Aksi-aksi mereka bertambah meningkat terutama sekali di Lam Meulo, Keumala, Beurenun Luengputu, Panteraja, Trieng Gadeng, dan Meureudu. Ada dua faktor yang menyebabkan Markas Uleebalang menolak untuk menyerah. Pertama, kepercayaan akan menang perang sangat tinggi, karena persenjataan yang dimilikinya jauh lebih kuat, bila dibandingkan dengan TKR dan Markas Rakyat Umum (MBRU).

Kedua, hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, yaitu sebagai pengkhianat dan musuh Negara bahkan dipertegas lagi oleh kelompok lawannya, sebagai kaki tangan NICA, pengkhianat bangsa dan agama kelihatannya terlampaui berat dirasakan mereka dan besar sekali konsekwensinya.

Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan itu mereka menduga setelah menyerah akhirnya juga mereka setidak-tidaknya pemimpin-pemimpin mereka akan dihadapkan ke "pengadilan revolusi" sesuai dengan suasana pada waktu itu; karena itu mereka bertekad lebih baik meneruskan perlawanan dan mati di medan pertempuran.⁶⁰

Setelah batas waktu yang ditentukan berlalu, maka TKR yang didukung oleh barisan rakyat yang berada dibawah komando MBRU (markas Besar Rakyat Umum) mulai bertindak menghancurkan kekuatan perang Markas Uleebalang. Dalam kegiatan ini barisan Mujahidin dan barisan rakyat lainnya sangat berperan apabila dibandingkan dengan TKR sebagai tentara resmi. Seperti yang dikemukakan oleh Anthony Reid bahwa tentara resmi tidak lebih dari hanya menjalankan peranan tanda ikut serta saja dalam pertempuran di Lam Meulo. Bantuan yang lebih penting datang dari Seulimeum dalam bentuk barisan Mujahidin yang lengkap persenjataan.⁶¹ Satu demi-satu kota-kota, seperti Meureudu, Luengputu, Beureuneun dan lain-lain, dalam waktu yang relatif singkat berhasil diamankan dari para pengikut Markas Uleebalang. Kemudian seluruh kekuatan difokuskan ke Lam Meulo yang belum dapat dikuasai. Pada tanggal 12 Januari 1946 dilakukan serangan umum terhadap kota tersebut, yaitu benteng Markas Uleebalang yang terkuat, Serangan umum itu dilakukan dari empat arah, yaitu dari Barat, jurusan Glee Gapui, serangan dilancarkan oleh barisan Mujahidin dari Garot dan Seulimeum di bawah pimpinan Hasan Ali, dibantu oleh Hasan Saleh, Hasballah Daud, dan Teuku Ubit. Barisan rakyat ini mempergunakan senjata-senjata ampuh yang didatangkan dari Kutaraja, seperti meriam Howitzer. Dari selatan yaitu dari Titeu serangan dilakukan oleh barisan rakyat dari Tangse dan Padang Tiji di bawah pimpinan Ayah Daud Tangse, dan Muhammad Juned Afandi. Dari Timur yaitu dari jurusan Pulo Drien serangan dilancarkan dari sayap kiri barisan rakyat yang datang dari Bireun di bawah pimpinan Nyak Hasan bersama Teuku

Haji Zainul Abidin, Haji Taher Muhammad, Tahir Geureugoh, Said Umar, dan Tgk. Hasan Geuleumpang Dua. Dari Utara yaitu dari jurusan Mali menyusur jalan raya Beureuneun Lam Meulo, sayap kiri, terdiri dari pasukan-pasukan Raja Uma, Nyak Ishak, Daud Hasan dan lain-lain. Sedangkan sayap kanan terdiri dari pasukan Polisi Istimewa yang didatangkan dari Kutaraja dan TKR dari Sigli di bawah Pimpinan Inspektur Abdurrahman.⁶² Dengan demikian terjadilah pertempuran sengit berkecamuk sepanjang hari akhirnya pada tanggal 13 Januari 1946 Barisan Rakyat dan TKR berhasil merebut kota kedudukan Markas Besar Uleebalang itu, walaupun selama ini tentara mereka Barisan Penjaga Keamanan (BPK) dengan sekuat tenaga telah mempertahankannya.⁶³

Teuku Daud Cumbok sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa itu dan lebih dari 90 orang pengikutnya lari masuk hutan, dengan maksud untuk meneruskan perlawanan secara bergerilya. Tetapi barisan rakyat dan pasukan pemerintah segera memburunya. Akhirnya pada tanggal 16 Januari 1946 Teuku Daud-Cumbok bersama dengan pengikutnya berhasil ditangkap di atas Gumung Seulawah Jantan oleh barisan rakyat dari Seulimeum yang dipimpin oleh Teungku Ahmad Abdullah.⁶⁴ Mereka yang tertangkap itu terutama para pemimpin mereka, dibawa ke Sigli, lalu ke Sanggeue untuk diminta berbagai keterangan sehubungan dengan kegiatan mereka selama ini; dan selanjutnya untuk diadili. Kemudian untuk lebih diketahui dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat bahwa gerakan Markas Uleebalang telah berhasil dipatahkan, maka pada tanggal 17 Januari 1946 sekali lagi Markas Rakyat Umum (MBRU) mengeluarkan sebuah Maklumat. Pada dasarnya isi maklumat, yang diberi nama “Maklumat Penjelasan” itu merupakan kelengkapan penjelasan dari maklumat terdahulu.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa salah satu faktor yang mempercepat kekalahan kelompok pengikut Markas Uleebalang, walaupun mereka kuat dibidang persenjataan, tetapi tindakan-tindakan mereka tidak terkoordinir dengan sistematis. Mereka bergerak di daerahnya masing-masing dan hubungan antara daerah uleebalang dapat dikatakan putus sama sekali.

Sedangkan pihak Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) meskipun lemah di bidang persenjataan, mereka mempunyai kekuatan yang cukup untuk mendapatkan kemenangan, yaitu dukungan rakyat dari segenap lapisan masyarakat. Kekuatan rakyat dengan mudah dapat diperoleh oleh MBRU itu karena sebagian besar anggotanya, terdiri dari lasykar rakyat yang dipimpin oleh para ulama. Para pemimpin lasykar rakyat itu menggunakan simbol-simbol keagamaan dan kemerdekaan dalam rangka menarik perhatian dan pengaruh dari sebagian rakyat. Dengan mengemukakan simbol-simbol keagamaan dan kemerdekaan, pihak lasykar memandang gerakan mereka sebagai tugas suci keagamaan, Untuk menguatkan gerakan mereka, pihak lasykar tidak segan-segan mencetuskan fatwa-fatwa yang diperoleh dari beberapa orang ulama. Reaksi yang ditampilkan oleh para anggota Barisan Penjaga Keamanan (BPK) seperti penganiayaan kepada ulama dari pihak lasykar dan tembakan yang mereka lakukan terhadap bangunan keagamaan, sepenuhnya dipergunakan pihak lasykar untuk membuktikan kebenaran tuduhan mereka.⁶⁶

Penumpasan terhadap gerakan Cumbok itu rupanya belum memuaskan bagi sebagian pemimpin barisan kelasykaran di Idi, termasuk Teungku Amir Husin Al Mujahid sendiri, yang pada waktu sebelumnya adalah ketua pemuda PUSA. Menurut penilaian mereka perebutan Markas Uleebalang di Lam Meulo dan penghancuran kekuatannya di berbagai tempat dalam wilayah Pidie oleh TKR dan MBRU tidak sempurna. Mereka berpendapat masih ada para pengikut Markas Uleebalang yang tetap duduk dalam badan badan pemerintahan, tidak saja di Pidie bahkan di seluruh daerah Aceh. Oleh karena itu mereka memandang revolusi sosial belum lagi selesai dan masih perlu dilanjutkan untuk menyingkirkan tokoh-tokoh yang menurut anggota mereka "berbahaya" bagi keutuhan dan kelanjutan pemerintah Republik Indonesia. Untuk melaksanakan rencana tersebut ia membentuk satuan lasykar khusus yang dikenal dengan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) pada bulan Januari 1946, dan mengadakan hubungan dengan Mayor Husin Yusuf, ajudan Staf Umum Divisi V TRI, yang pada waktu itu atas izin Komandan Divisi, Kolonel Syamaun Gaharu, berada di Bireun. Dalam pertemuan itu telah dibahas berbagai persoalan yang berhubungan dengan rencana yang akan

digerakkan itu. Kedua tokoh itu sependapat mengenai perlunya dilancarkan revolusi sosial tahap kedua di Daerah Aceh.⁶⁷

Setelah rencana mereka matang, pada awal Pebruari 1946 mereka melancarkan gerakannya dengan sasaran pertama adalah wilayah Aceh Timur sendiri. Di daerah ini terutama di Idi, Langsa dan Kuala Simpang telah ditangkap beberapa orang uleebalang, diantaranya Teuku Abdullah Paloh, Teuku Ali Basyah, Teungku Arifin, dan Teungku Sulong diturunkan dari jabatan mereka baik sebagai *zelfbesturder* maupun sebagai *kotroleur* atau asisten residen. Sebagai penggantinya ditunjuk orang-orang yang mereka anggap revolusioner, seperti Abdullah Hussain dan Teuku Muhammad Daud Syah. Masing-masing ditunjuk sebagai *Wedana* dan *Asisten Residen*.⁶⁸

Selanjutnya TPR bergerak menuju ke Aceh Utara. Di sana satuan lasykar TPR Teungku Amir Husin Al Mujahid berhadapan dengan lawannya yang tangguh, yaitu lasykar Teuku Ibrahim Panglima Agung, di Cunda, Ilokseumawe. Sehingga terjadi bentrokan fisik antara kedua lasykar tersebut⁶⁹, yang masing-masing ingin mempertahankan kedaulatannya. TKR tidak mampu mengalahkan Teuku Ibrahim Panglima Agung itu sehingga terpaksa meminta bantuan lasykar Mujahidin dari Teungku Muhammad Daud Bereueh untuk mengakhiri perlawanan yang diberikan oleh pasukan Teuku Ibrahim tersebut.⁶⁹

Setelah berhasil mengalahkan perlawanan lasykar Teuku Ibrahim, maka langkah berikutnya dari gerakan TPR adalah daerah Pidie, pusat gerakan Markas Uleebalang yang dihancurkan itu. Dapat dikatakan dalam tiap operasinya itu TPR selalu mendapat tambahan pengikut di tempat-tempat yang disinggahi, sehingga waktu mereka sampai di Aceh Besar dan Kutaraja, kekuatannya sudah cukup besar. Menurut Anthony Reid, ketika Husin Al Mujahid mencapai Seulimum pada akhir Februari dengan kekuatan seribu orang dan alat pengangkutan sebanyak 50 truk.⁷⁰ Setelah pasukannya diperkuat dengan sejumlah anggota Kesatria Pesindo dari Kutaraja mereka bergerak pula menuju pesisir Barat dan Selatan Aceh dalam rangka menyelesaikan tugasnya yang terakhir.⁷¹

Di Kutaraja pasukan Teungku Amir Husin Al Mujahid terus juga melancarkan langkah-langkah koreksi terhadap para pemimpin pemerintahan dan Tentara. Oleh karena selain melakukan penangkapan terhadap Teungku Husin Trumon (Asisten Residen Aceh Besar), Pemimpin TPR itu menuntut agar Teuku Nyak Arief mengundurkan diri, baik sebagai Residen Aceh, maupun sebagai anggota Staf Umum TRI Komandemen Sumatera., Selain dari itu mereka juga menuntut agar Kolonel Syamaun Gaharu meletakkan jabatannya sebagai Komandan Divisi TRI Aceh (Divisi V Sumatera).

Demi untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa dan untuk tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih besar lagi, maka Teuku Nyak Arief dan Syamaun Gaharu bersedia meletakkan jabatannya. Pada awal bulan Maret 1946 Teuku Nyak Arief menyerah terimakan jabatan Residen Aceh kepada Teuku Chik Muhammad Daudsyah, Uleebalang Idi Rayeuk yang sudah lama menjadi anggota PUSA yang setia. Sedangkan jabatan Teuku Nyak Arief sebagai anggota Staf Umum TRI Komandemen Sumatera dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler, diserahkan bersama dengan pangkatnya kepada Teungku Amir Husin Al Mujahid, pimpinan TPR. Teuku Nyak Arief kemudian diasingkan ke Takengon dan pada tanggal 14 Mei 1946 meninggal dunia di sana. Selanjutnya setelah Staf Divisi TRI mengadakan pertemuan di rumah kediaman Teuku Panglima Polem Muhammad Ali (Wakil Residen Aceh), Kolonel Syamaun Gaharu juga menyerahkan jabatannya kepada Mayor Husin Yusuf Ajudan Staf Umum Divisi. Perubahan perubahan ini dilakukan atas kehendak rakyat yang diwakili Tentara Perjuangan, demikian dinyatakan dengan tegas.⁷²

Pada akhir April 1946 Tengku Amir Husin Al Mujahid sendiri menjadi korban sebuah komplotan yang tersinggung dengan perlakuan mereka, yang dianggap tidak wajar terhadap para pemimpin yang selama ini dinilai oleh rakyat besar jasanya dalam membina Negara Republik Indonesia di daerah Aceh. Dia diculik dari Hotel Aceh di Kutaraja, kemudian dibawa ke Sigli dan diserahkan kepada Teungku Abdulwahab Seulimum, seorang tokoh besar Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) yang pada waktu itu telah ditunjuk sebagai pejabat Bupati Kabupaten Pidie. Di Sigli Teungku Amir Husin Al

Mujahid. direncanakan oleh kelompok yang menculiknya akan dipertemukan dengan Syamaun Gaharu untuk diminta penjelasan dan mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakan selama ini. Tetapi rencana itu berhasil digagalkan oleh para pengikutnya, sehingga ia selamat dari bahaya yang sedang mengancamnya.⁷³

Setelah peristiwa penculikan Teungku Amir Husin Al Mujahid, maka berakhir pula revolusi sosial di daerah Aceh. Bersamaan dengan aksi tersebut diadakanlah perubahan-perubahan dalam struktur pemerintah, sehingga terbentuk suatu pemerintahan baru yang lebih demokratis. Meskipun demikian kegelisahan dalam masyarakat Aceh belum berakhir, seperti munculnya usaha-usaha dari anasir-anasir yang tidak berhak untuk mengambil harta peninggalan pihak uleebalang yang telah dikalahkan itu. Sehubungan dengan harta peninggalan mereka, Pemerintah Daerah Aceh, pada tanggal 24 Juni 1946 telah mengeluarkan Peraturan Daerah No-1/1946, yaitu: "Peraturan Tentang Menguasai atau Memiliki Harta Benda Peninggalan Uleebalang-Uleebalang Aceh."⁷⁴

Sehubungan dengan Peraturan Daerah No.1/1946 itu, maka para ulama tampil sebagai pelaksana utama dalam usaha penyelesaian persoalan-persoalan yang berhubungan dengan harta peninggalan uleebalang. Hal ini tampak dalam peraturan itu (pasal 1) dikemukakan, untuk menyelesaikan masalah tersebut., Pemerintah Daerah di tugaskan untuk membentuk Majelis Penimbang yang kemudian dibentuk oleh Pemerintah Daerah itu, adalah sebagai berikut : sebagai ketua I, II, III, IV, V dan VI, masing-masing ditunjuk, Teungku Abdulwahab Seulimum, M.Husein, Teungku Haji Mustafa Ali, Hasan Ali, Teuku Muhammad Amin, dan Teungku Itam Peureulak; sedangkan Panitera umum ditunjuk Teungku Nyak Umar.⁷⁵

Catatan

1. T. Ibrahim Alfian, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia Di Aceh*. Banda Aceh : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1982. halaman 29.
2. T.A. Talsya, *Batu Karang Ditengah lautan: Perluangan Kemerdekaan di Aceh 1945 -- 1946*, Buku I. Banda Aceh: lembaga Sejarah Aceh, 1990, halaman 17.
3. *Ibid.*, halaman 17.
4. *Ibid.*, halaman 19.
5. Abdullah Ali, *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh dalam Perang Kemerdekaan 1945 -- 1949*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1984, halaman 167
6. Insider, *Aceh Sepintas Lalu*. Jakarta:-Fa. Archapada, 1950, halaman 29
7. T.A. Talsya, buku I. *Op.Cit.*, halaman 92.
8. T.M.A. Panglima Polem, *Memoir*. Kutaradja: Alhambra, 1972, halaman 9.
9. A. Hasjmy, *Semangat Merdeka*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985, halaman 203.
- 10: T.A, Talsya, buku I, *Op. Cit*, halaman 132--133.

11. *Ibid.*, halaman 203.
12. *Ibid.*, halaman 152
13. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 52.
14. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 258.
15. T.A. Talsya, *Modal Perjuangan Kemerdekaan : Perjuangan Kemerdekaan di Aceh 1947 -- 1948, Buku II.* Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1990, halammam 160.
16. Tgk.. A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area.* Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001, 1992, halaman 163.
17. Sejarah Militer Kodam-I/Iskandar Muda, *Dwi Windu Kodam I/ Iskandar Muda.* Kutaraja, 1972, halaman. 124.
18. T.A. Talsya, *Sekali Republikein Tetap Republikein: Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh 1949,* Buku.III. Banda Aceh Lembaga Sejarah Aceh, 1990, halaman 132.
19. Tgk. A. K. Jakobi, *Op., Cit.*, halaman 188.
20. M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh : Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh.* Jakarta : Gunung Agung, 1986, 49.
21. Tgk. A.K. Jakobi, *Op. Cit.*, halaman 190
22. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 330.
23. Sedam I/Iskandar Muda,, *Op. Cit.*, halaman 152.
24. *Ibid.*
25. Muhammad Ibrahim,, et. al, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.* Jakarta: P3KD, Departemen P dan K, 1978, halaman 174.
26. T.A. Talsya, buku III, *Op. Cit.*, halaman 76.
27. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 141.
28. Ismuha, *Proses Pendidikan Agama di Aceh.* Banda Aceh: KAN WIL Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1976, halaman 13.

29. C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti, 1993, halaman 259--260.
30. Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990, halaman 35.
31. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 36.
32. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 210.
33. Mardanas Safwan, *Pahlawan Nasional, Mayjen. Teuku Nyak Arif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, 1976, halaman 106.
34. *Ibid.*, halaman 101.
35. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 36.
36. *Ibid.*, halaman 40.
37. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 194.
38. *Ibid.*, halaman 195.
39. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 63.
40. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 321--322.
41. A. Hasjmy, *Op. Cit.*, halaman 157.
42. *Ibid.*, halaman 158.
43. *Ibid.*
44. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 233.
45. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 67.
46. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 234
47. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 68
48. S. M. Amin, *Kenang-Kenangan Dari Masa Lampau*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, halaman 132.
49. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 236.
50. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 69.

51. *Ibid.*, halaman 70.
52. S.M. Amin., *Op. Cit.*, halaman 135.
53. M. Nur El Ibrahimy, *Op. Cit.*, halaman 102.
54. *Ibid* halaman 103
55. Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, halaman 338.
56. M. Nur El Ibrahimy, *Op. Cit.*, halaman 103.
57. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 73.
58. Anthony Reid, *Op. Cit.*, halaman 336.
59. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 74.
60. Anthony Reid, *Op. Cit.*, halaman 337.
61. M. Nur El Ibrahimy, *Op. Cit.*, halaman 109.
62. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 74.
63. M. Nur El Ibrahimy, *Op. Cit.*, halaman 111.
- 64.. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 243.
65. T. Ibrahim Alfian., *Op. Cit.*, halaman 76.
66. *Ibid.*
67. Anthony Reid, *Op. Cit.*, halaman 343.
68. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 247.
69. Anthony Reid, *Op. Cit.*, halaman 334.
70. Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 248.
71. C. Van Dijk, *Op. Cit.*, halaman 266. Lihat juga Eric Morris, "Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam", dalam Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990, halaman 103.
72. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 80.

73. H.T.M. Amin, *Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh*. Banda Aceh: Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh & Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1976, halaman 7. Lihat juga Abdullah Ali, *Op. Cit.*, halaman 253
74. T. Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, halaman 81.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alim ulama merupakan salah satu kelompok pemimpin informal yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh. Keberadaannya telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Masyarakat menyebutnya dengan nama *Teungku*, *Teungku Chiek*, *Abu* dan *Abon*.
2. Sebagai pemimpin informal, peranan alim ulama ini dalam masyarakat cukup besar dan sangat disegani. Apa yang dikatakan atau difatwakan oleh mereka, lebih didengar dan dipatuhi oleh masyarakat dari pada apa yang dikatakan oleh pemimpin formal lainnya.
3. Ulama tersebut adalah aparat pendamping dan penasehat para umara atau pemimpin adat dalam melaksanakan pemerintahan, khususnya dalam memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut dengan bidang hukum Islam. Ulamalah yang membantu atau memberikan nasehat kepada Sultan,, Panglima Sagi, Uleebalang, Kepala Mukim dan Keuchiek (kepala desa).

4. Selain sebagai penasehat pimpinan pemerintahan (penguasa), para ulama di Aceh juga mempunyai tugas-tugas lain, yaitu: membina atau mengasuh pengajian anak-anak di meunasah-meunasah, menyelesaikan sengketa sesama warga kampung bersama *Keuchiek* dan *Tuha Peut*, mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan warga masyarakat seperti memandikan jenazah, membuka kuburan, membaca do'a di kuburan (talkin mayat), mengurus masalah faraid (pembagian harta warisan), dan berbagai aktivitas sosial lainnya.
5. Sejarah telah menunjukkan bahwa hubungan kerjasama yang baik antara ulama dan umara sesuai dengan istilah "adat bak Poteumeuruhom dan hukom bak Syiah Kuala", sehingga telah dapat menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.
6. Peranan para alim ulama di Aceh dalam memotivasi rakyat untuk berjuang melawan kaum penjajah sudah kelihatan sejak perang Belanda di Aceh dengan ideologi perang sabil. Mereka tidak berhenti ketika kesultanan Aceh runtuh atau tunduk kepada penjajah Belanda. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, para ulama Aceh mengkonsolidasikan diri untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Sewaktu berita proklamasi kemerdekaan sampai ke daerah Aceh, para alim ulama melalui organisasi PUSANYA tanpa ragu-ragu menyatakan dukungannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan itu. Bahkan setelah kemerdekaan pun para ulama ini masih memberikan andil yang sangat besar dalam membangkitkan semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan penjajah Belanda.

5.2 *Saran-Saran.*

1. Keterpaduan antara ulama dan umara dalam mengayomi masyarakat perlu ditingkatkan dan dilestarikan. Hubungan kerja sama yang saling menunjang dan saling memperkuat akan terwujud apabila dapat dibina suatu persepsi yang sama

berdasarkan idiologi Pancasila dan UUD 1945 serta perundang-undangan yang berlaku.

2. Ulama yang menjadi panutan masyarakat harus mampu mengembangkan diri, tidak terperangkap pada sifat premordial yang sempit, sehingga lebih mampu mengayomi masyarakat yang taat dalam beragama dan berwawasan kebangsaan, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Umara sebagai abdi negara dan masyarakat juga harus kuat, bersih dan berwibawa dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga secara bertahap dapat mengurangi berbagai kepincangan yang ada dalam masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Mengingat begitu besarnya peranan dan sumbangan tenaga para alim ulama dalam usaha memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, maka sudah sepantasnya pemerintah memberikan penghargaan terhadap jerih payahnya dalam bentuk gaji/honor atau subsidi lainnya sebagaimana pemimpin formal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adnan, *Kebudayaan Suku-Suku Bangsa di Daerah Aceh, Banda Aceh* : LPM Unsyiah, 1994.
- Abdullah, Taufik (Ed.). *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- , *Islam dan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES,,1987.
- A.K. Baihaqi, “Peranan Ulama Dalam Masyarakat Tradisional Aceh”, dalam Taufik Abdullah (Ed.). *Agama dan Perubahan Sosial* : Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Alfian, “Cendikiawan dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh: Sebuah Pengamatan Permulaan”, dalam Alfian (Ed.), *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: LP3ES, 1997
- Alfian, Teuku Ibrahim, et.al., *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh, Banda Aceh*: Depdikbud, Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1982.
- , *Perang di Jalan Allah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: 1987.
- Ali, Abdullah, et. al., *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Ali Fachry, “*Pasang Surut Peranan Politik Ulama*”, Prisma, Jakarta: LP3ES, 1984.

- Amin, H.T.M., *Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh*, Banda Aceh: Kanwil Depdikbud Aceh dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Aceh, 1976.
- Amin, S.M., *Kenang-Kenangan Dari Masa Lampau*, Jakarta: Pradnya Paramits, 1978.
- El Ibrahim, M. Nur, *Teungku Muhammad Daud Beureueh: Peranan Dalam Pergolakan di Aceh*, Jakarta: Gunung Agung 1986.
- Hasan, Ibrahim, *Pola Hubungan Ulama-Umara Dalam Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Yang Berwawasan Kebangsaan, 1991*. Naskah Pidato Tidak Diterbitkan.
- Hasjmy, A., *Peranan Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta Bulan Bintang, 1976.
- , *Semangat Merdeka*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Hoesein Djajadiningrat, R.A. , *Atjehsch Nederlandsch-Woordenboek*, Batavia: Landsdrukkerij, 1934.
- Ibrahim, Muhammad, *et. al.. Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Depdikbud, 1977/1978.
- Insider, *Aceh Sepintas Lalu*, Jakarta: Fa. Archapada, 1950.
- Ismuha, "Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Atjeh 30 Tahun Yang Lalu", *Sinar Darussalam*, No. 14 dan 15, Djuni, Djuli, 1969.
- , *Proses Pendidikan Agama di Aceh*, Banda Aceh: Kanwil Depdikbud, 1976.
- , "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah", dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983
- Jakobi, Tgk A K; *Aceh Daerah Modal: Long March Ke Medan Area* Jakarta : Yayasan Seulawah RI-001, 1992
- Jongejans, J., *Land En Volk Van Atjeh Vroeget Ennur*, Baarn : Hollandia Holanndia Drukkerij, 1939

- Juynbol, Th. W., "Atjeh", *The Encyclopaeydia of Islam, Vol.I*, 1960.
- Morris, Eric, "Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam", dalam Audrey R. Kahin (Ed.), *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- Piekaar, A.J., *Atjeh En De Oorlog Metjapan*, 1949.
- Polem, T.M.A. Panglima, *Memoir*. Kutaraja: Alhamra, 1972.
- Reid, Anthony, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Rouffaer, G.P. "De Hindoestansche Oorsprong Van Het Negenvouding Sultans Zegel Van Atjeh", *BKI*, 59, 1906.
- Safwan, Mardanas, *Pahlawan Nasional Mayjen Teuku Nyak Arif*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Biografi Pahlawan Nasional 1976.
- Said, Mohammad. *Atjeh Sepanjang Abad*, Jilid I, Medan: PT. Harian Waspada, 1961
- , *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid II, Medan: PT. Harian Waspada, 1985.
- Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, *Dwi Windu I/Iskandar Muda*, Kutaraja, 1972.
- Snouck Hurgronje, C., *De Atjehers*, I, Leiden: E.J. Brill, 1993.
- Talsya, T..A., *Batu Karang di Tengah Lautan: Perjuangan Kemerdekaan di Aceh 1945--1946*, Buku I, Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1990.
- , *Modal Perjuangan Kemerdekaan: Perjuangan Kemerdekaan di Aceh 1947--1948*, Buku II, Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1990.
- , *Sekali Republikein Tetap Republikein: Perjuangan Kemerdekaan di Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1990.

- Tichelman, G.L., "Een Atjehsche Sarakata" . *Afschrijf Van een besluit Van Sultan Iskandar Muda* TBG, 1933.
- Van Dijk, C., *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti, 1993.
- Van Langen, K.F.H., "De' Inrichting Van Het Atjehsche Staatbestuur Onder het Sultanaat", *BKI*, 1888.
- Van't Veer, Paul, *Perang Aceh*, Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985.
- Verslag, *Pertemoean Oelama-Oelama di Sungai Lipah*, Oktober, 1936.
- Vleer, A.J., "De Positie Van Den Toeha Peut Atjehsche Staatbestel", *Kolonial Studien*, 1935.
- Zainuddin, H. M. *Srikandi Atjeh*, Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1966.
- Zamzami, Amran, *Jihad Akbar di Medan Area*. Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

LAMPIRAN I.

Susunan Pengurus Komite Nasional Indonesia (K.N.I) Daerah Aceh.

Ketua : Teuku Nyak Arief, Wakil Ketua Tuanku Mahmud (kemudian menjadi Ketua).

Anggota : 1. Dokter M. Mahjudin, 2. H. M. Zaunuddin, 3. Kamarusid, 4. Oemar Husni, 5. P. Lemahelu, 6. Tgk. Ismail Yakub, 7. Haji Bustaman, 8. Mr. S. M. Amin, 9. Sutikno Padmo Sumarto, 10. Tgk. Abdussalam, 11. Tahmirin Amin, 12. Ir. M. Thahir, 13. Ibrahim, 14. Muhammad ZZ, 15. Osmansyah, 16. Tk. Ali Lam Lagang, 17. Tgk. Abdul Rachman, 18. Muhammad Hanafiah, 19. R. Insun, 20. Ng Suratno, 21. Raden Suwadi, 22. Tuanku Johan Ali, 23. M. Mokhtar, 24. Ahmad Abdullah, 25. Yahya, 26. Saleh, 31. Tgk. Syeh Abdul Hamid, 32. Afan Daulay, 33. Nurdin St. M, 34. Tgk. Zainul Abidin, 35. Mohd. Saridin, 36. Ahmad Binuali, 37. Karim M. Durjat, 38. Abd. Rachman, 39. Abd. Gani, 40. T. Ahmadisyah, 41. O. K. Dahlan, 42. Abdul Syam, 43. A. Munir, 44. Hasyim, 45. Nya' Haji, 46. Nyonya Abdul Azis, 47. Teungku M. Daud. Beureuih, 48. Saleh, 49. Ahmad, 50. Husin Yusuf, 51. Hasymi, 52. Hasan, 53. T. M. Amin, 54. Nyonya Sutikno Padmo Sumarto, 55. Idham, 56. Sayid Abubakar, 57. T. H. M. Jamin, 58. Amelz, 59. Ali Hasan, 60. M. Husin, 61. Sahim Hasyimi, 62. Raja Wahab, 63. Tgk. Suleiman Daud, 64. Tgk. Abdul Wahab, 65. T. A, Hasan.

LAMPIRAN II.

Kantor Gubernur Propinsi

Sumatera

Bah. D o k u m e n t a s i

Bukittinggi

=====

Daftar Pembahagian Daerah
Atjeh tahun 1948, -

Keresidenan Atjeh Terdiri dari :

7 kabupaten
21 kewedanaan
102 negeri

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. Residen | : | Teuku Moehammad Daoedsjah |
| 2. Bupati d/p (Urusan
Pemerintahan Umum) | : | T. M. Amin. |
| 3. Patih d/p (Sekretaris) | : | Oesman |
| 4. Patih d/p | : | Teungkoe Maimoen Habsjah |
| 5. Wedana d/p | : | Said Aboebakar |
| 6. Wedana d/p | : | Nja' Mansoer |
| 7. Wedana d/p (Urusan
Bangsa Asing) | : | Amiroeddin |
| 8. Wedana d/p (Bah. Oto-
nomi) | : | Teungkoe Mahmoed Haroen |
| 9. Wedana d/p | : | Toeankoe Ibrahim |
| 10. Tjamat d/p | : | Zainal Abidin |
| 11. Kepala Tata Usaha | : | M. H o e s i n |
| 12. Penjantun Usaha | : | Potan Harahap |
| 13. Penjantun Usaha | : | T. P a k e h |
| 14. Penjantun Usaha | : | H. Sjamoen |
| 15. Penjantun Usaha | : | T. Alibasjah. |

Kabupaten	Kewedanaan	Tjamat2/Wa- kil Wedana di.	Nama2 Bupati/ Wedana /Tjamat
-----------	------------	----------------------------------	---------------------------------

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Aceh Besar
(Kota Radja) | 1. Kota Radja |
|-------------------------------|---------------|

Teungkoe Zaini
Bakri
Teungkoe Sjech
Marhaban

		1. Kota Radja	Marzoeki
		2. Lho' nga	Teukoe Tjoet Adik
	2. Seulimeum		Ahmad Abdullah
2. Pidie (Sigli)	3. Sabang		Achmad Kamil (Tjamat)
			Teungkoel Abdoel Wahab
	4. Sigli		Teungkoel H. Ibrahim
		3. Sigli	Ibrahim Abdoeh
	5. Kota Bakti		Teukoe Poetih Nja' Abbas
	6. Meoreudoe	4. Meureudoe	Teungkoel Abdoelah.
3. Atjeh Oetara (Lho' Seuma-we)			Teungkoel Soelaiman.
	7. Lho'Seuma-we		Daoed
			Teungku Mohammad Daoed
		5. Lho'Seuma-we	Moehammad Ali Balwi
	8. Bireuen		Moehammad Adam
	9. Lho'Soekon		Teungku Moehammad. Oesman Aziz
		6. Lho'Soekon	Teungku Abdoel Rani
4. Atjeh Timoer (Langsa)	10. Langsa		Teukoe A. Hassan
			Teukoe Abdoel Wahab Dahlawy
		7. Langsa	Teukoe Mohd. Hasby Oesman
	11. Idi		Teukoe Moehammad. Thaib

Kabupaten	Kewedanaan	Tjamat2/Wakil Wedana di	Nama2 Bupati/ Wedana/Tjamat
		8. Idie	Moehamad Karim Arsjad
	12. Tamiang		Ishak Amin
		9. Kwala Sim- pang	Teukoe Moeham- mad Moesa Radja Abdoel Wahab
5. Atjeh Tengah (Takengon)			Moeda Sedang (patih)
	13. Takengon		Moehammad Sa- leh.
	14. Blangke - djeren		Aman Sari
	15. Koetatjane		Chabar Ginting.
			Moehammad Hoe- sin
6. Atjeh Barat (Meulaboh)	16. Meulaboh		Toeankoe Abdoel- lah.
		10. Meulaboh	Teukoe Tjoet Ma mat Radja Adijan.
	17. Tjalang		Amin Saleh
	18. Simeuloer (Sinabang)	11. Tjalang	
7. Atjeh Selatan (Tapaktoean)			Radja Machmoed M. Sahim Hasjimy Abdoel Gafoer
	19. Tapaktoean		Achir.
		12. Blang Pidje	Teungkoe Moenier Byth
		13. Tapaktoean	Moehammad Djoe- ned.
	20. Kakongan		Teuku Teuboh
	21. Singkel	14. Singkel	Moehammad Sjam Moehammad Ilyas B.A.

LAMPIRAN : III.**Susunan Pengurus API di Aceh.**

1. Markas Daerah API Berkedudukan di Kutaradja dengan :
 - Komandan : Syammaun Gaharu
 - Kepala Staf : T. A. Hamid Azwar
 - Sekretaris : Husin Yusuf
 - Anggota : Nyak Neh Rica, Said Usman, Said Ali,
T. M. Daud Samalanga, T. Sarung, Bachtiar Idham, T. Abdullah, Saiman.
2. Wakil Markas Daerah - I (WMD - I) berkedudukan di Kutaradja, di bawah pimpinan Nyak Neh dengan Komandan-komandan pasukannya :
 - Said Ali (Kutaradja), Usman Nyak Gade (Kutaradja), Said Abdullah (Kutaradja), Teuku Manyak (Seulimum).
3. Wakil Markas Daerah - II (WMD - II) berkedudukan di Sigli di bawah pimpinan T. A. Rahman dengan Komandan dan pasukannya :
 - T. Rica (Sigli), Abdul Gani (Sigli), T. Abdulrahman (Lammeulu), Hasballah Haji (Meuredu).
4. Wakil Markas Daerah - III (WMD - III) berkedudukan di Bireuen di bawah pimpinan T. M. Daud Samalanga dengan Komandan pasukannya :
 - Teuku Hamzah (Samalanga), Agus Husin (Bireuen), Husin Yusuf (Bireuen).
5. Wakil Markas Daerah - IV (WMD - IV) berkedudukan di Lho Sukun di bawah pimpinan T. Mohd. Syah/Ibrahim Hatta dengan Komandan pasukannya :
 - Hasbi Wahidi (Panton Labu) Nurdin Hatta, Ajad Musi (Lho' Sukun), A. Gani Dadeh, T. Usman Mahmud (Lho' Seumawe), T. Zulkifli, T. Yacop Muli (Lho' Seumawe).
6. Wakil Markas Daerah - V (WMD - V) berkedudukan di Langsa di bawah pimpinan Bachtiar/ Dahlan dengan Komandan pasu-

- kannya : Ayub (Langsa), Nurdin Sufie (Idi), Daud Malem, B. Nainggolan (Kuala Simpang), Abu Samah, Petua Husin (Langsa).
7. Wakil Markas Daerah - VI (WMD – VI) berkedudukan di Kutacane di bawah pimpinan Muhammad Dien dengan Komandan-komandan pasukannya :
- Bahrum, Maaris Maat, A. Rahim, A. Jalim Umar.
8. Wakil Markas Daerah - VII (WMD – VII) berkedudukan di Meulaboh di bawah pimpinan T. Usman Yacob/T. Cut Rahman dengan Komandan-komandan pasukannya :
- Hasan Ahmad (Meulaboh), Raub, Hamidi Hs. (Suak Timah), A. Hanafiah, T. Gadung, A.K. Jailani (Calang), Indah.
9. Wakil Markas Daerah - VIII (WMD – VIII) berkedudukan di Tapak Tuan di bawah pimpinan M. Nasir/Nyak Adam Kamil dengan Komandan-komandannya :
- Abdullah Sani (Tapak Tuan), H.M. Syarif, Blang Pidie) B. B. Jalal, Nyak Hukum (Bakongan), Iskandar.

LAMPIRAN : IV.

Susunan Pengurus Kelasykaran di Aceh.

1. Divisi Rencong
- a. Pimpinan Divisi :
- Pimpinan Umum : A. Hasymi.
 Komandan Divisi : Nyak Neh Lho'Nga
 Kepala Staf : M. Saleh Rachmany
- b. Resimen - Resimen :
- (a) Resimen Pocut Baren di Kutaradja.
 Komandan : Zahara
 (b) Resimen-I di Kutaradja.
 Komandan : A. Gani Adam

- Kepala Staf : Jarimin
- (c) Resimen-II Sigli.
 Komandan : Putih Mauni, Sigli
 Kepala Staf : Zainuddin Hs.
- (d). Resimen - III Lhok Seumawe
 Komandan : T. Syammaoen Latief
 Kepala Staf : T. Banta Sulaiman
- (e) Resimen- IV Aceh Tengah
 Komandan : M. Zaharuddin, Takengon.
 Wakil : M. Sjukur
 Kepala Staf : Asep Jalil.
- (f) Resimen - V Aceh Timur Langsa.
 Komandan : Tgk. Usman Aziz.
 Wakil : Ismail
- (g) Resimen - VI Aceh Barat.
 Komandan : H. Daud Dariah
 Wakil : T. R . Iskandar.
- (h) Resimen - VII Aceh Selatan.
 Komandan : M. Sahim Hasjmi
 Kepala Staf : A. Gafur Akir.

2. Divisi - X/Tgk. Cik. Ditiro.

- (1) Pimpinan Divisi.
 Komandan : Cek Mat Rachmany
 Kepala Staf : Abdul Muthalib.
- (2) Resimen :
- a. Resimen Aceh Besar di Kutaradja.
 Komandan -
 Resimen - I : Said Usman
 Wakil : ----
 Kep. Staf : ----
- b. Resimen II Aceh Pidie di Sigli.
 Komandan -
 Resimen : Said Usman
 Wakil : Tgk. Amin Syamy
- c. Resimen III Bireuen - Lhok Seumawe - Langsa :
 Komandan -

- Resimen : A. Muthalib, Bireuen
 Wakil ; Tgk. Yusuf Berawang
- d. Resimen IV Aceh Barat di Meulaboh :
- Komandan -
 Resimen : Tgk. Hasan Hanafiah
 Wakil : Tgk. Nyak Cut.
 Kep. Staf : T. R. Idris Putih.
- e. Resimen V Aceh Tengah/Takengon - Kutacane :
- Komandan -
 Resimen : Ilyas Leube, Takengon.
 Kep. Staf : Saleh Adry

3. Divisi Tgk. Cik Paya . Bakong.

- (1). Pimpinan :
- Panglima : Tgk. Amir Husin Al Mujahid.
 Wkl. Panglima
 bhg. Keuangan : Tgk. Makhmud.
 Pelaksana Tugas :
 Panglima : Ajad Musyi.
- (2). Komandan Batalyon Divisi Berani Mati.
- Aceh Timur : Tgk. Usman Pendada.
 Aceh Utara : Tgk. M. Kasim Rasyidi.
 Aceh Tengah : Tgk. Banta Cut/Saleh Adry.
 Aceh Pidie : Tgk. Abdurrachman Buloh.
 Aceh Besar : Tgk. Nyak Sandang.
 Aceh Barat : Said Sulaiman.
 Aceh Selatan : Tgk. Nyak Raja.
- (3). Anggota Staf Perjuangan Rakyat.
- Panglima Revolusi : Tgk. Amir Husin Al Mujahid.
 Wakil Panglima : Tgk. Abu Bakar Amin.
 Kep. Staf : Tgk. Nurdin Sufi.
- (4). Staf Istimewa /Mobilisasi Wanita
- Ibu Maryan.
 Tgk. Aisyah Amin.
 Ti Aman Im Latif.
 Khatijah Aba.
 Dll.

4. Komando TPI Resimen Aceh / Divisi - X TNI.
- (1) Komandan Resimen : A. K. Yacobi
 Wakil : M. Saleh Banta.
 Kepala Staf Umum : M. Hasan Ben.
 Wkl. Kep. Staf : M. Amin Hanafiah.
5. Komando Resimen TRIP (Tentara Pelajar Republik Indonesia).
- Komandan Resimen : Yahya Zamzami
 Staf Inti : T. Yacob Sulaiman.
 : Awaluddin Awai.
 : Alaudin Cut.
 : T. Zaini.
 : T. Sulaiman.
 : Syamsuddin Ishak.
 : T. Samidan.
 : Ilyas N. R.
 : T. Husin.
 : T. M. Nur Arifin.
 : Maemun Saleh.

LAMPIRAN : V.

MAKLUMAT ULAMA SELURUH ACEH.

MAKLOEMAT OELAMA SELOEROEH ATJEH.

Perang Doenia kedoea jang maha dahsjat telah tammat. Sekarang di Barat dan di Timoer oleh 4 Keradjaan jang besar sedang diatoer perdamaian Doenia jang abadi oentoek keselamatan machloek Allah. Dan Indonesia tanah toempah darah kita telah dimakloemkan kemerdekaannja kepada seloeroeh doenia serta telah berdiri Repoeblik Indonesia dibawah pimpinan jang moelia maha pemimpin kita Ir. SOEKARNO.

Belanda adalah satoe keradjaan jang ketjil serta miskin satoe negeri jang ketjil, lebih kecil dari daerah Atjeh, dan telah hantjoer leboer, mereka telah bertindak melakoekean kechianatannja kepada tanah air kita Indonesia jang soedah merdeka itoe. oentoek didjahnja kembali. Kalaoc maksoed jang djahannam itoe berhasil,

maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakjat, merampas semua harta benda negara dan harta rakjat dan dan segala kekajaan jang kita koempoeikan selama ini akan moesnah sama sekali. Mereka akan memperboedak rakjat Indonesia mendjadi hamba-banja kembali menjalankan oesaha oentoek menghapoes agama Islam kita jang soetji serta menindas dan menghambat kemoe-liaan dan kemakmoeran bangsa Indonesia.

Di Djawa bangsa Belanda dan kaki tangannja telah melakoe-kan keganasannja terhadap Kemerdekaan Repoebliek Indonesia hingga terdjadi pertempoeran dibeberapa tempat jang achimja kemenangan berada dipihak kita. Soenggoehpoen begitoe, mereka beloem djoega insaf.

Sege nap lapisan rakjat telah bersatoe padoe dengan patoeh berdiri di belakang maha pemimpin Ir. SOEKARNO oentoek me-noenggoe perintah dan kewadajiban jang akan didjalankan. Menoe-roet kejakinan kami bahwa perdjoeangan ini adalah perdjoeangan sutji jang diseboet "PERANG SABIL". Maka pertjajalah wahai bangsakoe, bahwa perdjoeangan ini adalah sebagai samboengan perdjoeangan dahoeloe di Atjeh jang dipimpin oleh Almarhoem Tengkoeh Tjhi di Tiro dan pahlawan2 kebangsaan jang lain. Dari sebab itoe, bangoenlah wahai bangsakoe sekalian, bersatoe padoe menjoesoen bahoe mengangkat langkah madjoe kemoeka oentoek mengikoet djedjak perdjoeangan nenek kita dahoeloe, toendoeklah dengan patoeh akan segala perintah2 pemimpin kita oentoek keselamatan Tanah Air Agama dan Bangsa.

KOETARADJA, 15 - 10 - 1945.

Atas nama Oelama Seloeroeh Atjeh,

Tgk. Hadji HASAN
Kroeng Kale

Tgk.M. DAOED
Beureueh

Tgk. Hadji Dja'FAR
SIDIK

Lamdjabat

Tgk. Hadji AHMAD
HASBALLAH
Indrapoeri

Diketahoei oleh
Jml. T.B. Residen Atjeh
T. NJA' ARIF

Disetoedjoei oleh
Jml. Katoea Comite Nasional.
TOEANKOE MAHMOED

LAMPIRAN VI

Gunseikanbu Aceh Syu Sityo

K U T A R A J A

ACEH SYU REI No. 10 — SYOWA 19 ITI-GATU1.

**Undang-undang tentang susunan
Hakim dan Mahkamah
di daerah Aceh.**

Pasal 1. Menurut pasal 1. ayat penghabisan dari bahagian penambahan Tomi Sei Rei otu No. 10 yaitu dari Undang-undang tentang aturan Hakin dan Mahkamah seterusnya akan disebutkan. Undang-undang tentang Hakim dan Mahkamah, maka diadakan Undang-undang tentang susunan Hakim dan Mahkamah di daerah Aceh.

Undang-undang ini ditetapkan untuk mengatur, selain dari susunan pengadilan Gubernurnemen di Aceh, peraturan Hakim dan Mahkamah.

Di daerah Aceh diadakan Hoin (Mahkamah) seperti tersebut di bawah ini dan tentang mengadakan Syu Kyo Hoin (Mahkamah Agama) akan ditetapkan dengan aturan yang lain (tersendiri) :

1. Ku - Hoin.
2. Tiho - Hoin.

Pasal 2. Ditiap-tiap Gun dan Son diadakan Ku-Hoin.

Pasal 3. Perkara-perkara yang disebutkan dibawah ini, diperiksa dan diputuskan oleh Ku - Hoin.

1. Perkara Minzi : Persengketaan yang pokok perselisihannya tiada lebih jumlahnya dari f 200,- (dua ratus rupiah).
2. Perkata Keizi : Persengketaan yang hukumannya di bawah 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya f 100 - (seratus rupiah).

3. Dan perkara lain-lain yang masuk dalam kekuasaannya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 4. Ku - Hoin terdiri dari lebih 3 orang Sinpan - In [anggota] dan musti dihadiri oleh seorang Ulama sebagai Penasihat, dan seorang Syoki. Tetapi kalau orang yang berperkara bukan umat Islam, maka perkara itu tidak perlu dihadiri oleh Ulama.

Salah seorang dari Sinpan - In diangkat menjadi Saiban Tyo [Ketua Mahkamah].

Jika Sinpankan [hakim] dari Tiho Hoin merasa perlu, maka ia boleh menjadi Saiban - Tyo dari Ku - Hota.

Ku - Hoin memutuskan perkara dengan semufakat Sinpan-In.

Di Ku - Hoin dari tiap-tiap Son, Santyo menjadi pengawas supaya perkara-perkara jangan terlambat diputuskan dari semestinya, dan urusan pengadilan dapat berjalan dengan baik.

Pasal 5. Perkara yang diputuskan oleh Ku Hoin boleh dibandingkan (apel) kepada Tiho Hoin.

Pasal 6. Tiho - Hoin diadakan di Kutaraja dan cabangnya didirikan ditiap-tiap Bunsyu terkecuali di Dai Aceh Bunsyu.

Pasal 7. Tiho - Hoin memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang termasuk dalam golongan yang tersebut di bawah ini.

No. 1. Perkara Minzi dan Keizi :

- a. Sebagai pengadilan yang pertama perkara yang tiada masuk dalam kekuasaan Ku - Hoin.
- b. Perkara-perkara bandingan yang melawan keputusan Ku - Hoin.

No. 2. Dan lain-lain perkara yang ditentukan kekuasaannya oleh Undang-undang.

Pasal 8. Tiho - Hoin terdiri dari :

Simpankan, satu orang.

Kosel - In (anggota). lebih dari dua orang dan perlu dihadiri oleh Ulama sebagai penasihat dan satu orang Syoki.

Walaupun demikian, jikalau orang berperkara itu bukan

Umat Islam, maka tiada perlu dihadiri oleh Ulama.

Simpangkan menjadi Saiban-tyo.

Tiho-Hoin mengadili perkara dengan semufakat Simpangkan dan Kosei-Hoin.

Pasal 9. Perkara-perkara yang diputuskan oleh Tiho Hoin sebagai pengadilan yang pertama, boleh dibandingkan kepada Koto-Hoin yang diatur oleh Undang-undang tentang aturan Hakim dan Mahkamah.

Pasal 10. Simpangkan. Kond - In dan Ulama dari Tiho-Hoin dan Sinpan-In dan Ulama dari Ku-Hoin, diangkat dan diperhentikan oleh Tuan Besar Tyokan.

Pasal 11. Jika sesuatu keputusan dari Hoin yang dimaksud dalam Undang-undang ini, baik dalam perkara Minzi maupun dalam perkara Keizi, yang tidak dapat ditarik kembali dan ternyata bahwa keputusan itu tidak adil, maka Tiho-Hoin Kutaraja berhak memeriksanya kembali.

Pemeriksaan kembali seperti yang dimaksud di atas boleh dilakukan karena jabatan [ex-officio] terhadap perkara-perkara Minzi, dan terhadap perkara-perkara Keizi dilakukan pemeriksaan kembali atas permintaan Kensatu Kan [Opsir Yoestisi].

Pasal 12. "Kensatu" dilakukan menurut Undang-undang tentang aturan Hakim dan Mahkamah.

Pasal 13. Dalam hal aturan Hakim dan Mahkamah, kekuasaan dan tuntutan hukum dari peraturan ini, dilakukan menurut peraturan "Musapat" yang lama. Tetapi tentang aturan tuntutan hukum, Tiho Hoin-tyo [Ketua dari Tiho Hoin] Kutaraja boleh menunjukkan perubahan jika dianggapnya perlu, baik yang umum ataupun yang teristimewa untuk Tiho - Hoin yang dikerualnya dan Hoin-hoin yang lain di dalam jajahannya.

Aturan tambahan.

Undang-undang ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Satu Syowa 19 Aceh Syu Rei No. 1 dan No. 2 tidak berlaku lagi.

Pengadilan yang menurut Aceh Syu Rei No. 4 dilakukan oleh Guntyo dan Santyo, akan dilakukan oleh Ku Hoin.

Kutaraja. Syowa 19 Iti Gatu 1.

Gunsetkanbu Aceh Syu Nyokan.

S. I I N O.

LAMPIRAN VII

Guncosikanbu Aceh Syu Seityo

K U T A R A J A.

Aceh Syu Rei No. 12

Syowa Ni Gatu 15 Nati

**Aceh Syu [] (undang-undang Aceh).
Tentang susunan Syukyo Hoin (Mahkamah Agama)
di dalam Aceh Syu**

Pasal 1

Untuk menghormati dan menghargai Agama Islam dan untuk menjalankan Syara' Agama Islam yang patut dan sesuai di dalam Aceh Syu. diadakan Syukyo Hoin di Kutaraja.

Dan sebagai badan di bawahnya dari Syukyo Hoin akan diadakan seorang "Kepala Kadli" dan beberapa orang anggota majelisnya di tiap-tiap Bunsyu, Hoin seorang "Kadli Son" ditiap-tiap Son.

Fasal 2.

Syukyo Hoin mengurus pekerjaan yang tersebut dibawah ini:

1. Bermufakat dan menetapkan tentang melakukan urusan nikah dan segala perkara yang bersangkutan dengan dia dan urusan faraidli, menurut ketentuan syafa
2. Memutuskan pekerjaan [keberatan] tentang hukum yang dilakukan oleh Kepala Kadli dan Kadli Son: mengubah dan memperbaiki hukum itu menurut kekuasaan jabatan.
3. Menjaga, menyelidiki dan memimpin Kepala Kadli dan Kadli Son.
4. Dan lain-lain yang diperintah oleh Aceh Syu Tyokan, yang mengenai urusan Agama Islam.

Pasal 3.

Syukyo Hoin terdiri dari "Z y o n i n l i n" (anggota-anggota harian) dan "I i n" (anggota-anggota biasa).

Salah seorang dari Zyoinin lin akan diangkat "I i n t y o" (Ketua).

Aceh Syu Tyokan mengangkat dan memperhentikan Z y o n i n l i n dan I i n menurut unjukan dari Tihio Hointyo Kutaraja, dari Ulama-ulama yang cerdik pandai, jujur dan berpengaruh di dalam Aceh Syu.

Iintyo akan diunjukatkan oleh Aceh Syu Tyokan

Pasal 4.

- a. Kepala Kadli anggota-anggota majelisnya dan Kadli Son mengurus pekerjaan dalam jajahannya masing-masing menurut ketentuan yang akan ditetapkan.
- b. Kepala Kadli dan anggota-anggota majelis yang diangkat dan diperhentikan oleh Aceh Syu Tyokae, menurut unjukan Tihio Hontyo Kotaraja.
- c. Kadli Son diangkat dan diperhentikan oleh Sontyo atas persetujuan Syukyo Hoin.

Pasal 5.

Tihio-Hointyo Kutaraja menjagai dan menyelidiki Syukyo Hoin dan badan di bawahnya menurut perintah dan Aceh Syu Tyokan.

Tambahan :

Undang-undang ini berlaku mulai pada tanggal Syowa 19 Sagatu I Niti.

Peraturan-peraturan yang perlu untuk melakukan undang-undang tersebut akan ditetapkan dengan Kadli (Mahkamat Pemerintah)

Kotaraja Syowa 19, Ni Gatu Niti
Gunseikanbu Aceh Syu Tyokan

S. I I N O.

LAMPIRAN : VIII

Daftar nama-nama anggota Aceh Syu Sangi Kai

I. Anggota-anggota yang dipilih mewakili GUN (Kawedanaan).	II. Anggota-anggota yang diangkat
Kutaraja — Teuku Ad/T.M. Amin	1. T. Ahmad/T. Cut. Almad
Seulimun — Tengku Syeh Ibrahim/Tengku Abdul Wahab.	2. T. Hanafiah Meulaboh.
Sabang — T. Djohan/Ahmad Kamil.	3. T.P.P. M. Ali
Sigli — T. Muhammad/T.Tjoet Hasan	4. Teuku Nyak Afil
Lammeulo — T. Bentara Hasan/ T. Mahmoed.	5. Tgk. Daud Beureueh
Meureudu — T. Ali Basjah/T. Sabi.	6. Tgk. H. Hasan Kruengkale
Bireuen — T. Tjoet Hasan/Tengku Syech Abdul Hamid.	7. Tgk. M. Hasbi
Takengon — Radja Zainuddin/Chalidin Abubakar	8. Tuanku Mahmoed.
Lhokseumawe. — T.Tjoet Radja Pait/ T. Wahi.	9. dr. Muhammad Mahjuddin.
Lhoksukon — T.Mochd Adji/T. Radja Mahmoed.	10. Ali Murtholo
Idie — T.T.M. Daoedsyah.	11. Mr. S. M. Amin.
Langsa — T. Said Umar/ A. Azis.	12. Tjek Ahmad Blangpidie.
Tamiang — T. Radja Soeloeng.	13. T. Tjhi' Mahmoed.
Alas — Radja Maribeen.	14. dr. F. J. Nainggolan.
Gayo Luas — Matrahim/M. Aman Sari.	15. T. Laksamana Umar Ndjong
	16. Thie Kie Sam.
	17. T.T. Mohd. Taib Woed Meulaboh.

- Calang - Nyak Mansur/Tgk. A. Rachman.
Maulaboh - T.M. Ali/Tgk. Hasan Hanafiah
Tapaktuan - Tjck Ahmad/T. Radja Pait.
Bakongan - Tgk. Adnan Mahmud/T. Kamli Angkasah.
Singkii - Tengku Ibrahim Meuraxa.
Sinabang - Tengku Ibrahim.
-

Sumber : Said Abubakar, "Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
"Majalah DPRD Daerah Istimewa Aceh No. 2 th. 1977
hal. 31 - 32.

Anggota Aceh Syu Sangi Kai (DPRD Aceh) pada
pelantikan pertama 30 orang, kemudian terjadi peng-
gantian dan penambahan sehingga berjumlah 40
orang anggota.

Lampiran IX

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصّٰدِقِ الْبَلِیْغِ الْوَعْدِ الْوَالْحَقِّ الْوَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ

دھاری کڈ سکلیہ... مستہیں دھرا سکلیہ کیت برسیوگ دھن نعدہ اللہ یا
 کمر دھکان نگری کیت اندر سبھا ہندولہ سبھن کیت مبري حکور کڈ اللہ اتس نعدہ
 دان لابن نعدہ لون ہندولہ کیت ہر اعدہ ہر سام اتس ملھفون تنقرا مجاہدین ہوا م
 اگھا اللہ دان مہلکھی کلیات اللہ دان ملھکھہ اتوران اسلمہ
 قال اللہ تعالیٰ ان تصروا اللہ بھنھکم ویتھب اھدائکم وقال تعالیٰ وعاونوا علی البر والتقوی ولا تد
 علی الاثم والعدوان وقال: قلوا الی کلمۃ سوا بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نھکھہ شیئا
 یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اھدوا ہا نامسلون وقال تعالیٰ ودوا لربکھ
 کما کفروا فتکونون سواہ قال اللہ تعالیٰ ولن ترھض عنکھ الیھود ولا النصارى حتی تنزع ملتھم
 رجیلہ اتس کیت برسیوگ اتس ملارن موسوہ اللہ دان موسوہ رسولہ دان مھکھہ سل
 المسلمین جاھن مھکھہ تنصاحہ کارین اتو یہ مہرہ کڈ مرھک ایت یہ ہندولہ منج
 کمالی اندونسیا وجیلہ اتس کیت کاسیہ اتس جینتا کڈ اللہ دان رسولت دان ہندولہ
 مھوربا لکن حیوا دان ہر تھہ کیت ند منولم اگھا اللہ دان کر جان یہ صحہ

هذا والسلام علی من اتبع الهدی

کتبہ الفقیر الصبور الحاج محمد حسن کروز کالی 18 ذوالقعدہ 1364

Penjelasan.

Ditunjuk Haji Hasan Krueng kalé yang membuat surat fatwa ini, yaitu seorang Ulama besar. Surat fatwa ini dibuat dalam bulan November 1945, untuk menyatakan peperangan merupakan urusan kemerdekaan adalah perang-jabil. Ini adalah satu bukti, bahwa bangsa besar pertuan ulama dalam perjuangan menabala Republik Indonesia selama tahun-tahun revolusi di Aceh.

Banda Aceh, 17 Juli 1975

A. Hanjmy

Lampiran X

PERINTAH BERSAMA

Panglima Divisi Tgk. Tjhi' di Tiro dan Panglima Divisi Rentjong.

1 Dengan ini diperintahkan kepada seloeroeh Lasjkar Mudiyahidin dan segenap anggota Masjumi dan bahagian2nja dan kepada seloeroeh Lasjkar Kesatria Pesindo dan segenap anggota Pesindo

1. Dimana saja terdapat gempureserus musuh dgu tak usah menunggu komando

2. Bekerdiasamaan dengan Tetara dan Polisi diri malakukan segala bentuk perlawanan untuk Negara dan merigka tumpah

3. Terhadap penganihan2 Negara dan orang2 yang mengharap kedatangan Belanda dan lain2 tindakan yang tepat dan laka

4. Sesuatu tempat atau objek yang terpaksa kita tinggalkan hanturkamban segala2 yang berguna bagi moeseoh

5. Siang dan malam berjihadlah dengan perang gurita karena kita akan diharapkan samoa bertahun2 lamanya

Panglima Divisi Tgk. Tjhi' di Tiro dan
Panglima Divisi Rentjong

